

**ANALISIS PENDUDUK KELAS MENENGAH (*MIDDLE CLASS*) VS PERTUMBUHAN EKONOMI**

**Tugas Akhir**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD RINALDY LUBIS**  
**NPM : 2105180031**  
**Program Studi : Ekonomi Pembangunan**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 13 Juni 2025, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

**NAMA** : MUHAMMAD RINALDY LUBIS  
**N P M** : 2105180031  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : ANALISIS PENDUDUK KELAS MENENGAH (MIDDLE CLASS) VS PERTUMBUHAN EKONOMI

**DINYATAKAN** : ( A ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**Tim Penguji**

**Penguji I**

**Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si**

**Penguji II**

**Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.**

**Pembimbing**

**Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si.**

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA**

**Sekretaris**



**Assoc. Prof. Dr. ADE CUNAWAN, S.E., M.Si.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini disusun oleh:

Nama Lengkap : Muhammad Rinaldy Lubis  
N.P.M : 2105180031  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL. Panglima Polem, Kisaran  
Judul Tugas Akhir : Analisis Jumlah Penduduk Kelas Menengah (*Middle Class*) Vs  
Pertumbuhan Ekonomi

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan  
tugas akhir.

Medan, 28 April 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M. Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., M.M., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

Nama : Muhammad Rinaldy Lubis  
N.P.M : 2105180031  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Jumlah Penduduk Kelas Menengah (*Middle Class*) Vs  
Pertumbuhan Ekonomi

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Tugas Akhir	Paraf	Keterangan
17 Maret 2025	Perbaikan Rumusan Masalah II dan Perbaikan <del>Definisi</del> Rumusan Masalah ke III		
15 April 2025	Perbaikan Rumusan Masalah II II olahan Data Membuat Treatment Variabel		
16 April 2025	Perbaikan Rumusan Masalah III Olahan Data Membuat Treatment Variabel		
19 April 2025	Perbaikan Model Ekonometrika		
21 April 2025	Perbaikan Olahan Data Pada Rumusan Masalah ke III		
20 April 2025	ACC / Ujian Sidang		

Medan, April 2025  
Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, RS, S.E., M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Unggul | Cerdas | Terpercaya Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rinaldy Lubis  
N.P.M : 210518031  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Tugas Akhir : Analisis Penduduk Kelas Menengah (*Middle Class*) vs Pertumbuhan  
Ekonomi di Pasca Covid

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir saya yang berjudul “**Analisis Penduduk Kelas Menengah (Middle Class) vs Pertumbuhan Ekonomi di Pasca Covid**” bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

Yang Menyatakan



Muhammad Rinaldy Lubis

**ABSTRAK**  
**ANALISIS PENDUDUK KELAS MENENGAH (*MIDDLE CLASS*) VS  
PERTUMBUHAN EKONOMI**

**Muhammad Rinaldy Lubis**  
**Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
**Email : [mhdrinaldylbs223@gmail.com](mailto:mhdrinaldylbs223@gmail.com)**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika jumlah penduduk kelas menengah dan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dalam rangka memahami tantangan pembangunan ekonomi inklusif. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena penurunan jumlah penduduk kelas menengah yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, dari 57,33 juta orang pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun 2024. Penurunan ini berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebagian besar ditopang oleh konsumsi domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data time series untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penduduk kelas menengah secara nasional, serta data panel untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi per provinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel upah minimum, investasi, lulusan pendidikan tinggi, jumlah pengangguran dan tenaga kerja formal berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk kelas menengah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi secara signifikan oleh investasi, nilai PDRB, tingkat kesempatan kerja, dan jumlah angkatan kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa penurunan kelas menengah tidak hanya menjadi ancaman sosial, tetapi juga hambatan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang inklusif untuk memperkuat stabilitas kelas menengah, menciptakan lapangan kerja formal, serta mendorong pemerataan investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

**Kata Kunci:** Kelas Menengah, Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, Pembangunan Inklusif, Time Series, Data Panel.

## **ABSTRACT**

### ***Analysis of the Middle-Class Population vs Economic Growth***

**Muhammad Rinlady Lubis**  
**Development Economics Study Program**  
**Email: [mhdrinaldylbs223@gmail.com](mailto:mhdrinaldylbs223@gmail.com)**

*This study aims to analyze the dynamics of the middle-class population and its relationship with economic growth in Indonesia, in order to understand the challenges of inclusive economic development. The background of this study is based on the phenomenon of a significant decline in the middle-class population over the past five years, from 57.33 million people in 2019 to 47.85 million people in 2024. This decline impacts the purchasing power of the population and national economic growth, which is largely supported by domestic consumption. This research uses a descriptive quantitative approach with time series data analysis methods to examine the factors affecting the middle-class population nationwide, as well as panel data to investigate the factors influencing economic growth at the provincial level. The estimation results show that variables such as the minimum wage, investment, higher education graduates, unemployment rate and formal labor force significantly affect the middle-class population. Meanwhile, economic growth is significantly influenced by investment, GDP value, employment opportunities, and the labor force. These findings indicate that the decline of the middle class is not only a social threat but also a barrier to sustainable economic development. Therefore, inclusive policies are needed to strengthen the stability of the middle class, create formal employment, promote the equitable distribution of investments, and improve the quality of human resources.*

**Keywords:** *Middle Class, Economic Growth, Labor Force, Inclusive Development, Time Series, Panel Data.*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Analisis Penduduk Kelas Menengah (MIDDLE CLASS) VS Pertumbuhan Ekonomi**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikut Beliau yang insya Allah tetap istiqomah hingga akhir zaman kelak, Amin. Dengan selesainya penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Adapun ungkapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat Kesehatan kepada saya. Dan atas izinnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih saya berikan untuk yang tersayang : Bapak Zulkarnain Lubis dan Ibu Ismawati Sinaga yang telah berjuang mengasuh, mendidik, melahirkan saya ke dunia, memberikan semangat dan doa yang tiada henti sehingga saya bisa berada di titik ini berkat kedua orang tua hebat saya.
3. Kepada abang saya Khairul Insan Lubis yang selalu memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak H. Januri S.E., M.M., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si. selaku wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, Selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Roswita Hafni M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Dosen mata kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat, semoga menjadi amalan di akhirat kelak.
11. Bapak / Ibu Biro Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam Akademik .
12. Kepada sahabat saya yang selalu memeberikan semangat dan dukungan (nigo,muda,adi,tohir,distak,ebot,rohde,dini,iyen,citra) terima kasih karena selalu kebersamai dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada sahabat saya sekaligus teman seperjuangan yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini (melki) terimakasih karena sudah mau membantu dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada temen seperjuangan saya dalam penulisan skrpsi ini (Alyssia, Sally).
15. Kepada sahabat saya (ema,vebrian) terimakasih sudah kebersamaian dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada sahabat jauh saya (Sylvie) terima kasih sudah mau memberikan saya dukungan dan semangat.
17. Kepada teman-teman seperjuangan saya serta rekan sekelas masa perkuliahan, dan teman-teman dekat saya yang telah memberi informasi mengenai perkuliahan, dan memberi semangat kepada saya.
18. Terima kasih kepada diri saya sendiri Muhammad Rinaldy Lubis, yang sudah mau bertahan dan berjuang dalam penulisan skripsi ini walaupun banyak sekali rintangan yang di telah di lalui dan fase-fase berat penulis mampu bangkit dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua pihak dalam menerapkan ilmu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih, Wassamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2025

Penulis,

Muhammad Rinaldy Lubis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	24
1.3 Batasan Masalah .....	25
1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian.....	25
1.4.1 Rumusan Masalah .....	25
1.4.2 Tujuan Penelitian .....	26
1.5 Manfaat Penelitian .....	26
1.5.1 Manfaat Akademik.....	26
1.5.2 Manfaat Non-Akademik .....	27
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>28</b>
2.1 Uraian Teori .....	28
2.1.1 Pembangunan Ekonomi .....	28
2.1.1.1 Aliran Klasik.....	29
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2.1.3 Pendapatan Nasional .....	55
2.1.3.1 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional .....	56
2.1.4 Ketenagakerjaan.....	59
2.1.5 Kesempatan Kerja .....	63
2.1.5.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja.....	63
2.1.6 Upah .....	68
2.1.7 Pembangunan Ekonomi Inklusif .....	70
2.1.7.1 Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif .....	70
2.1.7.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif .....	71
2.1.8 Definisi Kelas Menengah.....	73

2.2	Regulasi.....	76
2.3	Peneliti Terdahulu.....	77
2.4	Kerangka Penelitian.....	81
2.4.1	Tahap Penelitian.....	81
2.4.2	Kerangka Analisis Penelitian.....	82
2.4.3	Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kelas Menengah di Indonesia (Data <i>Time Series</i> ).....	82
2.4.4	Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia 2019-2023(Data Panel).....	83
2.5	Hipotesis.....	84
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>86</b>
3.1	Pendekatan Penelitan.....	86
3.2	Defenisi Operasional.....	86
3.3	Tempat Dan Waktu Penelitian.....	88
3.3.1	Tempat Penelitian.....	88
3.3.2	Waktu Penelitian.....	88
3.4	Jenis Data dan Sumber Data.....	88
3.4.1	Jenis Data.....	88
3.4.2	Sumber Data.....	88
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	89
3.6	Model Estimasi.....	89
3.7	Metode Estimasi.....	91
3.8	Teknik Analisis Data.....	92
3.8.1	Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang Jumlah Penduduk Kelas Menengah, Pertumbuhan ekonomi, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan PDRB Rill per Kapita dan Tingkat Kesempatan Kerja.....	92
3.8.2	Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia Menggunakan data ( <i>Time Series</i> ).....	92
3.8.3	Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi tahun 2019-2023 di Indonesia Menggunakan data (Panel).....	99
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>102</b>
4.1	Gambaran Umum Indonesia.....	102
4.1.1	Kondisi Geografis Indonesia.....	102

4.1.2	Kondisi Demografi Indonesia .....	102
4.1.3	Perkembangan Ekonomi di Indonesia.....	106
4.1.4	Perkembangan Sosial di Indonesia.....	111
4.2	Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk Kelas Menengah .....	118
4.2.1	Analisis Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia .....	118
4.3	Analisis Perkembangan Indikator Pilar Pertama Pembangunan Ekonomi Inklusif .....	120
4.3.1	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Riil per Kapita di Indonesia tahun 2019-2023 .....	121
4.3.2	Perkembangan Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB di Indonesia tahun 2019-2023 .....	122
4.3.3	Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia tahun 2020-2024 .....	124
4.4	Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah.....	126
4.4.1	Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah.....	126
4.4.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	129
4.5	Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi .....	142
4.5.1	Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	142
4.5.2	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	145
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>159</b>
5.1	Kesimpulan .....	159
5.2	Saran .....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>162</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>166</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Modal Manusia di Asia Tenggara .....	2
Gambar 1. 2 Penduduk Kelas Menengah di Dunia .....	4
Gambar 1. 3 Persentase populasi dalam rumah tangga kelas menengah berdasarkan generasi dan tahap siklus kehidupan.....	6
Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (G20) 2024.....	9
Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Indonesia.....	10
Gambar 1. 6 Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia.....	12
Gambar 1. 7 Pertumbuhan Lapangan Kerja di Indonesia .....	14
Gambar 1. 8 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Indonesia ....	16
Gambar 1. 9 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Indonesia tahun 2024 .....	17
Gambar 1. 10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2024 .....	18
Gambar 1. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024 .....	20
Gambar 1. 12 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 .....	21
Gambar 2. 1 Fungsi Produksi.....	39
Gambar 2. 2 Output, Konsumsi dan Investasi.....	42
Gambar 2. 3 Depresiasi .....	42
Gambar 2. 4 Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan .....	43
Gambar 2. 5 Kurva Permintaan Investasi.....	50
Gambar 2. 6 Kurva Permintaan Tenaga Kerja.....	64
Gambar 2. 7 Kurva Nilai Produk Marginal.....	66
Gambar 2. 8 Pergeseran Kurva Permintaan Tenaga Kerja .....	66
Gambar 2. 9 Kurva Penawaran Tenaga Kerja Melengkung ke Belakang .....	70
Gambar 2. 10 Pilar dan Sub-Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	72
Gambar 2. 11 Kerangka Analisis Penelitian .....	82
Gambar 2. 12 Kerangka Model Konseptual.....	83
Gambar 2. 13 Kerangka Model Konseptual.....	84
Gambar 3. 1 Kriteria Uji Distribusi Kurva Normal .....	95
Gambar 3. 2 Kriteria Uji Distribusi Kurva F .....	96
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2024 .....	103
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024) .....	107
Gambar 4. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024).....	109
Gambar 4. 4 Tingkat Inflasi Di Indonesia (2018-2024) .....	110
Gambar 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia (2019-2024).....	112
Gambar 4. 6 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (2019-2024). 113	
Gambar 4. 7 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024) .....	115
Gambar 4. 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia (2019-2024) .....	117
Gambar 4. 9 Uji Parsial Distribusi Normal Kurval t.....	136
Gambar 4. 10 Uji Simultan (F) Distribusi Normal Kurva F .....	139
Gambar 4. 11 Hasil Uji Parsial Distribusi Kurva Normal t .....	151
Gambar 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F) Distribusi Kurva F.....	153

Gambar 4. 13 Gambar *Scatterplot* Model..... 155

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu .....	77
Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Varibel Ekonometrika (Data Time Series).....	86
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Varibel Ekonometrika (Data Panel) .....	87
Tabel 4. 1 Ketenagakerjaan Indonesia .....	105
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kelas Menengah .....	119
Tabel 4. 3 Pertumbuhan PDRB Rill per Kapita di Indonesia .....	121
Tabel 4. 4 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB di Indonesia tahun 2019-2023 .....	122
Tabel 4. 5 Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia.....	124
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Model.....	126
Tabel 4. 7 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda .....	129
Tabel 4. 8 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel PE dan Menambahkan Logaritma Natural.....	130
Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi.....	131
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	135
Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	138
Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas .....	140
Tabel 4. 13 Perbaikan Uji Multikolineritas.....	141
Tabel 4. 14 Uji Heterokedastisitas .....	141
Tabel 4. 15 Uji Autokorelasi.....	142
Tabel 4. 16 Statistik Deskriptif Model.....	143
Tabel 4. 17 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda .....	145
Tabel 4. 18 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel TKK dan INF .....	146
Tabel 4. 19 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi.....	147
Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t) .....	150
Tabel 4. 21 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	152
Tabel 4. 22 Hasil Uji Multikolinearitas .....	154
Tabel 4. 23 Hasil Uji Auto Korelasi .....	156
Tabel 4. 24 Hasil Uji Korelasi Setelah Melakukan Perbaikan.....	156
Tabel 4. 25 Hasil Uji Hausman.....	157

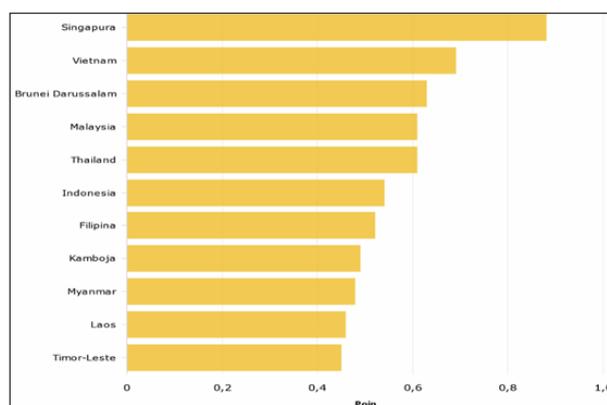
# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Keberadaan kelas menengah (*middle class*) dalam suatu negara atau perekonomian telah lama menjadi perhatian dan bukan merupakan topik yang baru. Sejarawan ekonomi seperti Adelman & Morris (1967) dan Landes (1998) menyebut kelas menengah sebagai kekuatan pendorong utama dalam percepatan pembangunan ekonomi di Inggris dan daratan Eropa pada abad ke-19 (Easterly, 2001 ; OECD *Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2003). Oleh karena itu, perhatian terhadap kelas menengah dan kebijakan yang mendukung pengembangannya semakin meningkat. Hal ini juga didasarkan pada keyakinan bahwa kelas menengah merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan yang berkelanjutan. (Nizar, Muhammad Afdi)

Fenomena kelas menengah saat ini menjadi topik penting dalam kajian sosial dan ekonomi. Kelas menengah kerap dianggap sebagai penopang stabilitas ekonomi dan sosial, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjadi elemen kunci dalam pengembangan masyarakat. Di berbagai negara, khususnya negara berkembang, kelas menengah menunjukkan pertumbuhan pesat yang sering dikaitkan dengan liberalisasi ekonomi dan urbanisasi (Chun et al., 2011; Brueckner et al., 2017). Secara global, kelas menengah tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi dan perubahan sosial, yang mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan perluasan pasar (Chun et al., 2011; Kuznetsova & Tupitsyn, 2014).

Akumulasi modal manusia menjadi saluran penting bagi kelas menengah untuk mendorong kesejahteraan dan meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita, terutama dengan memperbesar populasi berpendidikan menengah dan tinggi (Brueckner et al., 2017; OECD, 2003). Selain itu, kelas menengah berperan penting dalam mendukung pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, mendanai program perlindungan sosial, dan mengangkat jutaan keluarga keluar dari kemiskinan. Di negara-negara dengan jumlah rumah tangga kelas menengah yang besar, aktivitas kewirausahaan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan PDB (van Stel et al., 2005). Dengan demikian, kelas menengah yang kuat dianggap sebagai pilar penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah serta sektor kewirausahaan yang tangguh (OECD, 2010). Bukti menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung lebih tinggi di negara-negara dengan kelas menengah yang kuat (Easterly, 2001; Brueckner et al., 2018). Kelas menengah sering dianggap sebagai pilar utama ekonomi pasar (market economy) dan demokrasi, yang berperan dalam memastikan stabilitas sosial dan politik dengan memperkuat kohesi sosial serta mengurangi konflik antara kelompok kaya dan miskin (Barro, 1996; Birdsall et al., 2000).



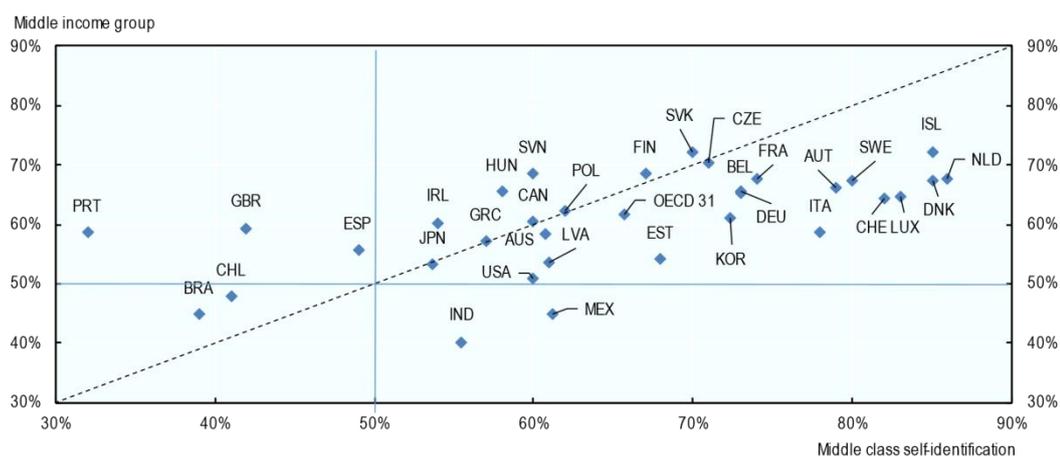
*Sumber : World Bank*

**Gambar 1. 1 Indeks Modal Manusia di Asia Tenggara**

Singapura menempati posisi teratas dalam Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI) secara global, dengan skor 0,88 poin, menjadikannya sebagai pemimpin di Asia Tenggara. Negara ini diakui sebagai unggul dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang berstandar internasional serta kesehatan, yang berkontribusi pada tingginya harapan hidup warganya. Pada tahun 2020, Indonesia, dengan skor 0,54 poin, berada di bawah Singapura, sama seperti HCI yang dihasilkan pada tahun 2018. Indonesia berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (0,69 poin), Brunei Darussalam (0,63 poin), Malaysia (0,61 poin), dan Thailand (0,61 poin). Indonesia berada di peringkat ke 6 dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya dalam hal ini Indonesia harus meningkatkan kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kondisi Kematian dan social ekonomi agar dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia. HCI yang melibatkan 174 negara, menunjukkan bahwa perkembangan dalam bidang kesehatan dan pendidikan di suatu negara dapat memengaruhi produktivitas generasi pekerja mendatang. Indeks ini dihitung berdasarkan berbagai komponen, termasuk tingkat kematian, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun, serta kualitas dan kuantitas pendidikan yang diterima dan kemungkinan bertahan hidup pada usia dewasa. Rendahnya Indeks Modal Manusia Indonesia diidentifikasi berkaitan erat dengan kondisi sosial ekonomi negara. Menurut laporan *Global Competitiveness Report 2019* oleh *World Economic Forum*, Indonesia menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara dalam hal daya saing, yang masih sedikit di bawah Malaysia dan Thailand, serta jauh dari Singapura yang berada di peringkat teratas.

Sebagian besar penduduk di negara-negara di dunia ,sekitar dua pertiga dari total populasi menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelas menengah,

antara pertengahan 1980-an hingga pertengahan 2010-an, proporsi individu yang tinggal dalam rumah tangga berpendapatan menengah mengalami penurunan dari 64% menjadi 61%. Proses penurunan ini berlangsung secara bertahap, sekitar 1 poin persentase setiap dekade, dan sejalan dengan meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah dan tinggi.



Sumber: OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*)

### Gambar 1. 2 Penduduk Kelas Menengah di Dunia

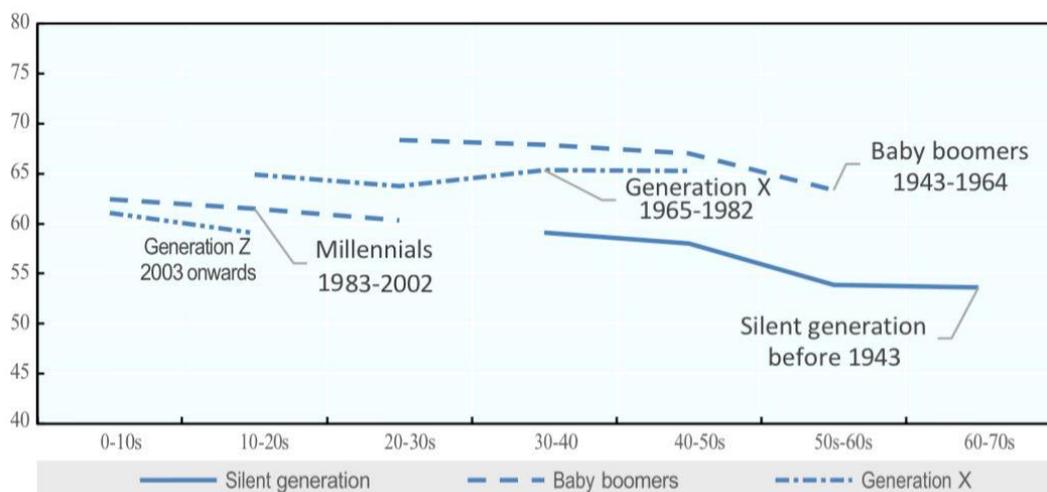
Menurut data OECD tentang *The Squashed Middle Class*, identifikasi diri sebagai anggota kelas menengah paling umum ditemukan di negara-negara Nordik (kecuali Finlandia), Belanda, Luksemburg, dan Swiss, di mana sekitar empat dari lima orang menganggap diri mereka bagian dari kelas ini. Sebaliknya, di Portugal, Brasil, Chile, dan Inggris, hanya dua dari lima orang atau bahkan kurang yang mengidentifikasi diri sebagai kelas menengah. Di Inggris, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mayoritas orang lebih cenderung menganggap diri mereka sebagai kelas pekerja. Menariknya, sejumlah individu mengidentifikasi diri mereka sebagai kelas menengah meskipun kondisi sosioekonomi objektif mereka mungkin tidak mendukung klaim tersebut. Fenomena yang disebut "bias

kelas menengah" (Evans, 2004) tampak terutama tinggi di Italia, Meksiko, dan India, serta di negara-negara di mana sebagian besar populasi mengidentifikasi diri sebagai bagian dari kelas menengah. Salah satu penjelasan untuk fenomena ini adalah bahwa orang-orang cenderung memiliki tingkat pendapatan yang dianggap sebagai ambang batas minimum untuk menjadi bagian dari kelas menengah; ambang batas ini biasanya lebih rendah bagi mereka yang berpendapatan tinggi dan sedikit lebih tinggi bagi mereka yang berpendapatan lebih rendah. Penting untuk dicatat bahwa identifikasi diri dengan kelas menengah ini hanya berkaitan longgar dengan proporsi rumah tangga berpendapatan menengah di berbagai negara. Di negara-negara OECD, rumah tangga yang dikategorikan sebagai berpendapatan menengah—yaitu, rumah tangga yang berpenghasilan antara 75% hingga 200% dari pendapatan median nasional—rata-rata mencakup 61% dari total populasi. Proporsi ini bervariasi, mulai dari sekitar 50% di Chile, Meksiko, Amerika Serikat, dan Israel, hingga sekitar 70% di negara-negara Nordik dan beberapa negara Eropa Kontinental. Di negara-negara berkembang, kelompok berpendapatan menengah umumnya lebih kecil, dengan estimasi berkisar dari sekitar sepertiga populasi di Afrika Selatan hingga separuh populasi di Rusia.

OECD mengungkapkan adanya perbedaan signifikan dalam populasi kelas menengah yang bisa diidentifikasi berdasarkan generasi. Mereka mengelompokkan populasi ini ke dalam lima generasi yang berbeda, masing-masing memiliki karakteristik, nilai, dan tantangan yang unik. Setiap generasi dari yang lebih tua hingga yang lebih muda, berkontribusi pada dinamika kelas menengah dengan cara yang berbeda. Misalnya, generasi yang lebih tua

cenderung memiliki pandangan yang berbeda mengenai stabilitas ekonomi dan pekerjaan, sementara generasi yang lebih muda lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan globalisasi. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi pola konsumsi dan pengeluaran, tetapi juga mencerminkan cara setiap generasi merespons kondisi sosial dan ekonomi yang terus berubah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perbedaan ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dan aspirasi masing-masing kelompok, sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna untuk mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kelas menengah secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dan membandingkan karakteristik serta tantangan yang dihadapi oleh setiap generasi dalam kelas menengah. Langkah ini akan membantu kita mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi perubahan cepat di dunia saat ini.



Sumber: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

**Gambar 1.3 Persentase populasi dalam rumah tangga kelas menengah berdasarkan generasi dan tahap siklus kehidupan**

Menurut data OECD tentang *The Squazed Middle Class*, dalam mencapai

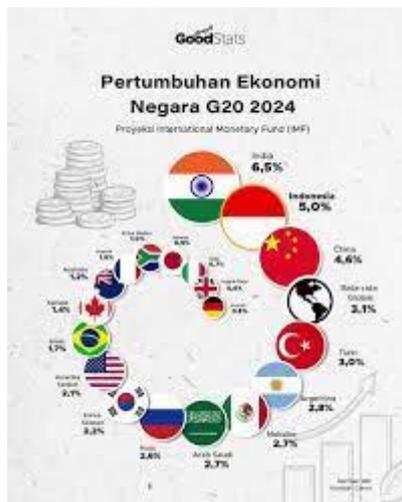
kelas menengah menjadi semakin sulit bagi generasi muda. Hal ini terjadi karena generasi yang lebih tua sering kali lebih terlindungi dari perubahan di pasar tenaga kerja dan risiko pendapatan rendah dibandingkan generasi baru. Sejak generasi baby boomer, kelompok berpenghasilan menengah telah semakin kecil dengan setiap generasi berikutnya. Generasi baby boomer menikmati pekerjaan yang lebih stabil selama masa kerja mereka, serta sistem pensiun yang lebih berkembang, dibandingkan generasi muda.

Selama tiga dekade terakhir, populasi telah mengalami perubahan signifikan: populasi semakin menua, semakin sedikit rumah tangga yang memiliki anak, dan lebih banyak orang usia kerja yang terlibat dalam pekerjaan. Oleh karena itu, komposisi rumah tangga berpendapatan menengah pasti akan berubah. Namun, perubahan ini mungkin tidak selalu sejalan dengan perubahan komposisi populasi. Misalnya, meskipun proporsi lansia meningkat, tidak jelas apakah kelas menengah telah menua seiring dengan populasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, bagian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kemungkinan kelompok populasi tertentu untuk menjadi bagian dari kelas menengah dibandingkan dengan tren populasi secara umum. Bukti menunjukkan bahwa mencapai status kelas menengah kini menjadi lebih mudah bagi generasi yang lebih tua dan lebih sulit bagi generasi muda. Hal ini karena generasi yang lebih tua seringkali lebih terlindungi dari perubahan di pasar tenaga kerja dan risiko pendapatan rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Pekerjaan yang lebih aman, karier yang stabil, dan sistem pensiun yang lebih baik (dalam banyak kasus berbasis manfaat pasti) memberikan peluang lebih besar untuk menjadi bagian dari kelas menengah bagi generasi baby boomer dibandingkan

dengan generasi sebelumnya dan sesudahnya.

Kelas menengah yang besar dan stabil diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi melalui investasi pada sumber daya manusia, konsumsi, dan tabungan, yang turut memperluas kelompok sosial ini (Easterly 2001). Selain itu, mereka juga meningkatkan permintaan konsumen (Murphy et al. 1989), mendorong kewirausahaan, dan berinvestasi jangka panjang (Doepke & Zilibotti 2007, Acemoglu & Zilibotti 1997 *at The Development of Human Capital: The Role of Family and Society.*)

Banerjee & Duflo (2008) menambahkan bahwa kelas menengah yang besar dapat mendorong pembangunan karena beberapa alasan: **Pertama** kelas menengah terkait dengan demokrasi; jika demokrasi berkontribusi pada pertumbuhan, maka kelas menengah turut mendorong pertumbuhan. **Kedua**, mereka menciptakan wirausaha yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. **Ketiga**, nilai-nilai kelas menengah, seperti pentingnya akumulasi modal sumber daya manusia dan tabungan, sangat mendukung pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai yang sulit dicapai oleh kelompok miskin. **Keempat**, kelas menengah mendorong permintaan terhadap barang konsumsi berkualitas tinggi, yang meningkatkan skala produksi, karena mereka mampu membayar lebih untuk produk-produk tersebut. Ini mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam produksi dan pemasaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per individu dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, akumulasi modal dalam bentuk pendidikan juga akan membawa lebih banyak orang miskin ke dalam kelas menengah. (Nizar, Muhammad Afdi)



Sumber: *International Monetary Fund (IMF) 2024*

### **Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Dunia (G20) 2024**

Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini mengalami perlambatan akibat beberapa faktor, antara lain inflasi di Amerika Serikat, penurunan permintaan di China dan Eropa, serta dampak dari ketegangan geopolitik yang terjadi. Meskipun demikian, Indonesia mencatatkan kinerja yang mengesankan di antara negara-negara G20, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,5%, yang menempatkannya di posisi kedua setelah India. Pertumbuhan yang dicapai India ini bahkan berhasil melampaui negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jerman, Prancis, dan Jepang.

Kombinasi dari pertumbuhan ekonomi yang kuat dan populasi yang besar telah menciptakan iklim yang mendukung untuk pengembangan berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Meskipun ada perlambatan dalam ekonomi global, Indonesia mampu mempertahankan resiliensi dan mencatat pertumbuhan positif, berkat kekuatan pasar domestiknya.



Sumber: BPS 2024

**Gambar 1. 5 Jumlah Penduduk Indonesia**

Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan enam dekade lalu, ketika pada tahun 1961 jumlah penduduk hanya sekitar 97,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini mencerminkan dinamika demografis yang terjadi di Indonesia. Dengan proyeksi BPS, pada usia satu abad Indonesia di tahun 2045, jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 324,1 juta jiwa. Proyeksi ini menunjukkan bahwa Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan populasi yang substansial dalam dua dekade mendatang. Peningkatan jumlah penduduk ini membawa dampak yang luas, tidak hanya pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Oleh karena itu, pengelolaan populasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini dapat dikelola dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.

Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang terletak di antara

golongan kaya dan miskin, di mana kebutuhan hidup mereka dapat dipenuhi dengan baik, mencakup tidak hanya kebutuhan dasar namun juga kebutuhan tambahan. Berdasarkan definisi Bank Dunia, "kelas menengah" terdiri dari individu yang memiliki pengeluaran sekitar 3,5 hingga 17 kali lipat dari garis kemiskinan. Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050, dan pertumbuhan kelas menengah yang didorong oleh bonus demografi menjadi salah satu faktor kunci untuk mencapai target tersebut. Kelas menengah memainkan peran penting dalam perekonomian, tidak hanya melalui pola konsumsi mereka tetapi juga sebagai pengusaha yang aktif dan berkontribusi pada investasi dalam sumber daya manusia. Selain itu, mereka juga merupakan pilar utama penerimaan negara, terutama melalui pajak tidak langsung yang terkait dengan konsumsi mereka (Wicaksono et al. , 2020).

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kelas menengah Indonesia menghadapi tantangan serius, di mana banyak anggotanya mengalami penurunan status ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2019, sekitar 9,48 juta orang telah terdegradasi dari kelas menengah. Pada tahun 2024, jumlah kelas menengah diperkirakan turun menjadi 47,85 juta orang, berkurang dari 57,33 juta pada tahun 2019.



Sumber: BPS 2024

### Gambar 1. 6 Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia

Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tercatat sebanyak 47,85 juta orang, yang setara dengan 17,13% dari total populasi. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,87% dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 48,27 juta orang atau 17,44% dari total penduduk. Di sisi lain, jumlah penduduk yang berada dalam kelompok menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau 49,22% pada tahun 2024. Angka ini meningkat sebesar 0,42% dibandingkan tahun lalu, di mana jumlahnya adalah 136,92 juta orang atau 49,47% dari total populasi Indonesia. Secara umum, terlihat bahwa jumlah penduduk kelas menengah di tanah air mengalami penurunan yang konsisten sejak tahun 2019 hingga 2024. Sebaliknya, populasi yang tergolong menuju kelas menengah terus menunjukkan tren peningkatan yang stabil sejak tahun 2019.

Penurunan kelas menengah memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perekonomian. Salah satu dampak utama dari fenomena ini adalah berkurangnya

daya beli masyarakat. Kelas menengah, yang memiliki daya beli yang substansial, berperan penting dalam mendorong konsumsi domestik. Ketika pendapatan mereka menurun, hal ini akan menyebabkan pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan melemah, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada konsumsi.

Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan kelas menengah dan perkembangan ekonomi suatu negara. Pendidikan yang berkualitas meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Menurut [Todaro dan Smith (2015)], masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan yang layak dan berpenghasilan tinggi.

Di Indonesia, peningkatan akses dan kualitas pendidikan sangat penting dalam mendukung pengembangan kelas menengah. Ketika lebih banyak individu mendapatkan pendidikan yang memadai, mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam pasar tenaga kerja, menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, dan berkontribusi pada konsumsi domestik. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh [Brueckner et al. (2017)], yang menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih baik di kalangan populasi berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Pandemi COVID-19 menjadi penyebab utama, mengganggu berbagai sektor, terutama perdagangan internasional. Penurunan permintaan global memaksa perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja. Konsumsi

masyarakat, yang menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Namun, jika jumlah kelas menengah terus menurun, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Perdagangan menjadi sektor yang paling terdampak, terutama karena perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Akibatnya, China mulai mencari pasar baru, sehingga persaingan di sektor UMKM Indonesia semakin ketat. Penurunan daya beli masyarakat sudah mulai terlihat. Pada 2024, Indonesia mengalami deflasi selama empat bulan berturut-turut, dari Mei hingga Agustus. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan moneter dan fiskal yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga diharapkan lebih aktif mendorong masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja alih-alih hanya mencari pekerjaan.



Sumber: Sakernas, Data oleh BPS 2024

### Gambar 1. 7 Pertumbuhan Lapangan Kerja di Indonesia

Berdasarkan data Sakernas edisi Februari yang diproses oleh Divisi Riset *Bloomberg Technoz*, laju penambahan lapangan kerja di sektor formal dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Pada periode 2009-2014, yaitu masa pemerintahan Presiden SBY, sektor formal berhasil menyerap sekitar

15,62 juta pekerja. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi antara 2014-2019, penciptaan lapangan kerja hanya menyerap 8,55 juta pekerja, menjadikan total pekerja sektor formal sebanyak 56,03 juta orang. Yang lebih buruk lagi antara 2019-2024, penambahan lapangan kerja semakin menurun dengan hanya bertambah 2,01 juta pekerja baru, sehingga total pekerja sektor formal pada Februari 2024 mencapai 58,04 juta.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, tercipta sekitar 10,56 juta lapangan kerja sektor formal, lebih rendah dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan SBY yang berhasil menciptakan 19,07 juta lapangan kerja. Sektor formal, menurut definisi BPS, mencakup pegawai atau karyawan, serta pekerja mandiri yang mempekerjakan buruh dengan upah tetap, yang biasa disebut pengusaha. Pekerja yang tidak termasuk dalam kedua kategori ini masuk dalam sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa antara tahun 2019 hingga 2023, terjadi penurunan signifikan pada jumlah kelas menengah yang berprofesi di sektor formal, meskipun pada tahun 2024 angka tersebut meningkat sedikit. BPS menjelaskan bahwa mayoritas kelas menengah bekerja di sektor formal, sementara sisanya berada dalam sektor informal. Selama lima tahun terakhir, proporsi masyarakat kelas menengah yang bekerja di sektor formal turun dari 61,71% pada tahun 2019 menjadi 58,65% di tahun 2023. Namun, terdapat sedikit perbaikan di tahun 2024 dengan kenaikan menjadi 59,35%. Di sisi lain, kelas menengah yang bekerja di sektor informal juga mengalami penurunan, dari 61,71% pada 2019 menjadi 58,65% pada 2023, sebelum akhirnya meningkat lagi menjadi 59,36% pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kelompok kelas menengah paling banyak bekerja di sektor jasa, sebanyak

57,05%, diikuti oleh sektor industri sebesar 22,98%, dan sektor pertanian yang menyerap 19,97% tenaga kerja. Masalah lain yang dihadapi adalah bahwa penciptaan lapangan kerja akhir-akhir ini lebih banyak terjadi di sektor informal, yang umumnya memiliki produktivitas yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi penciptaan lapangan kerja ke depan untuk lebih difokuskan pada

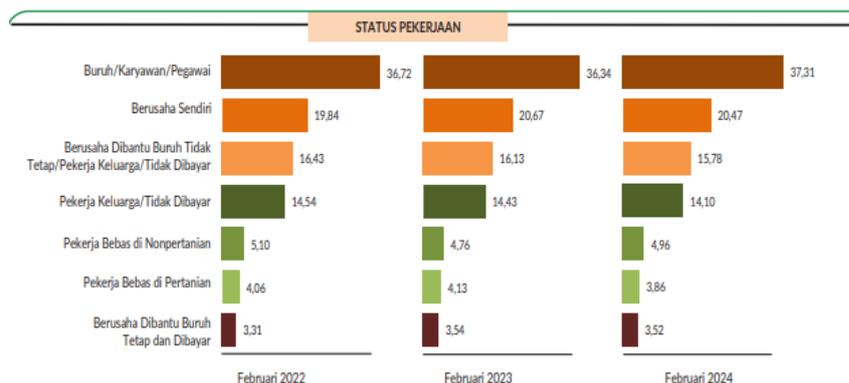


sektor formal, terutama dalam industri manufaktur.

*Sumber: Sakernas, Data oleh BPS 2024*

### **Gambar 1. 8 Perbandingan Pekerja Sektor Formal dan Informal di Indonesia**

Pandemi memang memperburuk kondisi penyediaan lapangan kerja di sektor formal. Namun, jika melihat data yang ada, tren penurunan jumlah lapangan kerja di sektor formal sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi. Keterbatasan lapangan kerja di sektor formal mendorong semakin banyak orang Indonesia terjun ke sektor informal. Menurut data BPS terbaru, persentase sektor informal kini mencapai 59,17%, meningkat dibandingkan 2019 yang hanya 57,22%. Banyak pekerja yang terdampak PHK dan angkatan kerja baru kesulitan memasuki pasar kerja karena terbatasnya lowongan pekerjaan.



Sumber: BPS 2024

**Gambar 1. 9 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan di Indonesia tahun 2024**

Pada Februari 2024, mayoritas penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, mencapai 37,31 persen. Di sisi lain jumlah penduduk yang berstatus sebagai pengusaha dibantu buruh tetap dan dibayar adalah yang paling sedikit, yakni sebesar 3,52 persen. Jika dilihat dari perbandingan dengan Februari 2023, status buruh, karyawan, dan pegawai serta pekerja lepas di sektor nonpertanian mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,97 persen poin dan 0,20 persen poin. Sementara itu, status pekerjaan lainnya mengalami penurunan, dengan penurunan terbesar terjadi pada kategori pengusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja keluarga, atau yang tidak dibayar, sebesar 0,35 persen. Mengacu pada status pekerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kegiatan formal dan informal.

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024	Perubahan Feb 2022-Feb 2023		Perubahan Feb 2023-Feb 2024	
	(juta orang)	(juta orang)	(juta orang)	(juta orang)	(%)	(juta orang)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	208,54	211,59	214,00	3,05	1,46	2,41	1,14
Angkatan Kerja	144,01	146,62	149,38	2,61	1,81	2,76	1,88
- Bekerja	135,61	138,63	142,18	3,02	2,23	3,55	2,56
- Pengangguran	8,40	7,99	7,20	-0,41	-4,88	-0,79	-9,89
Bukan Angkatan Kerja	64,53	64,97	64,62	0,44	0,68	-0,35	-0,54
	(%)	(%)	(%)	(persen poin)		(persen poin)	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,06	69,30	69,80	0,24		0,50	
- Laki-Laki	83,65	83,98	84,02	0,33		0,04	
- Perempuan	54,27	54,42	55,41	0,15		0,99	

*Sumber: BPS 2024*

Penduduk usia kerja (PUK) mencakup semua individu yang berusia 15 tahun ke atas. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, jumlah penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan. Pada Februari 2024, jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 214,00 juta orang, meningkat sebanyak 2,41 juta orang dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2023. Dari total **Gambar 1. 10 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Indonesia tahun 2024**

sementara 64,62 juta orang lainnya termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2024 terdiri dari 142,18 juta orang yang sudah bekerja dan 7,20 juta orang yang masih menganggur. Jika dibandingkan dengan Februari 2023, mengalami peningkatan sebanyak 2,76 juta orang dalam jumlah angkatan kerja, serta penambahan 3,55 juta orang dalam jumlah penduduk yang bekerja, sedangkan angka pengangguran mengalami penurunan sebanyak 0,79 juta orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menunjukkan kenaikan dibandingkan Februari 2023. Pada Februari 2024, TPAK mencapai 69,80 persen, meningkat sebesar 0,50 persen poin. TPAK adalah persentase angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja, yang mencerminkan besarnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. Berdasarkan jenis kelamin, pada Februari 2024, TPAK untuk laki-laki tercatat sebesar 84,02 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan yang hanya mencapai 55,41 persen. Dibandingkan dengan Februari 2023, TPAK untuk laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,04 persen poin dan 0,99 persen poin.

Kelas menengah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian

Indonesia, karena mereka berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui konsumsi domestik. Penurunan daya beli dan pengurangan jumlah kelas menengah dapat mengancam kelambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang pada akhirnya berisiko meningkatkan angka pengangguran terbuka. Dengan berkurangnya kelas menengah, proporsi pekerja di sektor formal juga mengalami penurunan, sementara sektor informal semakin mendominasi. Hal ini menciptakan situasi di mana banyak individu terperangkap dalam pekerjaan yang tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Lebih lanjut, kondisi ini membentuk siklus negatif di mana penurunan kelas menengah menyebabkan peningkatan pengangguran terbuka, dan tingginya angka pengangguran terbuka justru memperburuk kondisi kelas menengah. Sebagai akibatnya, banyak individu yang sebelumnya termasuk dalam kelas menengah terpaksa jatuh ke dalam kategori rentan atau miskin. Ini menunjukkan bahwa penurunan kelas menengah bukan hanya merupakan masalah sosial-ekonomi yang mendesak, tetapi juga merupakan ancaman bagi stabilitas ekonomi jangka panjang Indonesia.



*Sumber: BPS 2024*

### **Gambar 1. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2024**

Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Dampak dari hal ini adalah kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,23 persen pada Agustus 2019 menjadi 7,07 persen pada Agustus 2020. Namun, menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, TPT Indonesia telah turun menjadi 4,82 persen, lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Meskipun demikian, penurunan angka pengangguran ini tampaknya tidak serta merta memperbaiki kondisi kelas menengah, yang justru menghadapi fenomena "turun kelas".

Kelompok kelas menengah sering kali kurang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah cenderung memfokuskan bantuan kepada kelompok miskin melalui program seperti bantuan sosial dan subsidi. Sebaliknya, kelas menengah lebih sering menghadapi kebijakan yang memberatkan, seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penghapusan subsidi BBM, dan wacana dana pensiun. Meskipun demikian, kelas menengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama melalui konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data BPS tahun 2023, konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53,18 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dari jumlah tersebut, hampir 82 persen didukung oleh kontribusi Kelas Menengah dan Menuju Kelas Menengah. Selain menjadi kontributor utama dalam pengeluaran, kelas menengah juga merupakan tulang punggung utama pendapatan negara. Pada Januari 2024, Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa 77,6 persen pendapatan Indonesia pada tahun tersebut berasal dari penerimaan pajak, yang sebagian besar

dibayarkan oleh individu dengan pendapatan di atas batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54.000.000 per tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa daya beli kelas menengah, yang dikenal sebagai kelompok dengan pola belanja cepat dan besar, memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen secara year-on-year (yoy), angka ini menjadikannya pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2020. Meskipun tampak solid, pertumbuhan ini mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter-to-quarter). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 2,62 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,02 persen. Sektor-

**Gambar 1. 12 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024**



Sumber: BPS 2024

sektor utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan meliputi industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, dengan total kontribusi mencapai 63,61 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, di

tengah pencapaian yang positif ini, terdapat kekhawatiran akan penurunan tren konsumsi rumah tangga selama tahun politik yang bisa berdampak pada stabilitas ekonomi di masa mendatang.

Salah satu faktor penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif adalah peran kelas menengah (Tiwari et al., 2016; Chun et al., 2011). Kelas menengah dianggap sebagai kelompok yang berperan penting dalam mempromosikan kewirausahaan, berinvestasi dalam sumber daya manusia, serta mendukung nilai-nilai politik dan ekonomi yang progresif (Tiwari et al., 2016; Chun et al., 2011). Selain itu, kelas menengah berfungsi sebagai penyeimbang antara kecenderungan ekstraktif dari elit dan kecenderungan revolusioner dari kelompok miskin (Tiwari et al., 2016). Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa peran dan eksistensi kelas menengah di berbagai negara bersifat dinamis dan bervariasi (Lamsal, 2022; Tolera, 2023). Sebagai contoh, di beberapa negara, gerakan identitas telah mengaburkan gerakan kelas, tetapi juga berperan sebagai katalis bagi mobilitas kelas (Lamsal, 2022). Di negara lain, terdapat perbedaan signifikan dalam ukuran dan karakteristik kelas menengah antara daerah perkotaan dan pedesaan (Tolera, 2023). Kelas menengah juga menghadapi tantangan dalam hal mobilitas vertikal, dengan sebagian dari mereka berisiko jatuh kembali ke kemiskinan (Rasch, 2015).

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Pilar 1 yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar ini memiliki tiga sub-pilar. Sub-pilar yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, sub-pilar ini diukur

melalui tiga indikator yaitu, pertumbuhan PDRB Riil per kapita, *share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Sub-pilar yang kedua yaitu kesempatan kerja, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, tingkat kesempatan kerja, persentase tenaga kerja dengan jam kerja  $\geq 35$  jam/minggu, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

Kelas menengah memiliki peran yang signifikan dalam hal ini, baik sebagai penyedia pekerjaan maupun sebagai tenaga kerja yang terampil (Kuznetsova & Tupitsyn, 2014; Williams et al., 2017). Kelas menengah telah lama diakui sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai inovator dan agen perubahan sosial yang berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial. Di negara-negara berkembang, kelas menengah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, sering kali dihubungkan dengan liberalisasi ekonomi dan proses urbanisasi. Hal ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan melalui akumulasi modal manusia.

Namun, di Indonesia, jumlah penduduk kelas menengah mengalami penurunan drastis. Dari 57,33 juta orang pada tahun 2019, angkanya merosot hingga 47,85 juta orang pada tahun 2024. Penurunan ini dipicu oleh dampak pandemi COVID-19, penurunan daya beli masyarakat, serta ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Selain itu, terbatasnya lapangan kerja di sektor formal dan meningkatnya sektor informal yang minim perlindungan sosial menambah tantangan besar yang dihadapi oleh kelas menengah dikarenakan PHK.

Banyaknya permasalahan yang muncul di sektor formal Indonesia telah mengakibatkan hilangnya banyak lapangan pekerjaan. Hal ini berdampak langsung pada penurunan tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat, sehingga banyak anggota kelas menengah terpaksa "turun kelas" menjadi kelompok masyarakat yang lebih rentan. Jika situasi ini tidak segera ditangani hal ini akan menjadi peringatan serius bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dapat terhambat jika semakin banyak masyarakat kelas menengah yang mengalami penurunan, di mana daya beli mereka pun cenderung melemah.

Bedasarkan uraian pada latar belakang dan fakta yang ada disertai dengan data yang mendukung, terdapat permasalahan berupa penurunan *middle class* yang terjadi di Indonesia yang nantinya akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan laju perkembangan dari pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut. Maka untuk itu penelitian ini berjudul “ **Analisis Penduduk Kelas Menengah ( *Middle Class*)vs Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Terdapat penurunan signifikan dalam jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia, dari 57,33 juta pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta pada tahun 2024.
2. Pandemi telah memperburuk kondisi ekonomi, menyebabkan banyak

individu terdegradasi dari kelas menengah dan kehilangan pekerjaan.

3. Penurunan kelas menengah menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, yang berimplikasi pada penurunan konsumsi domestik dan pertumbuhan ekonomi.
4. Penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan sosial dan meningkatkan risiko ketidakstabilan politik dan sosial.
5. Terdapat pergeseran dari sektor formal ke informal, yang berpotensi mengurangi perlindungan sosial dan stabilitas pekerjaan bagi kelas menengah.
6. Generasi muda menghadapi kesulitan dalam mencapai status kelas menengah, akibat kondisi pasar kerja yang semakin tidak stabil dan kompetitif.

### **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah yang di ambil dalam penelitian ini adalah *middle class* dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia

### **1.4 Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan jumlah penduduk kelas menengah dan perkembangan indikator pilar pertama pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia?

2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia?
3. Faktor- Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi per provinsi di Indonesia tahun 2019-2023?

#### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang jumlah penduduk kelas menengah, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja.
2. Melakukan estimasi tentang pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Jumlah Pendidikan Yang Lulus D3-S1, Upah Minimum, Investasi, Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
3. Melakukan estimasi tentang pengaruh variabel Tingkat Kesempatan Kerja, Investasi, Nilai PDRB, Upah Minimum, Jumlah Angkatan Kerja, Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia tahun 2019-2023

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun dari hasil penelitian ini nantinya dapat diambil manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam analisis *middle class* dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi inklusif pilar pertama di Indonesia.

##### **1.5.1 Manfaat Akademik**

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi dalam untuk memperoleh Sarjana Ekonomi.

2. Penelitian ini akan menambah literatur mengenai kelas menengah, ekonomi, dan dinamika sosial di Indonesia, memberikan wawasan baru yang dapat digunakan dalam kajian akademik lebih lanjut.
3. Penelitian dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang kelas menengah, mobilitas sosial, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi.

### **1.5.2 Manfaat Non-Akademik**

1. Penelitian dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat kelas menengah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian dapat digunakan oleh lembaga-lembaga yang fokus pada pemberdayaan ekonomi untuk merancang program yang mendukung kelas menengah dan meningkatkan kesempatan kerja.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Pembangunan Ekonomi**

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Todaro, 2015).

Pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan pendapatan per kapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang (Sukirno, Pengantar Makro Ekonomi, 1994).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi danberkelanjutan adalah kondisi yang penting dan utama bagi kelangsungan Pembangunan ekonomi dan akhirnya peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah yang dibarengi kebutuhan konsumsi sehari-hari maka dibutuhkan peningkatan pendapatan setiap tahunnya (Rahayu, 2020).

Todaro mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

1. Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*).
2. Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan (*development economic*), merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisisnya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.

#### **2.1.1.1 Aliran Klasik**

##### **A. Adam Smith**

Hukum Alam, Adam Smith meyakini berlakunya hukum alam dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap bahwa setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang bebas mengejar kepentingannya demi keuntungan dirinya sendiri. Setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan kesejahteraan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith

pada dasarnya menentang campur tangan pemerintah dalam industri dan perniagaan.

Pembagian Kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia menghubungkan kenaikan itu dengan meningkatnya keterampilan kerja; penghematan waktu dalam memproduksi barang; penemuan mesin yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir bukan berasal dari tenaga kerja melainkan dari modal.

Proses Penumpukan Modal. Smith menekankan, penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. Dengan demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

Agen Pertumbuhan, menurutnya para petani, produsen, dan pengusaha, merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi ketiga agen tersebut saling berkaitan erat. Bagi Smith, pembangunan pertanian mendorong peningkatan pekerjaan konstruksi dan perniagaan. Pada waktu terjadi surplus pertanian sebagai akibat pembangunan ekonomi, maka permintaan akan jasa perniagaan dan barang pabrikan meningkat pula; ini semua akan membawa kemajuan perniagaan dan berdirinya industri manufaktur. Pada pihak lain, pembangunan sektor tersebut akan meningkatkan produksi pertanian apabila petani menggunakan teknologi yang canggih. Jadi pemupukan modal dan

pembangunan ekonomi terjadi karena tampilnya para petani, produsen, dan pengusaha.

Menurut Smith, proses pertumbuhan ini bersifat kumulatif (menggumpal). Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan, kemakmuran itu akan mengarah pada pemupukan modal, kemajuan teknik, meningkatnya produk, perluasan pasar, pembagian kerja, dan kenaikan secara terus-menerus. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan menyebabkan upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumber daya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan. Kelemahan teori Adam Smith:

- a. Pengabaian masyarakat secara luas.
- b. Alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung
- c. Pengabaian pengusaha (wiraswasta)

## **B. David Ricardo**

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada tiga golongan masyarakat yaitu golongan capital, golongan buruh, dan golongan tuan tanah. Golongan kapital adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Golongan buruh merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat, namun sangat tergantung pada capital. Golongan tuan tanah merupakan golongan yang memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan

bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya. Akibatnya berlaku pula hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Disamping itu juga ada persaingan diantara kapitaliskapitalis itu sendiri dalam mengolah tanah yang semakin kurang kesuburannya dan akibatnya keuntungan mereka semakin menurun hingga pada tingkat keuntungan yang normal saja.

### **C. Thomas Robert Malthus**

Malthus menitikkan perhatian pada “perkembangan kesejahteraan” suatu negara, yaitu pembangunan ekonomi yang dapat dicapai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan suatu negara sebagian bergantung pada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagian lagi pada nilai atas produk tersebut.

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi, Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya pembangunan ekonomi. Malahan, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Rendahnya konsumsi atau kurangnya permintaan efektif yang menimbulkan persediaan melimpah, menurut Teori Malthus merupakan sebab utama keterbelakangan. Untuk pembangunan, negara harus memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan

internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif, dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum.

#### **D. Karl Marx**

Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Kota Trier Jerman. Pemikiran Marx sangat dipengaruhi oleh Darwin dan menggunakan gagasan ini untuk menjelaskan proses dialektik sejarah. Menurut Marx, masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menenukan tahapantahapan tersebut adalah perubahan dalam sarana produksi dan hubunganhubungan produksi. Menurutny berdasarkan sejarah, perkembangan masyarakat melalui 5 tahap:

- a. Masyarakat kumunal primitive, yang masih menggunakan alat-alat produksi sederhana yang merupakan milik kumunal. Tidak ada surplus produksi di atas konsumsi.
- b. Masyarakat perbudakan, adanya hubungan antar pemilik faktor produksi dan orang-orang yang hanya bekerja untuk mereka. Para budak diberi upah sangat minim. Mulai ada spesialisasi untuk bidang pertanian, kerajinan tangan dan sebagainya. Karena murahny harga buruh maka minat pemilik faktor produksi untuk memperbaiki alat-alat yang dimilikinya rendah. Buruh makin lama sadar dengan kesewenang-wenangan yang dialaminya sehingga menimbulkan perselisihan antara dua kelompok tersebut.
- c. Masyarakat fiodal, kaum bangsawan memiliki faktor produksi utama

yaitu tanah. Para petani kebanyakan adalah budak yang dibebaskan dan mereka 42 mengerjakan dahulu tanah milik bangsawan. Hubungan ini mendorong adanya perbaikan alat produksi terutama di sektor pertanian. Kepentingan dua kelas tersebut berbeda, para feodal lebih memikirkan keuntungan saja dan kemudian mendirikan pabrik-pabrik. Banyak timbul pedagang-pedagang baru yang didukung raja yang kemudian membutuhkan pasar yang lebih luas. Perkembangan ini menyebabkan timbulnya alat produksi kapitalis dan menghendaki hapusnya sistem feodal. Kelas borjuis yang memiliki alat-alat produksi menghendaki pasaran buruh yang bebas dan hapusnya tarif serta rintangan lain dalam perdagangan yang diciptakan kaum feodal sehingga kemudian masyarakat tidak lagi menyukai system ini.

- d. Masyarakat kapitalis, hubungan produksinya didasarkan pada kepemilikan individu masing-masing kapitalis terhadap alat-alat produksi. Kelas kapitalis mempekerjakan buruh. Keuntungan kapitalis membesar yang memungkinkan berkembangnya alat-alat produksi. Perubahan alat yang mengubah cara produksi selanjutnya menyebabkan perubahan kehidupan ekonomi masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kaum kapitalis dan buruh semakin meningkat dan mengakibatkan perjuangan kelas
- e. Masyarakat sosialis, kepemilikan alat produksi didasarkan atas hak milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu diantara buruh yang bebas unsur eksploitasi. Tidak ada lagi kelas-kelas dalam masyarakat.

Menurut Karl Marx masyarakat menempuh tahapan-tahapan yang berbeda dalam sejarah dan yang menentukan tahap-tahap tersebut adalah perubahan 43 dalam sarana produksi dan juga hubungan-hubungan produksi yang telah dijelaskan di atas, namun sejarah telah membuktikan bahwa periode evolusi yang dikemukakan oleh Marx ternyata keliru. Tidak ada masa dalam sejarah masyarakat yang melalui tahapan evolusi sebagaimana yang dikemukakan Marx. Sebaliknya sebagaimana system yang diyakini oleh Marx terjadi melalui serangkaian tahapan tertentu, malah dapat terjadi dalam waktu bersamaan dan dalam masyarakat yang sama pula di saat satu wilayah dari suatu Negara sedang mengalami system yang menyerupai masyarakat fiodal, system kapitalis berlaku di wilayah lainnya dalam Negara yang sama. Jadi pernyataan bahwa tahapan dari satu system ke system berikutnya mengikuti pola evolusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Marx dan teori evolusi tidak dapat dibuktikan sama sekali.

### **2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Mankiw (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki masyarakat.

Todaro (2003) mengatakan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, akumulasi modal yang meliputi semua bentuk dan jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnya

dengan sendirinya membawa pertumbuhan angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi.

Selanjutnya ditambahkan oleh Mankiw (2003) indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan ekonomi menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) bukan indikator lainnya di antaranya adalah bahwa PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, hal ini berarti peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor-faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.

Menurut Tarigan (2005) dalam konteks ekonomi regional, ukuran yang sering dipergunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sedangkan pendapatan per kapita adalah total pendapatan wilayah/daerah tersebut dibagi dengan jumlah penduduknya untuk tahun yang sama.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Todaro, 1998).

Empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan

ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru (Samuelson dan Nordhaus, 2001).

Beberapa teori pertumbuhan ekonomi, masing-masing teori mengemukakan faktor-faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan, sebagai berikut:

### **1. Teori Pertumbuhan Solow dan Swan**

Teori pertumbuhan neo-klasik dikembangkan oleh Solow dan Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi (eksogen), dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah masuknya unsur kemajuan teknologi. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas meningkat. Dalam model Solow-Swan, masalah teknologi dianggap fungsi dari waktu.

Teori Solow-Swan menilai bahwa dalam banyak hal mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga pemerintah tidak perlu terlalu banyak mempengaruhi atau mencampuri pasar. Campur tangan pemerintah hanya sebatas kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Mankiw (2006) Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah dikenal, yang menyatakan bahwa output bergantung

pada persediaan modal dan angkatan kerja.

$$Y = F(K, L)$$

Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi melalui skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan (*constant returns to scale*). Asumsi ini sering dianggap realistis, seperti akan kita lihat berikut ini, asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Ingatlah bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan jika

$$zY = F(zK, zL)$$

Dengan  $z$  bernilai positif. Jika kita mengalikan modal dan tenaga kerja dengan  $z$ , kita juga mengalikan jumlah output dengan  $z$ . Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Untuk melihat kebenarannya, gunakan  $z = 1/L$  dalam persamaan di atas untuk mendapatkan

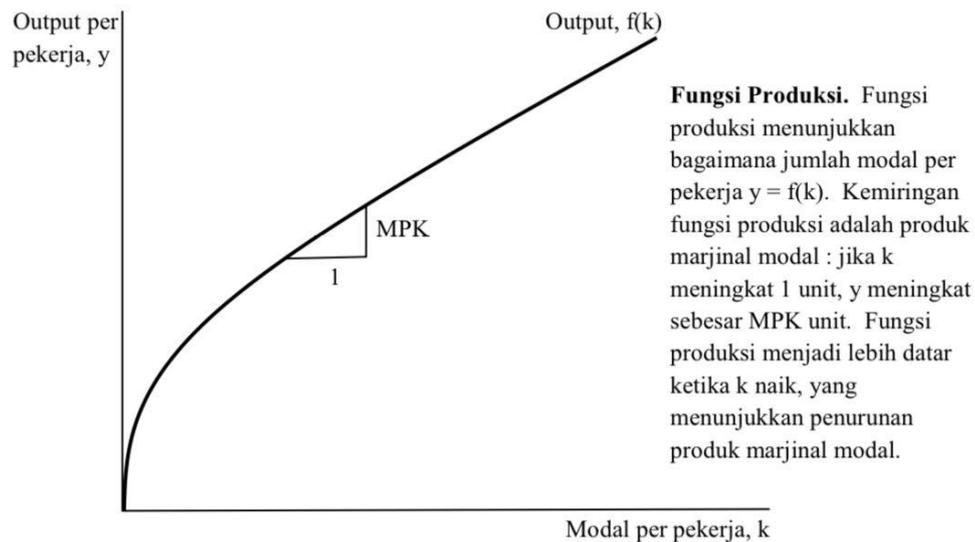
$$Y/L = F(K/L, 1).$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah output per pekerja  $Y/L$  adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja  $K/L$ . (Angka “1” adalah, tentu saja, konstan sehingga bisa dihilangkan asumsi skala pengembalian konstan menunjukkan bahwa besarnya perekonomian sebagaimana diukur oleh jumlah pekerja tidak mempengaruhi hubungan antara output per pekerja dan modal per pekerja.

Karena besarnya perekonomian tidak menjadi masalah, maka cukup beralasan untuk menyatakan seluruh variabel dalam istilah per pekerja. Kita nyatakan hal ini dengan huruf kecil, sehingga  $y = Y/L$  adalah output per pekerja, dan  $k = K/L$  adalah modal per pekerja selanjutnya kita bisa menulis fungsi produksi sebagai :

$$y = f(k),$$

Dimana kita definisikan  $f(k) = F(k,1)$ . Gambar 2.1 menunjukkan fungsi produksi ini, Ketika jumlah modal meningkat, kurva fungsi produksi menjadi lebih datar, yang mengindikasikan bahwa fungsi produksi mencerminkan produk



modal yang kian menurun. Ketika  $k$  rendah, rata-rata pekerja hanya memiliki sedikit modal untuk bekerja, sehingga satu unit modal tambahan begitu berguna dan dapat memproduksi banyak output tambahan. Ketika  $k$  tinggi, rata-rata pekerja memiliki banyak modal, sehingga satu unit modal tambahan hanya sedikit meningkatkan produksi. Fungsi produksi menunjukkan bagaimana jumlah modal per pekerja  $k$  menentukan jumlah output per pekerja  $y = f(k)$ . Kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal : jika  $k$  meningkat 1 unit,  $y$  meningkat sebesar MPK unit. Fungsi produksi menjadi lebih datar ketika  $k$  naik, yang menunjukkan penurunan produk marginal modal.

### Gambar 2. 1 Fungsi Produksi

Kemiringan dari fungsi produksi ini menunjukkan berapa banyaknya

output tambahan yang dihasilkan seorang pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan. Angka yang diperoleh merupakan produk marginal modal MPK. Secara matematis, dapat ditulis

$$MPK = f(k + 1) - f(k)$$

Permintaan terhadap barang dalam model Solow berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per pekerja  $y$  merupakan konsumsi per pekerja  $c$  dan investasi per pekerja  $i$  :

$$y = c + i$$

Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian  $s$  dari pendapatan mereka dan mengkonsumsi sebagian  $(1-s)$ . Dengan fungsi konsumsi sederhana :

$$c = (1 - s)y,$$

Dimana  $s$ , tingkat tabungan, adalah angka antara nol dan satu. Perlu diingat bahwa berbagai kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Namun, sekarang kita asumsikan tingkat bunga  $s$  sudah baku. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan  $(1-s)y$  untuk  $c$  dalam identitas perhitungan pendapatan nasional :

$$y = (1 - s)y + i.$$

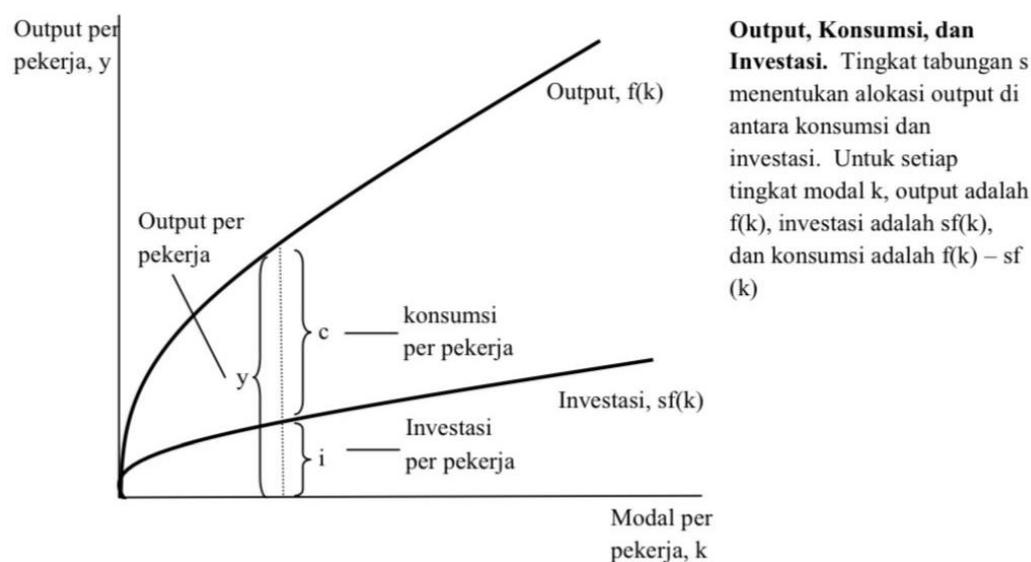
Dan kita ubah lagi menjadi

$$i = sy.$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa investasi sama dengan tabungan, tingkat tabungan  $s$  juga merupakan bagian dari output yang menunjukkan investasi. Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang

penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya, terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal: investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk peluasan usaha dan peralatan baru, dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal, dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, investasi per pekerja  $i$  sama dengan



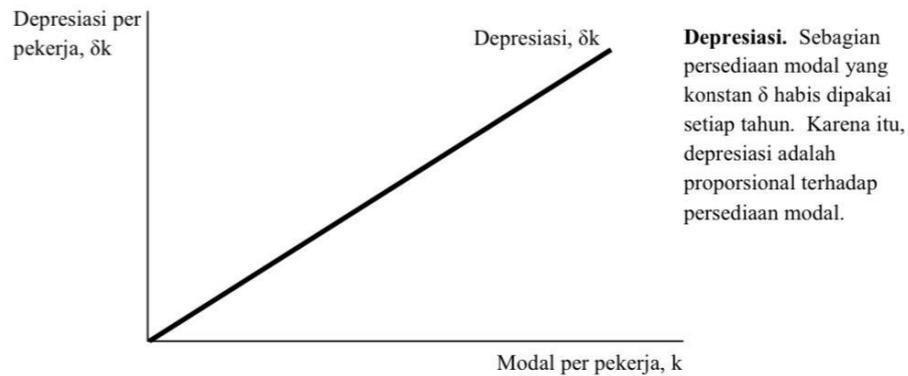
$sy$ . Dengan mengganti fungsi produksi untuk  $y$ , kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja :

$$i = sf(k).$$

Persamaan ini mengaitkan persediaan modal yang telah ada  $k$  dengan akumulasi modal baru  $i$ . Gambar 2.2 menunjukkan hubungan ini, gambar ini menunjukkan bagaimana untuk setiap nilai  $k$ , jumlah output ditentukan oleh fungsi produksi  $f(k)$ , dan alokasi output itu di antara konsumsi dan tabungan ditentukan oleh tingkat tabungan  $s$ . Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal  $\delta$  menyusut setiap

tahun. Di sini  $\delta$  disebut tingkat depresiasi.

**Gambar 2. 2 Output, Konsumsi dan Investasi**



**Gambar 2. 3 Depresiasi**

Kita bisa nyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal dalam persamaan ini :

Perubahan persediaan modal = Investasi - Depresiasi

$$\Delta k = i - \delta k$$

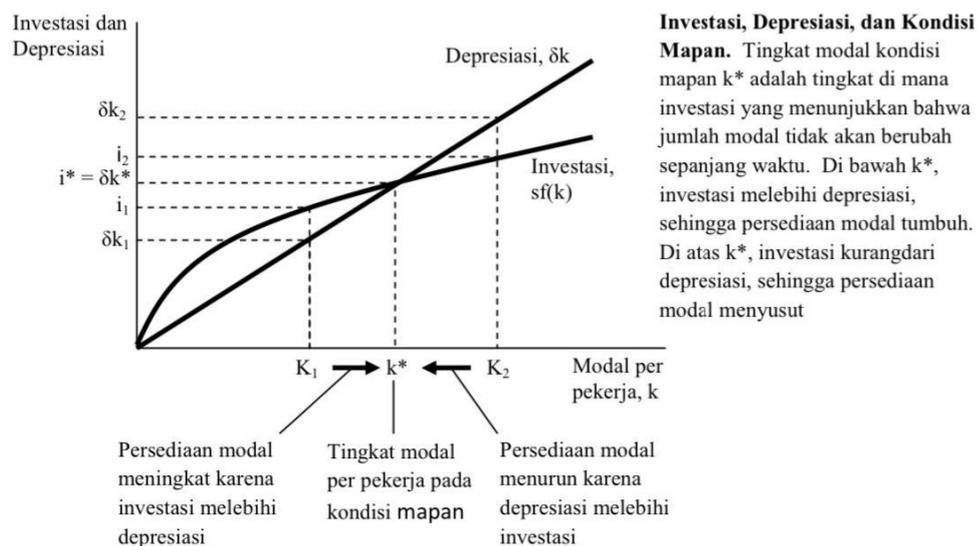
Dimana  $\Delta k$  adalah perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu dan tahun berikutnya. Karena investasi  $i$  sama dengan  $sf(k)$ , kita bisa menuliskannya sebagai,

$$\Delta k = sf(k) - \delta k$$

Gambar 2.3 memperlihatkan komponen dari persamaan ini investasi dan depresiasi untuk tingkat persediaan modal  $k$  yang berbeda. Semakin tinggi persediaan modal, semakin besar jumlah output dan investasi. Namun semakin tinggi persediaan modal, semakin besar pula jumlah depresiasinya. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 2.3, ada persediaan modal  $k^*$  di mana jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi. Jika perekonomian berada dalam tingkat

persediaan modal ini, maka persediaan modal tidak akan berubah karena dua kekuatan investasi dan depresiasi beraksi di dalamnya secara seimbang. Yaitu, pada  $k^*$ ,  $\Delta k = 0$ , sehingga persediaan modal  $k$  dan output  $f(k)$  dalam kondisi mapan sepanjang waktu (tidak tumbuh atau menyusut). Karena itu, kita menyebutnya  $k^*$  sebagai tingkat modal pada kondisi mapan (*steady-state level of capital*).

Kondisi mapan signifikan karena dua alasan. Seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, yang juga penting, perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan berusaha menuju kesana. Yaitu, tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian, perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian, perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan (*steady-state*) menunjukkan ekuilibrium perekonomian jangka panjang.



**Gambar 2. 4 Investasi, Depresiasi, dan Kondisi Mapan**

Untuk melihat mengapa perekonomian selalu berakhir pada kondisi

mapan, anggaplah bahwa perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan, seperti tingkat  $k_1$  dalam gambar 2.4. Dalam hal ini, tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi. Sepanjang waktu, persediaan modal akan naik dan akan terus naik — bersamaan dengan output  $f(k)$  — sampai mendekati kondisi mapan  $k^*$ .

Demikian pula, anggaplah bahwa perekonomian dimulai dengan tingkat modal yang lebih besar dari tingkat modal kondisi mapan, yaitu tingkat  $k_2$ . Dalam hal ini, investasi lebih kecil daripada depresiasi : modal akan habis dipakai lebih cepat ketimbang pengantiannya. Persediaan modal akan turun, yang sekali lagi mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi, dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal untuk naik atau turun.

Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas. Nilai kondisi mapan  $k$  yang memaksimalkan konsumsi disebut tingkat modal kaidah emas dan dinyatakan  $k^*_{emas}$ . Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa suatu perekonomian berada pada tingkat kaidah emas? untuk menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus menentukan konsumsi per pekerja pada kondisi mapan. Lalu kita bisa melihat kondisi mapan mana yang memberikan konsumsi paling besar.

Untuk mencari konsumsi per pekerja pada kondisi mapan, kita mulai dengan identitas perhitungan pendapatan nasional :

$$y = c + i$$

dan mengubahnya menjadi :

$$c = y - i$$

Konsumsi adalah output dikurangi investasi. Karena kita ingin mencari konsumsi

pada kondisi mapan, maka kita ganti nilai kondisi mapan untuk output dan investasi. Output per pekerja pada kondisi mapan adalah  $f(k^*)$ , di mana  $k^*$  adalah persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan. Selanjutnya, karena persediaan modal tidak berubah dalam kondisi mapan, maka investasi sama dengan penyusutan  $\delta k^*$ . Dengan mengganti  $f(k^*)$  untuk  $y$  dan  $\delta k^*$  untuk  $i$ , kita bisa menulis konsumsi per pekerja pada kondisi mapan sebagai berikut :

$$c^* = f(k^*) - \delta k^*.$$

Persamaan ini menunjukkan bahwa kenaikan modal pada kondisi mapan memiliki dua dampak yang berlawanan terhadap konsumsi pada kondisi mapan. Di satu sisi, lebih banyak modal berarti lebih banyak output. Di sisi lain, lebih banyak modal juga berarti bahwa lebih banyak output yang harus digunakan untuk mengganti modal yang habis dipakai. Ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah di bawah tingkat Kaidah Emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat Kaidah Emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi.

Sekarang kita bisa menetapkan kondisi sederhana yang mencirikan tingkat modal Kaidah Emas. Bahwa kemiringan fungsi produksi adalah produk marginal modal MPK. kemiringan garis  $\delta k^*$  adalah  $\delta$ . Karena kedua kemiringan ini sama pada  $k^*_{emas}$ , maka Kaidah Emas dijelaskan dengan persamaan

$$MPK = \delta$$

Pada tingkat modal Kaidah Emas, produk marginal modal sama dengan tingkat

depresiasi.

Bagaimana pertumbuhan populasi mempengaruhi kondisi mapan, kita harus membahas bagaimana pertumbuhan populasi, bersama – sama dengan investasi dan depresiasi, mempengaruhi akumulasi modal per pekerja. Kita akan menggunakan huruf kecil untuk jumlah per pekerja. Jadi,  $k = K/L$  adalah modal per pekerja, dan  $y = Y/L$  adalah output per pekerja. Akan tetapi harus diingat bahwa jumlah pekerja terus tumbuh sepanjang waktu. Perubahan persediaan modal per pekerja adalah :

$$\Delta k = i - (\delta + n)k.$$

Persamaan ini menunjukkan bagaimana investasi, depresiasi, dan pertumbuhan populasi mempengaruhi persediaan modal per pekerja. Investasi meningkatkan  $k$  sedangkan depresiasi dan pertumbuhan populasi mengurangi  $k$ . Dan di asumsikan populasi konstan ( $n = 0$ ).

Analisis kita tentang pertumbuhan populasi sekarang lebih banyak memberi hasil ketimbang sebelumnya. Pertama, kita ganti  $sf(k)$  untuk  $i$ . Persamaan ini kemudian bisa kita tulis berikut :

$$\Delta k = sf(k) - (\delta + n)k.$$

Dalam kondisi mapan, dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Yaitu, pada  $k^*$ ,  $\Delta k = 0$ , dan  $i^* = \delta k^* + nk^*$ . Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu ( $\delta k^*$ ) akan mengganti modal yang terdepresiasi dan sisanya ( $nk^*$ ) memberi modal untuk para pekerja baru. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal Kaidah Emas

(memaksimalkan konsumsi). Untuk melihat bagaimana kriteria ini berubah, ingatlah bahwa konsumsi per pekerja adalah :

$$c = y - i$$

Karena output pada kondisi mapan adalah  $f(k^*)$  dan investasi pada kondisi mapan adalah  $(\delta + n)k^*$ , maka kita dapat menulis persamaan konsumsi pada kondisi mapan sebagai :

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n)k^*$$

Dapat kita simpulkan bahwa tingkat  $k^*$  yang memaksimalkan konsumsi adalah

$$MPK = \delta + n$$

atau sama dengan,

$$MPK - \delta = n$$

Dalam kondisi mapan Kaidah Emas, produk marginal modal setelah terdepresiasi sama dengan tingkat pertumbuhan populasi.

Model Solow juga menjelaskan kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi sepanjang waktu. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, kita kembali ke fungsi produksi yang mengaitkan modal total  $K$  dan tenaga kerja total  $L$  dengan output total  $Y$ . Jadi, fungsi produksi itu adalah :

$$Y = F(K, L)$$

Kini kita tulis fungsi produksi sebagai :

$$Y = F(K, L \times E)$$

Di mana  $E$  adalah variabel baru (dan abstrak) yang disebut efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode-metode produksi: ketika teknologi mengalami kemajuan, efisiensi tenaga

kerja meningkat. Efisiensi tenaga kerja juga meningkat ketika ada pengembangan dalam kesehatan, pendidikan, atau keahlian angkatan kerja.  $L \times E$  mengukur para pekerja efektif. Perkalian ini memperhitungkan jumlah pekerja  $L$  dan efisiensi masing-masing pekerja  $E$ . Fungsi produksi yang baru menyatakan bahwa output total  $Y$  bergantung pada jumlah unit modal  $K$  dan jumlah per pekerja efektif,  $L \times E$ .

Asumsi yang paling sederhana tentang kemajuan teknologi adalah bahwa kemajuan teknologi menyebabkan efisiensi tenaga kerja  $E$  tumbuh pada tingkat konstan  $g$ . Bentuk kemajuan teknologi disebut **pengoptimalan tenaga kerja**, dan  $g$  disebut **tingkat kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja** (*Labor-augmenting technological progress*). Karena angkatan kerja  $L$  tumbuh pada tingkat  $n$ , dan efisiensi dari setiap unit tenaga kerja  $E$  tumbuh pada tingkat  $g$ , maka jumlah pekerja efektif  $L \times E$  tumbuh pada tingkat  $n + g$ .

Karena kemajuan teknologi yang dimodelkan di sini menambah efisiensi tenaga kerja, maka hal itu memiliki pengaruh yang sama terhadap populasi. Meskipun kemajuan teknologi tidak menyebabkan jumlah pekerja actual meningkat. Namun sebenarnya, setiap pekerja menghasilkan unit yang lebih banyak sepanjang waktu. Jadi kemajuan teknologi menyebabkan jumlah pekerja efektif meningkat. Untuk melakukan hal ini, kita perlu mempertimbangkan kembali notasi kita, kita nyatakan  $k = K/(L \times E)$  menunjukkan modal per pekerja efektif, dan  $y = Y/(L \times E)$  menunjukkan output per pekerja efektif.

Dengan definisi ini kita bisa menulis kembali  $y = f(k)$ .

Persamaan yang menunjukkan evolusi  $k$  sepanjang waktu sekarang berubah menjadi :

$$\Delta k = sf(k) - (\delta + n + g)k.$$

Perubahan persediaan modal  $\Delta k$  sama dengan investasi  $sf(k)$  dikurangi investasi pulang pokok  $(\delta + n + g)k$ . Namun, karena  $k = K/(L \times E)$ , maka investasi pulang pokok meliputi tiga kaidah : untuk menjaga  $k$  tetap konstan,  $\delta k$  dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi,  $nk$  dibutuhkan untuk memberi modal bagi para pekerja baru, dan  $gk$  dibutuhkan untuk memberi modal bagi “para pekerja efektif” baru yang diciptakan oleh teknologi.

Kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal Kaidah Emas kini didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Dengan mengikuti argumen yang sama yang kita gunakan sebelumnya, kita bisa menunjukkan bahwa konsumsi per pekerja efektif pada kondisi mapan adalah :

$$c^* = f(k^*) - (\delta + n + g)^*.$$

konsumsi pada kondisi mapan dimaksimalkan jika

$$MPK = \delta + n + g,$$

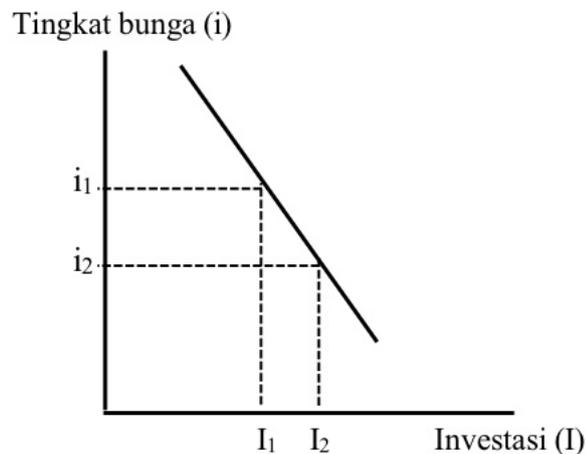
atau

$$MPK - \delta = n + g.$$

Yaitu, pada tingkat modal Kaidah Emas, Produk marjinal neto,  $MPK - \delta$ , sama dengan tingkat pertumbuhan output total,  $n + g$ . Karena perekonomian aktual mengalami pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, maka kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah hal itu memiliki modal yang lebih besar atau lebih kecil dari kondisi mapan Kaidah Emas.

Dengan demikian, dalam kondisi mapan dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan,

investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu akan mengganti modal yang terdepresiasi, dan sisanya memberi modal untuk para pekerja baru.



Model ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal kondisi mapan perekonomian dan tingkat pendapatan perkapita pada kondisi mapan. Dapat kita lihat mengapa negara-negara yang menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara-negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output, dan mengapa negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara-negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang rendah. Untungnya, para ekonom cukup banyak mengetahui tentang kekuatan-kekuatan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara.

### **Gambar 2. 5 Kurva Permintaan Investasi**

Fungsi investasi Keynes berslope negatif, artinya semakin rendah tingkat suku

bunga maka investasi semakin besar. Akan tetapi mengingat sekecil apapun suku bunga, bila investasi yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang lebih kecil dari suku bunga tersebut, maka investasi tetap saja rendah atau terbatas.

## 2. Teori Pertumbuhan Harrod Domar

Kedua ekonom ini menekankan pentingnya peranan investasi (I). Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan mempunyai pengaruh terhadap penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi (I) dapat diartikan sebagai tambahan stok kapital (D K), Jadi  $I = DK$ .

Sukirno (1996) Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut : (1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) Rasio modal-produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya, dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Syarat untuk mencapai pertumbuhan teguh, dalam analisisnya teori Harrod Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada satu tahun tertentu (misalnya tahun 1994) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 1994 yaitu  $AE = C + I$ , akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (tahun 1995). Dengan perkataan lain, investasi yang berlaku dalam tahun 1994 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa pada tahun 1995.

Adapun syarat yang perlu dipenuhi agar kapasitas barang modal yang bertambah itu akan sepenuhnya digunakan. Artinya: apakah syaratnya agar pada

tahun berikutnya (tahun 1995) barang-barang modal mencapai kapasitas penuh kembali?. Dua hal yang perlu diketahui untuk memecahkan persoalan ini.

Pertama, berapakah besarnya penambahan kapasitas barang modal pada tahun 1995? Karena teori Harrod-Domar menganggap rasio modal-produksi tetap, teori tersebut mengatakan penambahan kapasitas barang modal tergantung kepada dua faktor, yaitu rasio modal-produksi itu sendiri (misalkan ia bernilai  $COR$ ) dan investasi yang dilakukan pada tahun 1994 (misalkan ia bernilai  $I$ ). Pertambahan kapasitas barang modal ( $\Delta c$ ) dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\Delta c = \frac{1}{COR}$$

Kedua, keadaan yang bagaimanakah yang akan mengakibatkan penambahan pendapatan nasional ( $\Delta Y$ ) sama dengan penambahan kapasitas barang modal ( $\Delta c$ )?. Teori Harrod-Domar adalah perluasan dari analisis Keynes. Dengan demikian teori itu berpendapat bahwa kapasitas penuh pada tahun berikut akan tercapai apabila pengeluaran agregat bertambah dengan cukup besar sehingga tercapai keadaan :

$$\Delta c = \Delta Y$$

Teori Keynes telah menerangkan, apabila ada penambahan pengeluaran agregat (misalnya  $\Delta I$ ) maka pendapatan nasional akan bertambah. Besarnya penambahan pendapatan nasional tergantung kepada besarnya multiplier, dan penambahan pendapatan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$$

sekarang telah diperoleh tiga persamaan yaitu :

- i.  $\Delta c = \frac{1}{COR}$

$$\text{ii. } \Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$$

$$\text{iii. } \Delta c = \Delta Y$$

Dengan demikian:  $\frac{1}{COR} = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$  atau  $\frac{\Delta I}{I} = \frac{MPS}{COR}$  persamaan ini berarti tingkat kenaikan investasi ( $\Delta I/I$ ) adalah sama dengan  $MPS/COR$ . Apabila dimisalkan  $COR = 4$  dan  $MPS = 0,20$ , maka:  $\frac{\Delta I}{I} = \frac{0,20}{4} = 0,05$ .

Perhitungan di atas menunjukkan bahwa investasi tahun berikutnya (1995) harus bertambah sebanyak 5 persen kalau dibandingkan tahun sebelumnya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Dengan demikian, dalam analisis Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh dalam jangka panjang.

Dengan menggunakan pemisalan dan analisis di atas teori Harrod-Domar dapat pula menerangkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai suatu negara yang terus menerus mencapai kapasitas penuh dalam penggunaan barang-barang modalnya. Pemisalan bahwa tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional dapat diringkaskan menjadi persamaan.

$$S = MPS \times Y$$

Dalam perekonomian dua sektor keseimbangan dicapai apabila  $S = I$ . Maka pada keseimbangan berlaku keadaan berikut.

$$I = MPS \times Y \text{ atau } Y = \frac{1}{MPS}$$

analisis terdahulu telah menunjukkan bahwa  $\Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$  dengan demikian tingkat pertumbuhan ekonomi dapat ditentukan dengan menyelesaikan persamaan berikut :

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\frac{1}{MPS} \Delta I}{\frac{1}{MPS} I} \text{ atau } \frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta I}{I}$$

Kesamaan di atas berarti pertumbuhan ekonomi sama tingkatnya dengan pertambahan investasi. Dalam persamaan  $\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{MPS}{COR}$  dalam contoh di mana  $MPS = 0,20$  dan  $COR = 4$ , tingkat pertumbuhan ekonomi adalah:  $0,20/4 = 5$  persen.

### 3. Teori Pertumbuhan Endogen

Mankiw (2006) Teori pertumbuhan endogen yaitu teori yang menolak asumsi model Solow tentang perubahan teknologi yang berasal dari luar (eksogen). Kita mulai dengan fungsi produksi sederhana ;

$$Y = AK,$$

Di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap unit modal. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun merupakan perbedaan penting antara model pertumbuhan endogen dan pertumbuhan Solow.

Bagaimana fungsi produksi berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, diasumsikan bahwa sebagian pendapatan ditabung dan diinvestasikan. Karena itu kita jelaskan akumulasi modal dengan persamaan yang telah kita gunakan sebelumnya.

$$\Delta K = sY - \delta K$$

Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal ( $\Delta K$ ) sama dengan investasi ( $sY$ ) dikurangi depresiasi ( $\delta K$ ). Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi  $Y = AK$ , kita dapatkan :

$$\Delta Y/Y = \Delta K/K = sA - \delta$$

Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan

output  $\Delta Y/Y$ , lihatlah selama  $s_A > \delta$ , pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen.

Jadi, perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa mengubah secara dramatis prediksi tentang pertumbuhan ekonomi. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan untuk sementara, tetapi pengembalian modal yang kian menurun pada akhirnya akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan.

Namun, penganut teori pertumbuhan endogen berpendapat bahwa asumsi pengembalian modal konstan (bukan yang kian menurun) lebih bermanfaat jika  $K$  diasumsikan secara lebih luas. Barangkali kasus terbaik untuk model pertumbuhan endogen adalah memandang ilmu pengetahuan sebagai sejenis modal.

### **2.1.3 Pendapatan Nasional**

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk

Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. (BPS, 2012).

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah ( baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut).

Angka PDRB sangat diperlukan dan perlu disajikan, karena selain dapat dipakai sebagai bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

### **2.1.3.1 Metode Perhitungan Pendapatan Nasional**

#### **1. Metode Langsung**

##### 1) Pendekatan Produksi

Dengan pendekatan Produksi (production approach) produk nasional atau produk domestik bruto diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian.

Dengan demikian, GNP atau GDP menurut pendekatan produksi ini adalah penjumlahan dari masing-masing barang dan jasa dengan jumlah atau kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, hal ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Nasional Q1, Q2, Q3, dan Qn = jumlah jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n P1, P2, P3, dan Pn = harga jenis barang ke-1, ke-2, ke-3, ke-n 2)

##### 2) Pendekatan Pendapatan.

Pendekatan pendapatan (income approach) adalah suatu pendekatan dimana pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan

dari berbagai faktor produksi yang menyumbang terhadap proses produksi. Dalam hubungan ini pendapatan nasional adalah penjumlahan dari unsur-unsur atau jenis-jenis pendapatan.

- a. Kompensasi untuk pekerja (compensation for employees), yang terdiri dari upah (wages) dan gaji (salaries) ditambah faktor rent terhadap upah dan gaji (misalnya kontribusi pengusaha untuk rencana-rencana pensiun dan dana jaminan sosial), dan ini merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional.
- b. Keuntungan perusahaan (corporate profit), yang merupakan kompensasi kepada pemilik perusahaan yang mana sebagian dari padanya digunakan untuk membayar pajak keuntungan perusahaan (corporate profit taxes), sebagian lagi dibagikan kepada para pemilik saham (stockholders) sebagai deviden, dan sebagian lagi ditabung perusahaan sebagai laba perusahaan yang tidak dibagikan.
- c. Pendapatan usaha perorangan (proprietors income), yang merupakan kompensasi atas penggunaan tenaga kerja dan sumber-sumber dari self employed person, misalnya petani, self employed profesional, dan lain-lain. dengan perkataan lain proprietors income merupakan pendapatan new korporasi.
- d. Pendapatan sewa (rental income of person), yang merupakan kompensasi untuk pemilik tanah, rental business dan residential properties, termasuk didalamnya pendapatan sewa dari mereka yang tidak terikat dalam bisnis real estate : pendapatan sewa dihitung untuk rumah-rumah yang non form yang dihuni oleh

pemiliknya sendiri; dan royalties yang diterima oleh orang dari hak paten, hak cipta, dan hak terhadap sumber daya alam.

- e. Bunga netto (net interest) terdiri atas bunga yang dibayar perusahaan dikurangi oleh bunga yang diterima oleh perusahaan ditambah bunga netto yang diterima dari luar negeri. Bunga yang dibayar oleh pemerintah dan yang dibayar oleh konsumen tidak termasuk didalamnya.

Secara matematis pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{NI = Yw + Yi + Ynr + Ynd}$$

Dimana:

$Yw$  = Pendapatan dari upah, gaji dan pendapatan lainnya sebelum pajak

$Yr$  = Pendapatan dari bunga

$Ynr$  dan  $Ynd$  = Pendapatan dari keuntungan dari perusahaan dan pendapatan lainnya sebelum pendapatan lainnya sebelum pengenaan pajak.

### 3) Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan pendapatan nasional atau produk domestik regional bruto diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari seluruh permintaan akhir (final demand) atas output yang dihasilkan dalam perekonomian, diukur pada harga pasar yang berlaku. Dengan perkataan lain produk nasional atau produk domestik regional bruto adalah penjumlahan nilai pasar dari permintaan sektor rumah tangga untuk barang-barang konsumsi dan jasa- jasa (C), permintaan sektor bisnis barang-barang investasi (I), pengeluaran pemerintah untuk barang-barang dan jasa-jasa (G), dan pengeluaran sektor luar

negeri untuk kegiatan ekspor dan impor (X-M).

## **2. Metode Tidak Langsung**

Menghitung nilai tambah suatu kelompok ekonomi dengan mengalokasikan nilai tambah kedalam masing-masing kelompok kegiatan ekonomi pada tingkat regional sebagai alokator digunakan yang paling besar tergantung atau erat kaitannya dengan produktifitas kegiatan ekonomi tersebut melalui PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan regional suatu provinsi dapat diukur untuk menghitung kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Kenaikan ini dapat disebabkan karena dua faktor yaitu:

- a. Kenaikan pendapatan yang benar-benar bisa menaikkan daya beli penduduk (kenaikan riil).
- b. Kenaikan pendapatan yang disebabkan oleh karena inflasi, kenaikan pendapatan yang disebabkan karena kenaikan harga pasar tidak menaikkan daya beli penduduk dan kenaikan seperti ini merupakan kenaikan pendapatan yang tidak riil. Oleh karena itu berdasarkan kenyataan diatas untuk mengetahui kenaikan pendapatan yang sebenarnya (riil) maka faktor yang harus dieliminir pendapatan regional dengan faktor inflasi (faktor inflasi belum dihilangkan) merupakan pendapatan regional dengan harga berlaku, sedangkan pendapatan regional dimana faktor inflasi tidak lagi diperhitungkan disebut dengan pendapatan regional atas dasar harga konstan.

### **2.1.4 Ketenagakerjaan**

Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Indonesia, Badan Pusat Statistik pada tahun sekitar 1970-an menentukan batas usia kerja bila seseorang berumur 10 tahun atau lebih. Semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja) batas usia kerja dirubah menjadi 15 tahun atau lebih, ini dilaksanakan karena dianjurkan oleh International Labour Organization (ILO).

Menurut Sumarsono (2003), dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja perilaku penduduk dipisahkan menjadi 2 golongan, yaitu golongan aktif secara ekonomis dan bukan. Angkatan kerja termasuk golongan aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya (unemployed). Beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum (Nainggolan, 2009).

a. Tenaga Kerja (manpower) atau penduduk usia kerja (UK)

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

b. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat, atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi

barang dan jasa, maka yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja yang masuk kategori bekerja apabila minimum bekerja selama 1 jam selama seminggu lalu untuk kegiatan produktif sebelum pencacahan dilakukan. Mencari pekerjaan adalah seseorang yang kegiatan utamanya sedang mencari pekerjaan, atau sementara sedang mencari pekerjaan dan belum bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu. Jadi angkatan kerja dapat diformulasikan melalui persamaan identitas sebagai berikut :

$$AK = K + MP.$$

Penjumlahan angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai pekerja atau tenaga kerja termasuk ke dalam sisi permintaan (*labour demand*).

#### c. Bukan Angkatan Kerja (*unlabour force*)

Bukan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia (15 tahun ke atas), namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah, maka individu tersebut tetap termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka yang tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk ke dalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak dalam kategori bukan angkatan kerja (BAK). Jadi jumlah usia kerja (UK) apabila dilihat melalui persamaan identitas

adalah sebagai berikut :

$$UK = AK + BAK$$

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labour force participation rate*)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$TPAK = \frac{AK}{UK} \times 100\%$$

e. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran (TP) dapat dirumus sebagai berikut :

$$TP = \frac{MP}{AK} \times 100\%$$

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah.

Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah (Nainggolan, 2009). Pada ekonomi klasik bahwa penyediaan atau penawaran tenaga kerja akan meningkat ketika upah naik,

sebaliknya permintaan tenaga kerja akan berkurang ketika upah turun.

### **2.1.5 Kesempatan Kerja**

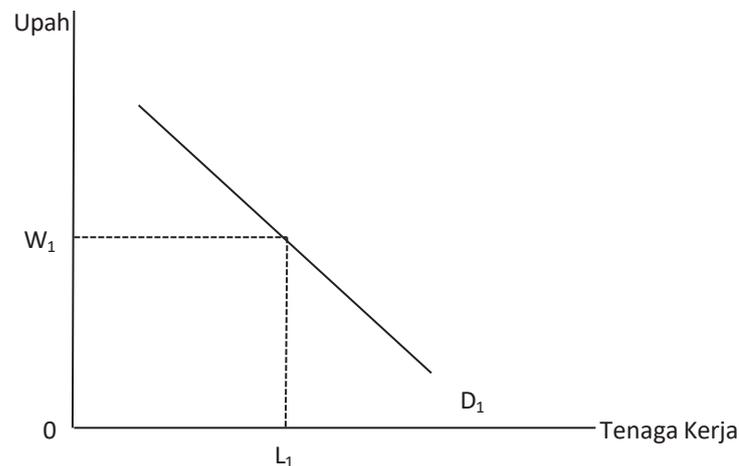
Pembangunan ekonomi setiap negara membutuhkan sumber daya. Salah satu sumber daya yang diperlukan adalah manusia. Sumber daya manusia berperan penting dalam proses pembangunan, karena sumber daya manusia merupakan penggerak faktor-faktor produksi. Kesempatan kerja berhubungan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, maka definisi dari kesempatan kerja adalah mencakup lapangan pekerjaan yang sudah di isi dan semua lapangan pekerjaan yang masih terbuka. Lapangan pekerjaan yang yang terbuka menimbulkan kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi perusahaan tersebut pada tingkat upah, posisi (jabatan), dan syarat kerja tertentu. Data kesempatan sulit diperoleh, maka yang digunakan adalah besarnya jumlah orang yang bekerja pada daerah tertentu.

Tingginya kesempatan kerja di suatu daerah akan berpengaruh pada pembangunan ekonominya, dengan demikian jumlah penduduk indonesia yang cukup besar akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonominya. Kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berupa proses produksi.

#### **2.1.5.1 Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk di perkerjakan

(Arfida, 2003). Suatu kurva permintaan tenaga kerja menggambarkan jumlah maksimum tenaga kerja yang suatu perusahaan bersedia untuk memperkerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Kurva permintaan tenaga kerja dapat dilihat sebagai gambaran bagi setiap kemungkinan jumlah tenaga kerja dengan tingkat upah maksimum di mana pihak perusahaan bersedia untuk memperkerjakan. Gambar 2.1 menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja, di mana  $W$  menunjukkan upah dan  $L$  menunjukkan tenaga kerja.



**Gambar 2. 6 Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja adalah peningkatan jumlah hasil produksi dari satu unit tenaga kerja (Mankiw, 2006). Penambahan jumlah tenaga kerja akan menurunkan produk marginal tenaga kerja, dengan asumsi perusahaan berada pada pasar persaingan sempurna (tingkat harga adalah konstan). Semakin banyak pekerja yang dipakai maka kontribusi setiap pekerja tambahan semakin sedikit

tingkat produktifitasnya, perilaku ini disebut penurunan produk marginal (*diminishing marginal product*).

Pada permintaan tenaga kerja, tingkat upah dilihat dari nilai produk marginal. Nilai produk marginal adalah produk marginal dari suatu input dikalikan dengan harga hasil produksi di pasar, maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut :

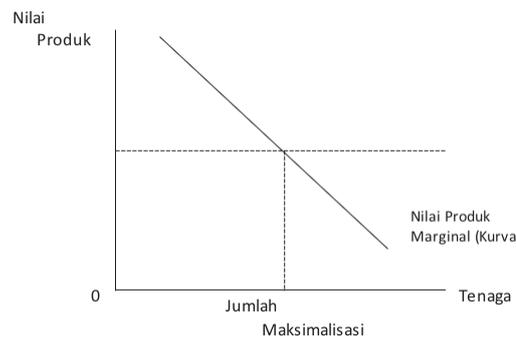
$$VMP_L(\text{Upah}) = MP_L \times P$$

di mana :  $VMP_L$  = Nilai produk marginal

$MP_L$  = Marginal produk tenaga kerja

$P$  = Harga produk.

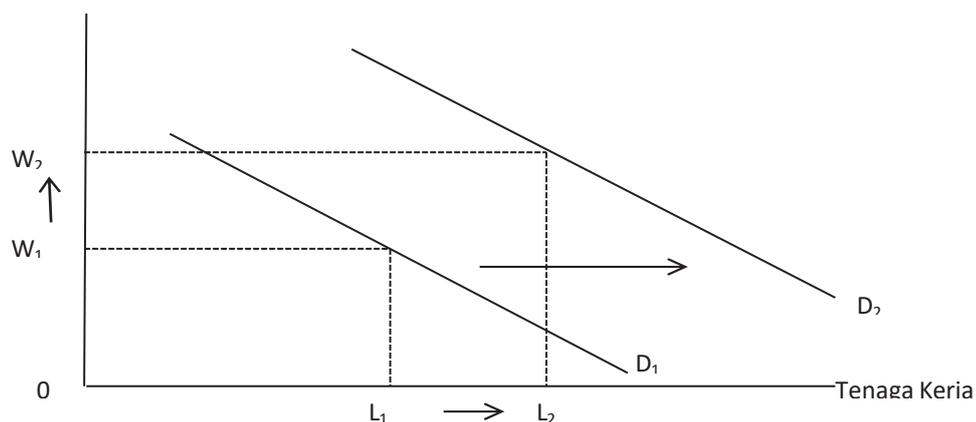
Harga pasar pada perusahaan kompetitif adalah tetap, maka nilai produk produk marginal menurun ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Gambar 2.6 menggambar tentang grafik nilai produk marginal. Kurva tersebut tersebut menurun karena produk marginal tenaga kerja berkurang ketika jumlah tenaga kerja meningkat. Pada gambar 2.6 terdapat garis horizontal yang menunjukkan upah. Untuk memaksimalkan keuntungannya, perusahaan akan terus menambah tenaga kerja hingga mencapai titik di mana kedua kurva berpotongan. Di bawah tingkat ini nilai produk marginal lebih besar dari upah, sehingga menambah tenaga kerja akan meningkatkan keuntungan, sedangkan di atas tingkat ini nilai produk marginal lebih kecil dari upah, sehingga menambah tenaga kerja akan tidak akan menguntungkan. Kesimpulannya, suatu perusahaan kompetitif akan menambah tenaga kerja hingga titik dimana nilai produk marginal tenaga kerja sama udengan upah.



**Gambar 2. 7 Kurva Nilai Produk Marginal**

Mankiw (2006), ada beberapa hal yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser : (I) harga hasil produksi, (ii) perubahan teknologi dan (iii) penawaran factor factor produksi lainnya.

Permintaan yang banyak akan suatu produk menyebabkan harga produk tersebut naik. Peningkatan harga ini tidak akan mengubah produk marginal tenaga kerja untuk jumlah tenaga kerja berapa pun, namun meningkatkan nilai produk marginalnya. Dengan harga produk yang tinggi, menambah tenaga kerja merupakan hal yang menguntungkan.



**Gambar 2. 8 Pergeseran Kurva Permintaan Tenaga Kerja**

Gambar 2.8 di atas menjelaskan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja, ketika permintaan tenaga kerja bergeser ke kanan dari  $D_1$  ke  $D_2$ , upah meningkat

dari  $W_1$  ke  $W_2$ , dan jumlah tenaga kerja meningkat dari  $L_1$  ke  $L_2$ . Pergeseran kurva tersebut menjelaskan bahwa upah, dan nilai produk tenaga kerja bergeser bersama sama. Begitu pula sebaliknya, ketika harga produk menurun, maka kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke kiri.

Menurut Sumarsono (2003), permintaan tenaga kerja dipengaruhi :

1. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan terjadi hal hal berikut :

- a. Naiknya tingkat upah akan meningkatkan biaya produksi perusahaan, yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit barang yang diproduksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak lagi mau membeli barang yang bersangkutan. Akibatnya banyak produksi barang yang tidak terjual, dan terpaksa produsen menurunkan jumlah produksinya. Turunnya target produksi, mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.

Apabila upah naik (asumsi harga dari barang modal lainya tidak berubah), maka pengusaha ada yang lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan kebutuhan akan tenaga kerja dengan kebutuhan akan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut dengan efek substitusi tenaga

kerja atau *substitution effect*.

2. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja :

- a. Naik turunnya permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan hasil produksi perusahaan meningkat, maka produsen cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Untuk maksud tersebut produsen akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

Apabila harga barang-barang modal turun, maka biaya produksi akan turun dan tentunya mengakibatkan pula harga jual perunit barang akan turun. Pada keadaan ini produsen cenderung untuk meningkatkan produksi barangnya karena permintaan bertambah banyak. Disamping itu permintaan tenaga kerja dapat bertambah besar karena peningkatan kegiatan perusahaan. Keadaan ini menyebabkan bergesernya kurva permintaan tenaga kerja ke arah kanan. Pergeseran ini karena pengaruh skala produksi atau *scale effect*. Efek selanjutnya akan terjadi bila harga barang-barang modal turun adalah efek substitusi. Keadaan ini dapat terjadi karena produsen cenderung untuk menambah jumlah barang modal (mesin) sehingga terjadi kapital intensif dalam proses produksi. Jadi secara relatif penggunaan tenaga kerjanya akan berkurang.

### **2.1.6 Upah**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang. Seseorang bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan upah. Upah ini akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian upah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Bab I Pasal 30 Ayat 1 adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja, atau peraturan

perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang akan dilakukan.

Pemberian upah tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah yang diberikan tergantung (Sulistiawati, 2012) :

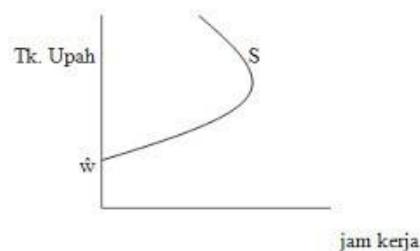
- a. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
- b. Peraturan Undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja
- c. Produktivitas marginal tenaga kerja
- d. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
- e. Perbedaan jenis pekerjaan.

Upah yang diterima oleh pekerja dapat dibedakan menjadi dua (BPS) :

- a. Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan
- b. Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan kepada tiga fungsi upah (Sumarsono, 2003) :

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang



c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktifitas tenaga kerja.

### **Gambar 2. 9 Kurva Penawaran Tenaga Kerja Melengkung ke Belakang**

Pada penawaran tenaga kerja dikenal istilah upah reservasi. Upah reservasi adalah tingkat upah terendah di mana seseorang tetap ingin bekerja atau tingkat upah tertinggi di mana seseorang masih tetap menganggur. Penawaran tenaga kerja dapat diwakili oleh karakteristik upah reservasi (reservation wage). Tingkat upah di bawah upah reservasi tidak akan mengubah perilaku, sedangkan bila tingkat upah berada di atas upah reservasi barulah seseorang memutuskan untuk bekerja.

Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Dapat dicontohkan: seseorang tertarik memasuki pasar kerja, jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi. Pada tingkat upah diatas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Keadaan selanjutnya akan berubah jika seseorang kesejahteraannya sudah baik atau mempunyai suatu keahlian yang lebih dan jumlah jam kerja yang ditawarkan semakin berkurang, maka pada saat upah meningkat dapat mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Kurva ini disebut kurva penawaran tenaga kerja melengkung ke belakang (backward bending labour supply curve).

## **2.1.7 Pembangunan Ekonomi Inklusif**

### **2.1.7.1 Definisi Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Menurut *World Economic Forum (WEF)* ekonomi inklusif merupakan

upaya dalam rangka peningkatan kinerja perekonomian dengan cara memberikan akses yang luas kepada masyarakat, dalam rangka untuk menciptakan kemakmuran ekonomi. Namun, definisi menurut *World Economic Forum* ini tidak dengan mudah dapat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam hal budaya dan kondisi sosial, serta faktor seperti disparitas yang ada di Indonesia.

Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang berkualitas, yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan (*pro-growth*), penyerapan energi kerja (*pro-job*), mengurangi kemiskinan (*pro-poor*) dan memperhatikan lingkungan (*pro-environment*) (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan). Kemudian mulai tahun 2011 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di tingkat nasional. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, diharapkan dapat digunakan untuk mengeluarkan kebijakan terkait pembangunan yang lebih merata. Menurut Bappenas, pembangunan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang secara adil dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh golongan masyarakat, serta dapat mengurangi ketimpangan yang ada di antara kelompok maupun wilayah.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur pembangunan yang tidak hanya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi saja, akan tetapi juga melalui aspek sosial ekonomi lain, sesuai yang termuat dalam 21 indikator yang telah ditetapkan dan diharapkan dapat mendorong pembangunan menjadi lebih inklusif.

#### **2.1.7.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Alat ukur untuk mengetahui seberapa besar pembangunan ekonomi

inklusif dikenal dengan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Dibawah ini dapat dilihat pada gambar 2.3 pilar dan sub-pilar pembangunan ekonomi inklusif secara lengkap.



Sumber: The SMERU Research Institute, 2023

### Gambar 2. 10 Pilar dan Sub-Pilar Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pilar 1 yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, pilar ini memiliki tiga sub-pilar. Sub-pilar yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, pertumbuhan PDRB Riil per kapita, *share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB nominal. Sub-pilar yang kedua yaitu kesempatan kerja, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, tingkat kesempatan kerja, persentase tenaga kerja dengan jam kerja  $\geq 35$  jam/minggu, dan persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan

menengah ke atas. Sub-pilar yang ketiga adalah infrastruktur ekonomi, sub-pilar ini diukur melalui tiga indikator yaitu, persentase rumah tangga menggunakan listrik/PLN, persentase penduduk memiliki telepon genggam, dan rasio jalan mantap terhadap luas wilayah.

Pilar 2 yang merupakan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, pilar ini memiliki dua sub-pilar. Sub-pilar yang pertama adalah ketimpangan, sub-pilar ini memiliki tiga indikator yaitu, rasio gini, sumbangan pendapatan perempuan, dan rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota. Sub-pilar yang kedua adalah kemiskinan, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, persentase penduduk miskin dan rata-rata konsumsi protein per kapita per hari.

Pilar 3 yang merupakan perluasan akses dan kesempatan, pilar ini memiliki tiga sub-pilar. Sub-pilar yang pertama adalah kapabilitas manusia, sub-pilar ini memiliki tiga indikator yaitu, harapan lama sekolah, persentase balita yang mendapatkan imunisasi dasar, dan persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Sub-pilar yang kedua adalah infrastruktur dasar, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak dan persentase rumah tangga dengan fasilitas BAB sendiri. Sub-pilar yang ketiga adalah keuangan inklusif, sub-pilar ini memiliki dua indikator yaitu, rasio jumlah dana pihak ketiga.

### **2.1.8 Definisi Kelas Menengah**

Merunut sejarahnya, pandangan klasik tentang stratifikasi kelas di masyarakat telah dimulai sejak abad ke-19 melalui teori Thorstein Veblen dan Karl Marx. Veblen dalam teori Kelas Kenyamanan atau Leisure Class membagi

masyarakat dalam dua kelas, yaitu kelas pekerja yang berjuang mempertahankan hidup dan kelas yang banyak mempunyai waktu luang karena kekayaannya.

Sementara Karl Marx membedakan kelas masyarakat berdasarkan atas kontrol produksi, yaitu kelas bourgeoisie, petty bourgeoisie, dan proletarian. Kaum bourgeoisie adalah kaum yang tidak memerlukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan karena memiliki kontrol terhadap kepemilikan kapital atau faktor produksi. Kaum ini juga memiliki kekuatan melakukan eksploitasi terhadap pekerja untuk mendapatkan penghasilan.

Pandangan mengenai pembagian kelas di masyarakat kemudian berkembang di sejumlah negara, tergantung pada penekanannya terhadap kriteria politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Tren kelas menengah ini dimulai dari negara maju di Eropa dan Amerika, kemudian bergerak ke kawasan timur, termasuk Asia Tenggara.

Adapun definisi kelas menengah dapat ditentukan dengan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah dengan pendekatan absolut. Pendekatan ini mendefinisikan kelas menengah didasarkan pada jumlah pendapatan atau pengeluaran rumah tangga.

Salah satunya dikemukakan oleh Kharas dan Geoffrey Gertz (2010) yang mendefinisikan kelas menengah adalah penduduk dengan pengeluaran harian antara 10 dollar AS hingga 100 dollar AS per orang dalam purchasing power parity terms atau paritas daya beli. Paritas daya beli adalah ukuran harga barang tertentu di sejumlah negara dan digunakan untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara bersangkutan.

Penduduk dengan pengeluaran harian antara 10 dollar AS hingga 100

dollar AS per orang dalam purchasing power parity terms atau paritas daya beli. Paritas daya beli adalah ukuran harga barang tertentu di sejumlah negara dan digunakan untuk membandingkan daya beli absolut mata uang negara berangkutan.

Abhijit V Banerjee dan Esther Duflo (2007) mengukur kelas menengah bawah dengan pengeluaran harian antara 2 dollar AS hingga 4 dollar AS per orang dan kelas menengah atas antara 6 dollar AS hingga 10 per dollar AS orang di negara berkembang.

Sementara itu, Sarah Boumphrey dan Eileen Bevis (2013) dalam bukunya *Reaching The Emerging Middle Classes Beyond Bric*, dengan menggunakan pendekatan pendapatan, mendefinisikan kelas menengah dalam beberapa definisi antara lain rumah tangga dengan penghasilan 50 persen hingga 100 persen dari rata-rata pendapatan kotor agregat, rumah tangga dengan pendapatan untuk konsumsi minimal 10.000 dollar AS per tahun (untuk negara maju), atau discretionary income lebih dari 30 persen.

Selain pendekatan pengeluaran dan pendapatan, pandangan berbeda dikemukakan oleh Simon Gunn (1993 dan 1997). Ia menyatakan, karakteristik kelas menengah tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekonomi, tetapi juga pada karakteristik politik dan demokrasi.

Gunn menyimpulkan, Brunei Darussalam termasuk dalam underdeveloped civil society karena dicirikan dengan rendahnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Pandangan ini mengindikasikan bahwa walaupun secara ekonomi penduduk Brunei termasuk sejahtera, tidak digolongkan dalam kelas menengah.

## 2.2 Regulasi

Dalam rangka mencapai visi "Indonesia Maju 2045", Pemerintah Indonesia mengimplementasikan empat pilar utama: pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional serta tata kelola pemerintahan. **Kelas menengah** diharapkan menjadi kunci dalam mendukung pembangunan negara, terutama melalui penciptaan lapangan kerja yang dapat menggerakkan perekonomian. Untuk itu, produktivitas angkatan kerja menjadi fokus utama, dengan peluncuran program "Making Indonesia 4.0" pada tahun 2018 yang menekankan digitalisasi di berbagai sektor. Nilai ekonomi digital Indonesia meningkat dari US\$40 miliar pada 2019 menjadi US\$44 miliar pada 2020, dan diproyeksikan mencapai US\$124 miliar pada 2025, menjadikannya sebagai salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Dalam menghadapi tantangan pasca-pandemi Covid-19, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dengan membangun infrastruktur teknologi, termasuk jaringan 5G untuk meningkatkan konektivitas. Selain itu, **Undang-Undang No. 11 Tahun 2020** tentang Cipta Kerja menjadi langkah strategis dalam menciptakan struktur ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan, dengan penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Upaya pemerintah juga mencakup program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Kartu Prakerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar tenaga kerja. Dalam jangka menengah, fokus kebijakan akan diarahkan pada pengembangan ekonomi hijau,

biru, dan digital untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**

Undang-Undang Penanaman Modal bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait investasi, termasuk insentif pajak, perlindungan hak-hak investor, serta prosedur perizinan yang lebih sederhana. Dengan mengedepankan transparansi dan kepastian hukum, undang-undang ini berperan penting dalam mendorong aliran investasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional. Namun, tantangan tetap ada dalam hal implementasi dan pengawasan, yang diperlukan untuk memastikan bahwa investasi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan lingkungan.

### **2.3 Peneliti Terdahulu**

**Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Muhammad Afdi Nizar	Kelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinya bagi Perekonomian Indonesia	Middle Class, Pengeluaran Konsumsi Nasional, dan Pertumbuhan Ekonomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas menengah, didefinisikan sebagai kelompok yang mengeluarkan konsumsi antara \$2 hingga \$20 per kapita per hari, memiliki potensi signifikan dalam pembangunan ekonomi. Kelas menengah berperan sebagai pengusaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong permintaan barang berkualitas tinggi. Dari 1999 hingga 2009, jumlah kelas menengah di

				<p>Indonesia meningkat dari 51,9 juta menjadi 99 juta orang, dengan pertumbuhan rata-rata 6,67% per tahun. Konsumsi kelas menengah pada 2009 diperkirakan mencapai Rp284,33 triliun hingga Rp2.843,28 triliun, berkontribusi sebesar 5,26% hingga 52,56% dari PDB. Antara 2010 hingga 2025, konsumsi kelas menengah diperkirakan menyumbang rata-rata 2,37% per tahun terhadap konsumsi riil rumah tangga dan 1,39% terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah kelas menengah juga berpotensi menurunkan tingkat pengangguran melalui peningkatan angkatan kerja yang aktif.</p>
2.	NITA CHAIRUNNISA	PERBEDAAN PERSEPSI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DENGAN KELAS BAWAH TERHADAP PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI EKONOMI DAN INVESTASI SOSIAL	Persepsi Masyarakat Kelas Menengah, Persepsi Masyarakat Kelas Bawah, Tingkat Pendidikan, Penghasilan	<p>Hasil penelitian adalah analisis data diperoleh perbedaan dengan persentase 3,21% dan <math>t_{hitung} &gt; t_{tabel} &gt; 2,002</math> dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi masyarakat kelas menengah dengan kelas bawah terhadap pendidikan sebagai investasi ekonomi dan investasi sosial (Studi di Masyarakat Kelurahan Kamal Kalideres Jakarta Barat)</p>
3.	Agus Purwanto	<i>PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI KELAS MENENGAH TERHADAP</i>	Pertumbuhan Ekonomi Kelas Menengah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Perkembangan E-	<p>Hasil Penelitiannya adalah dengan semakin meningkatnya kelas menengah yang</p>

		<i>PERKEMBANGAN E-COMMERCE DI ASEAN</i>	Commerce, Peluang dan Tantangan.	memanfaatkan teknologi untuk kegiatan bisnis dalam jaringan, maka akan semakin berkembang e-commerce di ASEAN yang ditandai dengan penggunaan elektronik payment atau metode pembayaran cashless dimana proses transaksi bisnis menjadi lebih efisien dan menstimulasi munculnya startup-startup baru lainnya.
4.	HENDRI, NOVENDRI	<i>ANAK-ANAK PUTUS SEKOLAH DARI KELUARGA KELAS MENENGAH PADA MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG (Studi Kasus Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatra Barat)</i>	keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan teman sepermainan, dan lingkungan sekolah, kelas menengah	Hasil Penelitiannya adalah dalam kehidupan bagi seseorang tidaklah sama, karena ada yang menilai peningkatan taraf hidup seseorang hanya bisa diperoleh dari pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan. Namun, dalam penelitian ini diketahui ukuran keberhasilan bukan pendidikan formal. Karenanya anak-anak yang putus sekolah dari keluarga kelas menengah di kecamatan Padang Panjang Barat lebih banyak diarahkan orang tua untuk menggeluti usaha berdagang dan secara tidak langsung merupakan penyelenggaraan pendidikan non formal bagi anak-anak mereka dalam mempersiapkan diri untuk menjalani hidup di masa nantinya, yaitu dengan jalan belajar membuka usaha atau berdagang.

5.	Gabriela Dona Insani Panggabean, Wahyu Budi Nugroho, Gede Kamajaya	PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DI KECAMATAN CURUG TANGERANG PADA MASA PANDEMI COVID-19	Perilaku Kelas Dampak Covid-19, Pembayaran, Konsumsi Menengah, Pandemi Metode	Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 berdampak pada perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah di Kecamatan Curug, Tangerang. Dengan menggunakan teori Leisure Class oleh Thorstein Veblen, ditemukan bahwa perilaku konsumsi cenderung berlebihan dan memamerkan kemewahan, meskipun pendapatan menurun. Masyarakat tetap memenuhi naluri konsumsi melalui produk budaya dengan metode pembayaran seperti kartu kredit dan aplikasi belanja online. Selain itu, kegiatan meluangkan waktu seperti hobi dan rekreasi juga menjadi sarana untuk menyalurkan naluri konsumsi selama pandemi.
6.	Achmad, Al Chofid Ibnu	Kebermaknaan hidup pada individu kelas menengah: Studi fenomenologi pada warga Karangrejo Surabaya	pemenuhan kebutuhan hidup seseorang, subjek dapat menemukan tujuan hidupnya dan berusaha untuk mencapainya.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek masuk dalam strata menengah karena dapat dilihat dari segi kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pendidikan yang telah diraihinya hingga saat ini. Sedangkan kedua subjek menemukan makna hidupnya ketika ada sesuatu yang dianggapnya penting bagi dirinya untuk diperjuangkan. Sesuatu yang dianggapnya penting dapat diketahui dengan cara melihat komponen personal,

				komponen sosial, dan komponen nilai dalam diri kedua subjek.
7.	KHOLIS DANA PRABOWO, Wahyu Kustiningsih, M.A.	RISIKO PADA MASYARAKAT KELAS MENENGAH DI KOMUNITAS BERPAGAR TANGERANG SELATAN <i>ONLINE</i> ILLEGAL.	penghuni komunitas berpagar gaya kelas menengah	Hasil penelitian menemukan bahwa masyarakat kelas menengah yang tinggal di komunitas berpagar menghadapi berbagai risiko, seperti konsumsi tanda dan simbol, ketergantungan pada teknologi, kesesatan informasi periklanan, konflik dengan warga sekitar, dan beban iuran perumahan yang tinggi. Masyarakat memahami risiko ini sebagai konsekuensi dari pilihan untuk tinggal di komunitas tersebut, yang seringkali menyulitkan mereka secara sosial dan ekonomi.

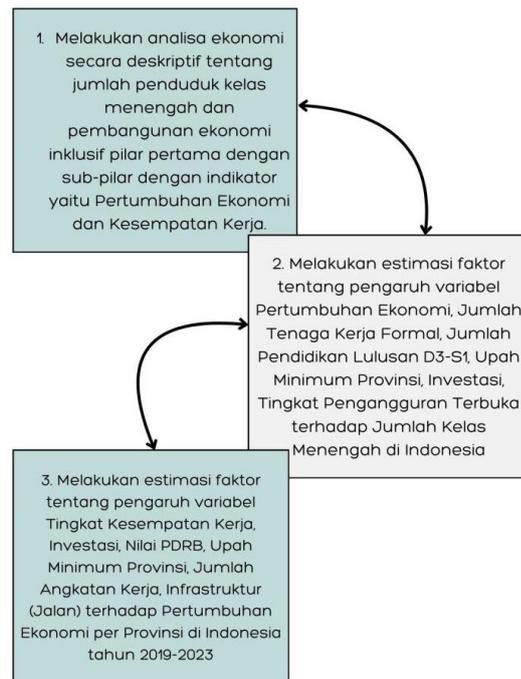
## 2.4 Kerangka Penelitian

### 2.4.1 Tahap Penelitian

Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang jumlah penduduk kelas menengah dan Pembangunan ekonomi inklusif pilar 1 di Indonesia. Beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi jumlah penduduk kelas menengah

di Indonesia yaitu, Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan Jumlah Pengangguran.

## 2.4.2 Kerangka Analisis Penelitian



**Gambar 2. 11 Kerangka Analisis Penelitian**

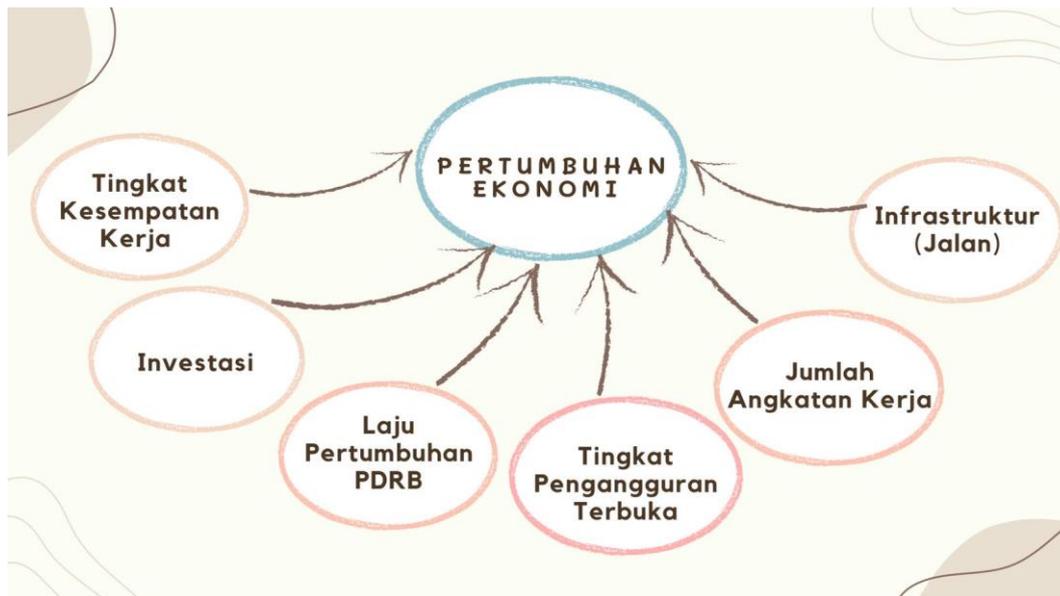
## 2.4.3 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kelas Menengah di Indonesia (Data Time Series)



**Gambar 2. 12 Kerangka Model Konseptual**

Dalam model ini, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Jumlah Pengangguran variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah yang dimana merupakan variabel terikat.

#### **2.4.4 Kerangka Konseptual Model Estimasi Ekonomi terkait Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia 2019-2023(Data Panel)**



**Gambar 2. 13 Kerangka Model Konseptual**

Dalam model ini, Tingkat Kesempatan Kerja, Investasi, Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Angkatan Kerja, Infrastruktur (Jalan) merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia tahun 2019-2023 yang dimana merupakan variabel terikat.

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Jumlah Pendidikan, Upah Minimum, Investasi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia.
2. Terdapat korelasi antara Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah

Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia  
(Menggunakan data *time series*).

3. Terdapat korelasi antara Tingkat Kesempatan Kerja, Investasi, Laju Pertumbuhan PDRB, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Angkatan Kerja, Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia tahun 2019-2023 (Menggunakan data Panel).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian.

### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang dimana bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yaitu data yang berbentuk angka dan bilangan. Data yang disajikan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data sebelumnya. Data dalam penelitian ini berjenis time series yaitu data yang secara kronologis disusun menurut runtun waktu pada suatu variabel tertentu dan Data panel digunakan untuk mempelajari karakteristik antar individu dan antar waktu yang berbeda. Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data *time series*.

### **3.2 Defenisi Operasional**

Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah:

**Tabel 3. 1 Defenisi Operasional Variabel Ekonometrika (Data Time Series)**

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM)	Kelas Menengah adalah kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita per bulan yang berkisar antara 3,5-17 kali garis kemiskinan, yang di ukur dalam satuan ( jiwa) per tahun	Variabel Terikat	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)
Pertumbuhan Ekonomi (PE)	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, yang di ukur dalam satuan (%) per tahun	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)

Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF)	Jumlah Tenaga Kerja Formal masyarakat yang status pekerjaannya berupa berusaha dibantu buruh tetap/buruh, yang di ukur dalam satuan (%) per tahun	Variabel Bebas	<a href="http://satudata.kemnaker.go.id">satudata.kemnaker.go.id</a> (Kementerian Ketenagakerjaan RI)
Lulusan Perguruan Tinggi (LPT)	Jumlah Pendidikan yang Perguruan Tinggi di Indonesia, diukur dalam satuan (%) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.pddikti.kemdiktisaintek.go.id/">www.pddikti.kemdiktisaintek.go.id/</a> (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI)
Upah Minimum Provinsi (UMP)	Upah Minimum Provinsi jumlah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pekerja untuk jam kerja tertentu, diukur dalam satuan (rp) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://satudata.kemnaker.go.id">satudata.kemnaker.go.id</a> (Kementerian Ketenagakerjaan RI)
Investasi (INV)	Investasi dapat di definisikan bahwa tindakan menanamkan modal atau sumber daya (seperti uang, waktu, atau tenaga), diukur dalam satuan ukuran milyar (rp) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bkpm.go.id/id/home">www.bkpm.go.id/id/home</a> (Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI)
Jumlah Pengangguran (JP)	Tingkat Pengangguran Terbuka bahwa persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, diukur dalam satuan (jiwa) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)

Sumber: Olahan Penulis

**Tabel 3. 2 Defenisi Operasional Varibel Ekonometrika (Data Panel)**

Variabel	Definisi Operasional	Kategori	Sumber Data
Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi (PE)	Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang, yang di ukur dalam satuan ukuran (%) per tahun	Variabel Terikat	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)
Tingkat Kesempatan Kerja Per Provinsi (TKK)	Tingkat Kesempatan Kerja bahwa ukuran yang menggambarkan proporsi atau persentase individu dalam angkatan kerja yang memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan, yang di ukur dalam satuan (%) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)
Investasi PMA/PMDA (INV)	Investasi dapat di definisikan bahwa tindakan menanamkan modal atau sumber daya (seperti uang, waktu, atau tenaga), diukur dalam satuan milyar (rp) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bkpm.go.id/id/home">www.bkpm.go.id/id/home</a> (Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI)
Laju Pertumbuhan PDRB per provinsi (LPPDRB)	Laju pertumbuhan PDRB menunjukkan perkembangan pendapatan agregat dari satu waktu ke waktu sebelumnya, diukur dalam satuan ukuran (%) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka bahwa persentase dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, diukur dalam satuan (%) persen per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)

Jumlah Angkatan Kerja (JAK)	Jumlah Angkatan Kerja mencakup individu yang sedang bekerja (pekerja) dan yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan (pengangguran), diukur dalam satuan (orang) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://satudata.kemnaker.go.id">satudata.kemnaker.go.id</a> (Kementerian Ketenagakerjaan RI)
Infrastruktur (Jalan), (INF)	Infrastruktur mencakup berbagai jenis fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi, dan pelayanan public, diukur dalam satuan (km) per tahun.	Variabel Bebas	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a> (BPS RI)

Sumber: Olahan Penulis

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Secara khusus penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan melihat perkembangan jumlah penduduk kelas menengah dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan merupakan data yang telah disediakan dalam laporan lembaga terkait yang resmi.

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yang dimulai dari bulan Januari 2025 hingga Maret 2025

### 3.4 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data 72 dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data sekunder pada penelitian ini menggunakan data *time series* (runtun waktu) dan data panel (gabungan data cross section dan data *time series*).

#### 3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa lembaga resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Dikti Republik Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data sekunder melalui Badan Pusat Statistik, Kementerian Dikti Republik Indonesia, Kementerian Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

### 3.6 Model Estimasi

Penelitian ini mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk kelas menengah dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi inklusif pilar pertama di Indonesia dengan menggunakan data times series yaitu data tahunan yang dimulai dari periode 2015-2024, model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PKM_t = \beta_0 + \beta_1 PE_t + \beta_2 TKF_t + \beta_3 LPT_t + \beta_4 UMP_t + \beta_5 INV_t + \beta_6 TPT_t + \epsilon_t$$

Dimana:

PKM : Jumlah Penduduk Kelas Menengah  
 PE : Pertumbuhan Ekonomi  
 TKF : Jumlah Tenaga Kerja Formal  
 LPT : Lulusan Perguruan Tinggi  
 UMP : Upah Minimum Provinsi  
 INV : Investasi  
 JP : Jumlah Pengangguran

$\beta_0$  : Konstanta  
 $\beta_1- \beta_7$  : Koefisien  
 $t$  : Unit Waktu (2015-2024)  
 $\epsilon_t$  : *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

Berdasarkan penelitian di atas dalam hal ini peneliti membuat tujuan ke 3 sehingga model ekonometrikanya berbentuk (panel data) per provinsi di Indonesia:

Penelitian ini mengenai faktor yang memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi per provinsi di Indonesia dengan menggunakan data panel yang merupakan data kombinasi dari time series (i) dan *cross section* (i) ditunjukkan oleh notasi 'it' yaitu selama 10 tahun terakhir yang dimulai dari periode 2014-2023 , model ekonometrika pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 TKK_{it} + \beta_2 INV_{it} + \beta_3 LPPDRB_{it} + \beta_4 TPT_{it} + \beta_5 JAK_{it} + \beta_6 INF_{it} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

PE: : Pertumbuhan Ekonomi  
 TKK : Tingkat Kesempatan Kerja  
 INV : Investasi  
 LPPDRB: Laju Pertumbuhan PDRB  
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka  
 JAK : Jumlah Angkatan Kerja  
 INF : Infrastruktur (Jalan)  
 $\beta_0$  : Konstanta  
 $\beta_1- \beta_7$  : Koefisien  
 $i$  : Data cross section  
 $t$  : Data time series  
 $\epsilon_t$  : *term of error*

Setelah model penelitian diestimasi maka akan diperoleh nilai dan besaran masing-masing parameter model persamaan diatas. Nilai dari parameter positif dan negatif selanjutnya akan diperoleh untuk menguji hipotesa penelitian.

### 3.7 Metode Estimasi

Metode estimasi pada penelitian ini adalah untuk mengestimasi semua variabel yang diamati menggunakan data *time series* ( dari tahun 2014-2023) dan data panel (gabungan data *time series* dan *cross section*) dalam kurun waktu 10 tahun (dari tahun 2015 sampai 2024). Analisis trend dalam kurun waktu 74 tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS (Ordinary Least Square) dalam bentuk regresi linier berganda (Multiple Regression Model) yang disajikan lebih sederhana serta mudah dipahami.

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode Ordinary Least Square adalah sebagai:

Nilai rata-rata disturbance term = 0

1. Tidak terdapat korelasi serial (Serial Auto Correlation) diantara disturbance term  $COV(\epsilon_t, \epsilon_j) = 0 : I \neq j$
2. Sifat momocidentecity dari disturbance term  $Var(\epsilon^i) = \sigma^2$
3. Covariance antar  $\epsilon^i$  darisetiap variabel bebas (x) = 0 setiap variabel bebas (x) = 0
4. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
5. Tidak terdapat collinearity antara variabel-variabel bebas. Artinya, variable- variabel bebas tidak mengandung hubungan linier tertentu antara sesamanya

6. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi gauss-markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). (Gujarati, 2016).

### **3.8 Teknik Analisis Data**

#### **3.8.1 Melakukan Analisis Ekonomi Secara Deskriptif tentang Jumlah Penduduk Kelas Menengah, Pertumbuhan ekonomi, Kesempatan Kerja, Pertumbuhan PDRB Rill per Kapita dan Tingkat Kesempatan Kerja**

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pembangunan ekonomi inklusif khususnya pilar pertama di Indonesia.

#### **3.8.2 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia Menggunakan data (*Time Series*)**

##### **A.Tahapan Analisis**

##### **1. Penaksiran**

##### **a. Korelasi ( $r$ )**

Koefisien kolerasi merupakan derajat keeratan antara variabel terikat 75 dengan variabel bebas yang diamati. Koefesien kolerasi biasanya dilambangkan

dengan huruf  $r$  dimana bervariasi mulai  $-1$  sampai  $+1$ . Nilai  $r = -1$  atau  $+1$  menunjukkan hubungan yang kuat antar variabel- variabel tersebut, jika nilai  $r = 0$ , mengindikasikan tidak ada hubungan antar variabel-variabel tersebut. Sedangkan tanda  $+$  (positif) dan  $-$  (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antar variabel-variabel tersebut.

### **b. Uji Koefisien Determinasi (D)**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (D) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R<sup>2</sup>* (Kuncoro, 2013).

## **2. Pengujian (Test Diagnostic)**

### **a. Uji Parsial (uji t)**

Uji statistik  $t$  pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Gujarati, 2013). Uji  $t$  dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PE<sub>t</sub>), Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF<sub>t</sub>), Lulusan Perguruan Tinggi (LPT<sub>t</sub>), Upah Minimum Provinsi (UMPt), Investasi (INV<sub>t</sub>), dan Jumlah Pengangguran (JP<sub>t</sub>) terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM). Dalam hal ini pengujian dilakukan adalah sebagai berikut:

## **3. Perumusan Hipotesis**

- a. Hipotesis  $H_0 : \beta_i = 0$  (tidak ada hubungan yang signifikan antara masing-

masing variabel Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Indonesia tahun 2015-2024)

b. Hipotesis  $H_a \neq \beta_i \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Indonesia tahun 2015-2024)

#### 4. Uji stastitik yang digunakan adalah uji t. Dimana t hitung adalah:

$$t_h = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

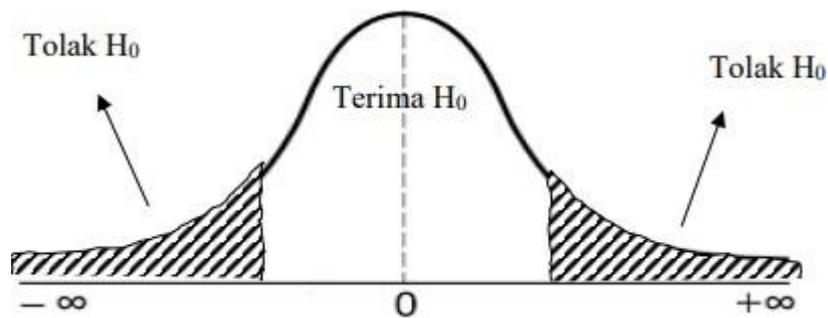
Dimana:

$\beta_1$  : Pertumbuhan Ekonomi  
 $\beta_2$  : Jumlah Tenaga Kerja Formal  
 $\beta_3$  : Lulusan Perguruan Tinggi  
 $\beta_4$  : Upah Minimum Provinsi  
 $\beta_5$  : Investasi  
 $\beta_6$  : Jumlah Pengangguran  
 Se  $\beta_i$  : Standar eror

Nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel =  $\pm t(\alpha/2, n - 1)$  dengan derajat kesalahan  $\alpha$  pada tingkat 1%, 5%, 10%, dan 15%.

#### Kriteria Uji

Terima  $H_0$  jika  $- t_{tabel} < t_{hitung} < + t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. 1 Kriteria Uji Distribusi Kurva Normal**

## 5. Kesimpulan

Sesuai kriteria uji maka terima  $H_0$  atau tolak  $H_0$

### b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pada model  $PE_t$ ,  $TKF_t$ ,  $LPT_t$ ,  $UMP_t$ ,  $INV_t$ , dan  $JPt$  secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia tahun (2015-2024) Dimana langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Perumusan Hipotesis

- a. Hipotesis  $H_0$  :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$  (tidak ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi , Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Indonesia tahun 2015-2024).
- b. Hipotesis  $H_a$  :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 \neq 0$  (ada hubungan yang signifikan secara serentak antara variabel Pertumbuhan ekonomi, Jumlah Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi , Upah Minimum, Investasi, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah Indonesia Indonesia tahun 2015-2024).

**2. Uji statistik yang digunakan adalah uji F, dimana F hitung adalah:**

$$F = \frac{R^2/K - 1}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Dimana:

K = jumlah parameter yang diesmati

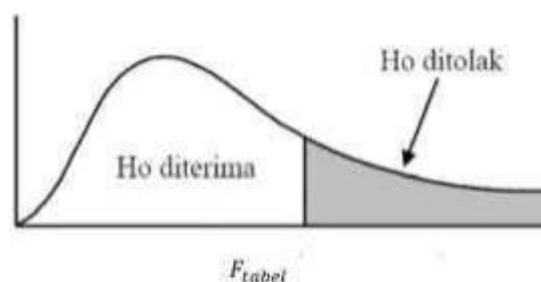
n = Jumlah data yang di observasi

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan Ftabel = F ( $\alpha$ , n-k-1) dengan derajat

kesalahan  $\alpha = 10\%$

### 3. Kreteria Uji

Terima jika  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ . Atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3. 2 Kriteria Uji Distribusi Kurva F**

### c. Uji Asumsi Klasik

Metode OLS (Ordinary Least Squere) mendapatkan nilai estimator yang diharapkan dapat memenuhi sifat estimator OLS (Ordinary Least Squere) yang BLUE (Blue Linear Unbiased Estimator) dengan cara meminimumkan kuadrat simpangan setiap observasi dalam sampel. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga asumsi dalam metode estimasi OLS (Ordinary Least Squere) yang harus dipenuhi dalam pengujian berdasarkan kriteria

ekonometrika, yaitu:

1. Tidak ada masalah hubungan antara variabel independen dalam regresi berganda yang digunakan (tidak multikolinearitas)
2. Varian variabel yang konstan (tidak heterokedastisitas)
3. Tidak ada hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi berikutnya (tidak ada autokorelasi).

### **1. Multikolinieritas**

Multikolinieritas berhubungan dengan situasi dimana ada linear baik yang pasti atau mendekati pasti antara variabel independen. Masalah multikolinieritas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinieritas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak terpercaya (Gujarati, 2016).

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linear dalam model persamaan regresi. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan auxiliary regression untuk mendekteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika  $R^2$  regresi persamaan utama lebih dari  $R^2$  regresi auxiliary maka didalam model ini tidak terjadi multikolinearitas

### **2. Heterokedastisitas**

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana varians dari setiap gangguan tidak konstan. Dampak adanya hal tersebut adalah tidak efisisennya proses

estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri tetap konsisten dan tidak bias serta akan mengakibatkan hasil uji t dan uji f dapat menjadi tidak “reliable” atau tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan Uji White. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai  $R^2$  yang didapat digunakan untuk menghitung  $x^2$ , dimana  $x^2 = n \cdot R^2$  (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai probability Observasion R- Squared lebih besar dari taraf nyata 5%, Maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak.

### **3. Autokorelasi**

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel pada periode lainnya, dengankata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, menggunakan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson Test. Dimana apabila  $d$  dan  $du$  adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada  $2 < DW < 4-du$  maka autokorelasi atau no-autocorrelation (Gujarati, 2016).

Adapun, yang membedakan data yang digunakan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan data panel sebagai berikut:

### **3.8.3 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi tahun 2019-2023 di Indonesia Menggunakan data (Panel).**

#### **A. Bentuk Model Panel Data**

##### **1. *Common Effect Model* (CEM)**

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode *Ordinary Least Square* (OLS). Model *Common Effect Model* mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

##### **2. *Fixed Effect Model* (FEM)**

Pendekatan model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

##### **3. *Random Effect Model* (REM)**

Pendekatan yang dipakai dalam *Random Effect* mengasumsikan setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah

variabel random atau stokastik. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel adalah dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section dan time series*.

## **B.Uji Model data Panel:**

### **1. Uji Hausman**

Pengujian Hausman bertujuan untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Pada uji ini, hipotesis yang digunakan adalah:

$H_0$  : Tidak ada perbedaan antara model fixed effect dengan model random effect

$H_1$  : Terdapat perbedaan antarkedua model tersebut

Jika hasil estimasi menunjukkan “menolak  $H_0$ ”, maka yang dipilih adalah model *fixed effect*. Sedangkan jika hasilnya “menerima  $H_0$ ” maka model harus diuji lagi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM test) atau *Breusch-Pagan* test (BP test). (Setyo Tri Wahyudi,2020)



## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Indonesia**

#### **4.1.1 Kondisi Geografis Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6° Lintang Utara dan 11° Lintang Selatan dan 95° – 141° Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, Indonesia terdapat 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota dengan luas wilayah daratan secara keseluruhan sebesar 1.892.555,47 km<sup>2</sup> dengan total populasi pada Semester I Tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan.

Luas lautan Indonesia sekitar 3.273.810 km<sup>2</sup> dan memiliki batas 12 mil laut dan zona ekonomi eksklusif sebesar 200 mil. Batas ujung barat Indonesia ialah Sabang; ujung timur adalah Merauke; ujung utara adalah Miangas; ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau serta berada di belahan timur bumi. Indonesia memiliki 3 pembagian daerah waktu, yaitu WIB (Waktu Indonesia bagian Barat), WITA (Waktu Indonesia bagian Tengah), dan WIT (Waktu Indonesia bagian Timur).

#### **4.1.2 Kondisi Demografi Indonesia**

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020, Indonesia memiliki penduduk

sebanyak 270,2 juta jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 136,66 juta jiwa atau 50,58% dari total penduduk Indonesia. Sementara, total penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta jiwa atau sebanyak 49,42 persen dari penduduk di Indonesia. Indonesia memiliki penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang terus meningkat sejak tahun 1971.

Rentang usia dibagi dalam 6 generasi, yaitu Post Generasi Z (lahir 2013 – sekarang) 10,88% dari total populasi penduduk di Indonesia, Generasi Z (lahir tahun 1997 – 2012) sebanyak 75,49 juta jiwa atau setara dengan 27,95% dari total seluruh populasi penduduk Indonesia, Generasi Milenial (lahir tahun 1981 – 1996) jumlah penduduk generasi millennial sebanyak 69,38 juta jiwa atau sebesar 25,87%, Generasi X (lahir 1965 - 1980) sebanyak 21,88%, Baby Boomer (lahir tahun 1946 – 1964) 11,56%, dan Pre-Boomer (lahir sebelum tahun 1945) 1,87% dari total populasi penduduk di Indonesia.



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

**Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Indonesia 2019-2024**

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 266,9 juta jiwa, menjadikannya sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia. Meskipun terdapat upaya melalui program keluarga berencana untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, angka kelahiran yang tinggi masih menjadi faktor dominan.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk meningkat menjadi 270,2 juta jiwa, dengan tambahan sekitar 3,3 juta jiwa dalam satu tahun. Tahun ini juga ditandai dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan pada kesehatan dan ekonomi masyarakat. Namun, meskipun ada peningkatan mortalitas dan perubahan dinamika sosial akibat pandemi, dampak terhadap jumlah penduduk tidak terlalu mencolok.

Pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 272,7 juta jiwa, menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dengan tambahan 2,5 juta jiwa. Pertumbuhan ini tetap berada dalam tren alami meskipun pandemi masih berlangsung. Program vaksinasi dan penanganan pandemi mulai menunjukkan hasil positif, memungkinkan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2022, jumlah penduduk kembali meningkat menjadi 275,7 juta jiwa. Pertumbuhan ini mencerminkan stabilitas demografis yang cukup konsisten dan didorong oleh pemulihan ekonomi yang lebih kuat setelah dampak pandemi. Proyeksi untuk tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,8 juta jiwa. Meskipun pertumbuhan populasi tetap stabil, laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyoroti tantangan dalam perencanaan pembangunan terkait penyediaan layanan publik, perumahan, dan lapangan kerja.

Untuk tahun 2024, proyeksi menunjukkan jumlah penduduk mencapai sekitar 281,6 juta jiwa. Data ini menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sekitar 2,9 juta jiwa per tahun dari 2021 hingga 2024.

Pertumbuhan penduduk dalam lima tahun terakhir ini menekankan perlunya strategi pembangunan yang lebih matang untuk mengatasi tantangan yang muncul dari penambahan populasi ini.

Komponen	Tahun (Juta)			
	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja (Jiwa)	140,15	143,73	147,71	152,11
Bekerja (Jiwa)	131,05	135,3	139,85	144,64
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	9,10	8,42	7,86	7,47

**Tabel 4. 1 Ketenagakerjaan Indonesia**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

Angkatan kerja di Indonesia, yang terdiri dari penduduk berusia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi, menunjukkan peningkatan signifikan dalam periode 2021 hingga 2024. Selama periode ini, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 7,56 juta orang, atau sekitar 5,39 persen. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan pasokan tenaga kerja yang semakin melimpah di Indonesia.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, angkatan kerja terbagi menjadi dua kategori utama: penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Pada tahun 2023, jumlah penduduk yang bekerja hampir mencapai 140 juta orang, mengalami kenaikan sebesar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen sejak tahun 2021. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Pengangguran terbuka, yang mencakup individu yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari atau mempersiapkan usaha baru, juga menunjukkan tren penurunan. Dalam periode yang sama, jumlah pengangguran terbuka berkurang sebanyak 1,24 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan sekitar 1,17 persen, mencerminkan perbaikan dalam kondisi pasar kerja.

Namun demikian, meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah angkatan kerja dan penurunan pengangguran terbuka, tantangan tetap ada. Sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja, dengan banyak pekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas tenaga kerja dan kesiapan mereka untuk menghadapi tuntutan pasar yang semakin kompetitif.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat kemajuan dalam peningkatan angkatan kerja dan penurunan pengangguran, strategi yang lebih komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

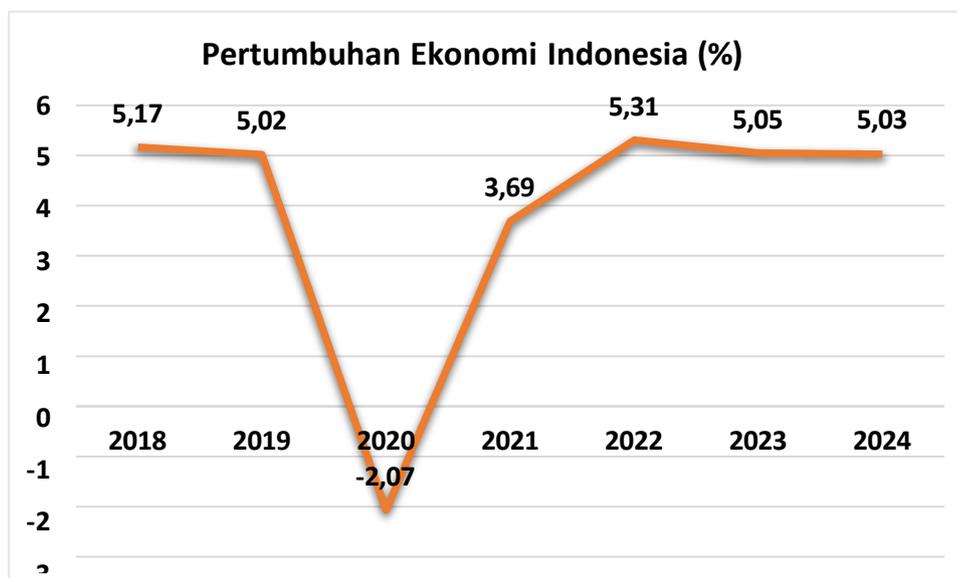
### **4.1.3 Perkembangan Ekonomi di Indonesia**

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia

#### **1. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara (Todaro, 2005). Pertumbuhan ekonomi dan laju

pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja perekonomian negara.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

#### Gambar 4. 2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)

Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencatat pertumbuhan sebesar 5,17%, meningkat dari 5,07% pada tahun 2017. Peningkatan ini mencerminkan optimisme di pasar domestik serta penguatan sektor-sektor kunci seperti manufaktur dan jasa. Namun, pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 5,02%, menandakan adanya stabilisasi setelah periode pertumbuhan yang kuat sebelumnya.

Tahun 2020 menjadi titik balik yang signifikan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi mencapai -2,07%. Penurunan ini mencerminkan dampak serius dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Hampir semua komponen pengeluaran mengalami penyusutan, dengan ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi terbesar sebesar 7,70%, sedangkan impor

menyusut hingga 14,71%.

Pada tahun 2021, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan pertumbuhan mencapai 3,69%, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan penurunan tahun sebelumnya. Pemulihan ini berlanjut pada tahun 2022, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,31%, mencerminkan kembalinya aktivitas ekonomi dan peningkatan kepercayaan pasar.

Namun, pada tahun 2023, pertumbuhan kembali menurun menjadi 5,03%, meskipun tetap menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengelola pemulihan pasca-pandemi di tengah ketidakpastian global yang masih ada. Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5,03%, sedikit melambat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah berhasil dalam beberapa aspek pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tantangan tetap ada. Ketidakpastian global dan faktor domestik seperti daya beli masyarakat yang menurun perlu diwaspadai. Pemerintah harus terus berupaya untuk memperkuat fondasi ekonomi dan memastikan bahwa pertumbuhan dapat berlanjut dengan stabil di masa depan.

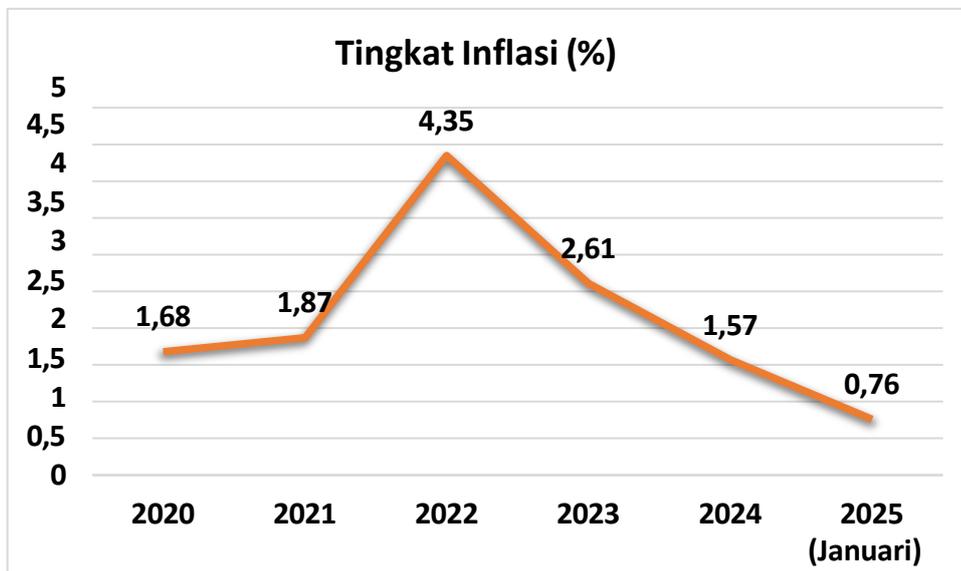


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2018-2024)**

## 2. Tingkat Inflasi di Indonesia

Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan penyakit makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.



*Sumber: Bank Indonesia, diolah 2025*

#### **Gambar 4. 4 Tingkat Inflasi Di Indonesia (2018-2024)**

Tahun 2020 mencatatkan tingkat inflasi terendah dalam periode ini, yaitu sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan akibat pandemi COVID-19, yang mengakibatkan permintaan konsumen menurun drastis. Pada tahun 2021, inflasi mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,87%, mencerminkan awal dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, pada tahun 2022, inflasi meningkat secara signifikan, dipicu oleh lonjakan harga energi global, gangguan rantai pasokan, dan pemulihan permintaan domestik. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan bahan makanan menjadi faktor utama penyebab inflasi tersebut.

Pada tahun 2023 dan 2024, inflasi kembali menunjukkan tren penurunan, masing-masing menjadi 2,61% dan 1,57%, yang mengindikasikan stabilisasi harga seiring dengan normalisasi kondisi ekonomi. Meskipun Indonesia mencapai tingkat inflasi terendahnya sejak tahun 2000 sebesar 0,76%, situasi ini perlu diwaspadai. Inflasi yang rendah tidak selalu mencerminkan efisiensi ekonomi; sebaliknya, hal ini bisa menjadi indikator lemahnya permintaan domestik.

Sebagai contoh, sembilan dari sepuluh pelaku usaha melaporkan penurunan omzet atau sepiunya aktivitas bisnis. Ini menunjukkan bahwa meskipun angka inflasi rendah dapat terlihat positif pada pandangan pertama, kondisi ini sebenarnya mencerminkan tantangan yang lebih dalam. Jika daya beli konsumen

terus menurun tanpa adanya intervensi yang tepat, Indonesia berisiko memasuki fase krisis multidimensi yang serius, dikenal sebagai stagnansi.

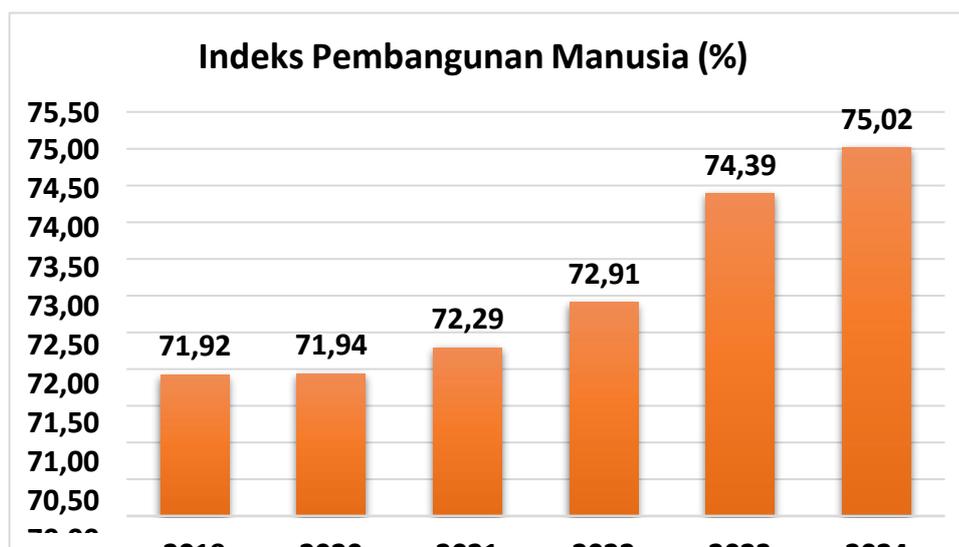
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada angka inflasi tetapi juga untuk memperhatikan kesehatan ekonomi secara keseluruhan dan memastikan bahwa langkah-langkah diambil untuk meningkatkan daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat.

#### 4.1.4 Perkembangan Sosial di Indonesia

Perkembangan sosial di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam beberapa tahun terakhir. Berikut adalah beberapa poin penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi di Indonesia

##### 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu: 1.  $IPM < 50$  (rendah); 2.  $50 \leq IPM < 80$  (sedang/menengah); 3.  $IPM \geq 80$  (tinggi).



*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

#### **Gambar 4. 5 Indeks Pembangunan Manusia (2019-2024)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 71,92%, menunjukkan tingkat pembangunan manusia yang sedang dengan potensi untuk perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Pada tahun 2020, IPM sedikit meningkat menjadi 71,94%, meskipun kenaikan ini sangat kecil. Hal ini mencerminkan upaya yang mungkin dilakukan untuk mempertahankan kualitas hidup di tengah tantangan besar akibat pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, IPM meningkat menjadi 72,29%, menandakan adanya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia, meskipun masih dalam kategori moderat. Tren positif berlanjut pada tahun 2022 dengan IPM mencapai 72,91%, yang menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meskipun tantangan tetap ada.

Tahun 2023 mencatatkan peningkatan signifikan dengan IPM mencapai 74,39%. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan yang lebih cepat dalam pembangunan manusia, kemungkinan berkat kebijakan dan program yang efektif dalam meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2024, IPM kembali meningkat menjadi 75,02%, mencerminkan keberhasilan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia dan mendekati kategori "tinggi" dalam klasifikasi IPM.

Namun, meskipun terdapat kemajuan yang jelas, penting untuk menyadari bahwa peningkatan IPM tidak selalu mencerminkan kesetaraan dalam distribusi manfaat pembangunan. Masih ada tantangan terkait kesenjangan sosial dan ekonomi yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ini. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar kemajuan yang dicapai dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

## 2. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan yang bersifat absolut dan relatif yang mengindikasikan bahwa individu atau kelompok orang di suatu daerah tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sesuai dengan nilai atau norma yang ada di masyarakat atau norma-norma tertentu yang berlaku dalam masyarakat karena faktor-faktor alamiah, kultural, atau struktural.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 6 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin  
Indonesia (2019-2024)**

Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,78%, setara dengan 9,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, dengan lebih dari 9 juta orang hidup dalam kondisi miskin. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 27,55%, yang berarti jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 10,19 juta jiwa. Kenaikan signifikan ini mencerminkan dampak serius dari pandemi COVID-19 yang menghambat ekonomi dan menyebabkan lebih banyak orang jatuh ke dalam kategori miskin.

Pada tahun 2021, terdapat sedikit perbaikan dengan persentase penduduk miskin turun menjadi 26,5%, yang setara dengan 9,71 juta jiwa. Meskipun angka kemiskinan masih tinggi, penurunan ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022, dengan persentase penduduk miskin mencapai 26,36% dan jumlah penduduk miskin menjadi 9,57 juta jiwa. Meskipun penurunan ini masih tipis, hal ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, angka kemiskinan terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Meskipun tren ini positif, penting untuk dicatat bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Upaya berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak hanya bersifat sementara.

Meskipun ada perbaikan dalam persentase dan jumlah penduduk miskin selama periode tersebut, tantangan struktural yang mendasari kemiskinan tetap ada. Kesenjangan sosial dan ekonomi serta dampak jangka panjang dari pandemi

harus menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif. Tanpa perhatian yang tepat terhadap masalah-masalah ini, Indonesia berisiko menghadapi stagnasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di masa depan.

### 3. Garis Kemiskinan di Indonesia

Garis kemiskinan adalah jumlah uang minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur jumlah penduduk miskin dan mempertimbangkan program untuk menanggulangi kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 7 Garis Kemiskinan Indonesia (2019-2024)**

Garis kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 440.538,00 per kapita per bulan, yang mencerminkan pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2020, garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 458.947,00 per kapita per bulan. Kenaikan ini kemungkinan besar dipicu oleh inflasi dan dampak dari pandemi COVID-19, yang mempengaruhi harga barang dan jasa serta pendapatan masyarakat secara

keseluruhan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, garis kemiskinan kembali naik menjadi Rp 486.168,00 per kapita per bulan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat, mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi yang belum stabil dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Tahun 2022 mencatatkan lonjakan signifikan dengan garis kemiskinan mencapai Rp 535.547,00 per kapita per bulan. Kenaikan besar ini dapat diatribusikan kepada peningkatan harga bahan bakar, pangan, dan komoditas lainnya, serta dampak dari kebijakan ekonomi dan pemulihan pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, garis kemiskinan naik menjadi Rp 550.458,00 per kapita per bulan. Meskipun kenaikan ini tidak sebesar tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan bahwa tekanan inflasi dan kondisi ekonomi masih mempengaruhi biaya hidup masyarakat. Tahun 2024 mencatatkan garis kemiskinan mencapai Rp 595.242,00 per kapita per bulan, yang merupakan peningkatan signifikan lainnya. Ini menunjukkan bahwa biaya hidup terus meningkat dan tantangan ekonomi tetap ada.

Meskipun angka-angka ini menunjukkan tren kenaikan garis kemiskinan, penting untuk diingat bahwa peningkatan garis kemiskinan tidak hanya mencerminkan inflasi tetapi juga tantangan struktural dalam perekonomian. Kebijakan yang lebih efektif diperlukan untuk menangani faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tanpa langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi ketimpangan sosial, tantangan dalam pengentasan kemiskinan akan terus berlanjut.

#### 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Indonesia

Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025

**Gambar 4. 8 Indeks Kedalaman Kemiskinan Indonesia (2019-2024)**

Pada tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Indonesia tercatat sebesar 1,50%. Ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat miskin tidak terlalu jauh di bawah garis kemiskinan, mencerminkan tingkat kedalaman kemiskinan yang relatif rendah. Namun, pada tahun 2020, indeks ini meningkat menjadi 1,75%, menandakan bahwa pendapatan masyarakat miskin semakin jauh

di bawah garis kemiskinan. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan dan lapangan kerja.

Pada tahun 2021, indeks ini menurun sedikit menjadi 1,67%, menunjukkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk mengurangi kedalaman kemiskinan. Pada tahun 2022, indeks ini kembali menurun menjadi 1,56%, mencerminkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin mulai menunjukkan hasil.

Pada tahun 2023, indeks ini menurun menjadi 1,53%, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi terus membaik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Pada tahun 2024, indeks ini turun menjadi 1,36%, yang merupakan penurunan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin semakin efektif.

Namun, meskipun terdapat penurunan dalam indeks kedalaman kemiskinan, penting untuk memperhatikan bahwa disparitas kemiskinan antar wilayah masih cukup tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan di pedesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan, menunjukkan bahwa tantangan kemiskinan masih lebih besar di daerah pedesaan<sup>12</sup>. Oleh karena itu, strategi yang lebih terarah dan inklusif diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di berbagai wilayah dan memastikan bahwa perbaikan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

## **4.2 Analisis Perkembangan Jumlah Penduduk Kelas Menengah**

### **4.2.1 Analisis Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia**

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Kelas Menengah**

<b>Jumlah Penduduk Kelas Menengah (Juta Jiwa)</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2019</b>	<b>57.330.000</b>
<b>2020</b>	<b>65.330.000</b>
<b>2021</b>	<b>53.830.000</b>
<b>2022</b>	<b>49.510.000</b>
<b>2023</b>	<b>52.000.000</b>
<b>2024</b>	<b>47.850.000</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

Periode 2019 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia. Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah tercatat sebesar 57,33 juta jiwa. Angka ini meningkat tajam pada tahun 2020 menjadi 65,33 juta jiwa, mencatat pertumbuhan sebesar sekitar 13,95%. Lonjakan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti adanya kebijakan ekonomi tertentu, peningkatan konsumsi, atau perubahan metodologi pengukuran kelas ekonomi oleh lembaga statistik.

Namun, tren positif tersebut tidak berlanjut. Tahun 2021 mencatat penurunan drastis hingga 53,83 juta jiwa, atau turun sebesar 17,61% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta turunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini berlanjut di tahun 2022, di mana jumlah penduduk kelas menengah kembali menurun menjadi 49,51 juta jiwa. Meskipun penurunannya tidak sedrastis tahun

sebelumnya, tren ini menunjukkan bahwa kelas menengah Indonesia masih belum pulih dari tekanan ekonomi.

Pada tahun 2023, terlihat adanya sedikit pemulihan dengan kenaikan jumlah penduduk kelas menengah menjadi 52 juta jiwa, atau meningkat sekitar 5,03% dibanding tahun 2022. Ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi secara perlahan, kemungkinan didukung oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi, peningkatan investasi, serta bantuan sosial dan insentif dari pemerintah. Namun, pada tahun 2024, jumlah penduduk kelas menengah kembali mengalami penurunan menjadi 47,85 juta jiwa, turun sekitar 7,98% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi masih belum stabil dan penduduk kelas menengah masih tergolong rentan terhadap guncangan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga barang pokok, atau perubahan kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, tren selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun sejak puncaknya pada tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa kelas menengah Indonesia berada dalam posisi yang kurang stabil dan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama kondisi ekonomi makro dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih berkelanjutan untuk memperkuat daya tahan dan mobilitas kelas menengah, agar mereka tidak mudah tergelincir ke kelompok rentan saat terjadi krisis.

#### **4.3 Analisis Perkembangan Indikator Pilar Pertama Pembangunan Ekonomi Inklusif**

### 4.3.1 Perkembangan Pertumbuhan PDRB Riil per Kapita di Indonesia tahun 2019-2023

**Tabel 4. 3 Pertumbuhan PDRB Riil per Kapita di Indonesia**

<b>Pertumbuhan PDRB Riil per Kapita (Rp Juta )</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2019</b>	<b>56.450.000</b>
<b>2020</b>	<b>54.330.000</b>
<b>2021</b>	<b>56.450.000</b>
<b>2022</b>	<b>58.320.000</b>
<b>2023</b>	<b>60.120.000</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

Perkembangan PDRB riil per kapita Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang erat kaitannya dengan kondisi ekonomi nasional dan global. Pada tahun 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, PDRB riil per kapita Indonesia tercatat sebesar Rp56,45 juta. Namun, pada tahun 2020, angka ini mengalami penurunan menjadi Rp54,33 juta, yang berarti terjadi kontraksi sekitar 3,76%. Penurunan ini sejalan dengan dampak pandemi yang menyebabkan terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, terganggunya rantai pasok, dan menurunnya pendapatan masyarakat.

Tahun 2021 menandai awal dari proses pemulihan ekonomi. PDRB riil per kapita kembali ke angka Rp56,45 juta, atau tumbuh sekitar 3,90% dari tahun sebelumnya. Pemulihan ini mencerminkan mulai kembalinya aktivitas ekonomi, pelonggaran pembatasan sosial, serta dimulainya program vaksinasi massal yang memperkuat optimisme pasar dan dunia usaha. Namun, pertumbuhan ini belum

cukup untuk membawa perubahan besar terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pada tahun 2022 dan 2023, tren positif berlanjut dengan pertumbuhan yang konsisten meskipun dalam laju yang lebih moderat. PDRB riil per kapita meningkat menjadi Rp58,32 juta di 2022 dan Rp60,12 juta di 2023. Pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 3,31% dan 3,09% ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia telah memasuki fase stabilisasi. Faktor-faktor seperti peningkatan konsumsi domestik, investasi yang mulai bergerak naik, serta ekspor yang membaik turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ini.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang positif pasca-pandemi, namun laju pertumbuhan PDRB riil per kapita yang relatif moderat menunjukkan bahwa tantangan struktural seperti kesenjangan pendapatan dan kualitas pekerjaan masih ada. Pertumbuhan ekonomi ini perlu diikuti dengan upaya pemerataan hasil pembangunan agar tidak hanya terlihat di angka makro, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan rentan.

#### **4.3.2 Perkembangan Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri**

##### **Manufaktur Terhadap PDB di Indonesia tahun 2019-2023**

**Tabel 4. 4 Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB di Indonesia tahun 2019-2023**

<b>Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2019</b>	<b>20,79</b>

<b>2020</b>	<b>20,61</b>
<b>2021</b>	<b>20,55</b>
<b>2022</b>	<b>20,47</b>
<b>2023</b>	<b>20,39</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menunjukkan tren penurunan bertahap selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, sektor manufaktur menyumbang sekitar 20,79% terhadap total PDB. Namun, angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 20,39% pada tahun 2023. Meskipun penurunannya terlihat kecil secara persentase, tren ini cukup konsisten dan menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi nasional.

Penurunan proporsi ini menunjukkan bahwa kontribusi relatif sektor industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin mengecil, meskipun nilai tambah sektornya mungkin masih tumbuh secara nominal. Penurunan dari 20,79% ke 20,39% dalam lima tahun mencerminkan dua kemungkinan: pertama, pertumbuhan sektor manufaktur tidak secepat pertumbuhan sektor lain seperti jasa dan perdagangan; kedua, sektor-sektor non-manufaktur berkembang lebih cepat sehingga proporsinya dalam PDB menjadi lebih besar.

Faktor lain yang mungkin memengaruhi adalah kurangnya diversifikasi dan inovasi dalam sektor manufaktur, ketergantungan pada industri padat karya berbiaya rendah, serta tantangan global seperti disrupsi rantai pasok dan fluktuasi harga bahan baku. Selain itu, persaingan regional di ASEAN dan ketergantungan

pada impor bahan baku juga menjadi kendala dalam meningkatkan nilai tambah sektor ini secara signifikan.

Tren penurunan ini bisa menjadi sinyal penting bagi kebijakan industri nasional. Jika Indonesia ingin naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi, penguatan sektor manufaktur sangat krusial, karena sektor ini berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperluas pasar ekspor, dan meningkatkan kemampuan teknologi dalam negeri. Maka dari itu, diperlukan strategi industrialisasi yang lebih progresif, mendorong investasi teknologi, dan memperluas integrasi rantai nilai domestik.

#### **4.3.3 Perkembangan Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia tahun 2020-2024**

**Tabel 4. 5 Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia**

<b>Tingkat Kesempatan Kerja di Indonesia</b>	
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>2020</b>	<b>92,93</b>
<b>2021</b>	<b>93,51</b>
<b>2022</b>	<b>94,14</b>
<b>2023</b>	<b>94,68</b>
<b>2024</b>	<b>95,09</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah 2025*

Periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil dan konsisten dalam tingkat kesempatan kerja di Indonesia. Pada tahun 2020, di tengah tekanan akibat pandemi COVID-19, tingkat kesempatan kerja tercatat sebesar 92,93%. Meskipun angka ini masih tergolong tinggi, namun situasi saat

itu mencerminkan adanya gangguan besar di pasar tenaga kerja, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan pekerja informal akibat pembatasan sosial dan pelemahan ekonomi.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, terlihat adanya pemulihan secara bertahap. Tingkat kesempatan kerja meningkat menjadi 93,51% pada 2021 dan 94,14% pada 2022. Kenaikan ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai pulih, terutama karena pelonggaran kebijakan pembatasan, pemulihan sektor informal, serta meningkatnya adaptasi masyarakat terhadap ekonomi digital. Pemerintah juga mulai menggenjot program pemulihan ekonomi nasional, termasuk dukungan untuk UMKM dan pelatihan kerja bagi angkatan kerja muda.

Pada tahun 2023 dan 2024, tren positif tersebut berlanjut dengan tingkat kesempatan kerja mencapai 94,68% dan 95,09%. Kenaikan ini mencerminkan bahwa lapangan kerja terus bertambah, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya perbaikan struktur ekonomi nasional, yang semakin mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa angka kesempatan kerja yang tinggi tidak serta merta mencerminkan kualitas pekerjaan, karena sebagian besar pekerjaan baru bisa saja berada di sektor informal atau dengan upah yang belum memadai.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas pasar kerja pasca pandemi. Namun, ke depan tantangan yang dihadapi bukan hanya menciptakan lapangan kerja, melainkan juga memastikan kualitas pekerjaan tersebut, termasuk perlindungan sosial, pengupahan layak, serta

peningkatan produktivitas. Pemerintah perlu terus memperkuat sektor-sektor padat karya dan memperluas investasi di bidang pendidikan vokasi dan teknologi agar pertumbuhan kesempatan kerja ini menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

#### **4.4 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah**

##### **4.4.1 Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Kelas Menengah**

Statistik deskriptif adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Penyajian ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut.

**Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Model**

	<b>PKM</b>	<b>PE</b>	<b>TKF</b>	<b>LPT</b>	<b>UMP</b>	<b>INV</b>	<b>JP</b>
<b>Mean</b>	54878000	464.0000	708759.3	736555.8	2478178.	4906.600	19502.20
<b>Median</b>	53715000	504.0000	708949.0	736554.5	2564017.	4346.600	19909.00
<b>Maximum</b>	65330000	531.0000	709676.0	738163.0	3113359.	6543.000	22414.00
<b>Minimum</b>	47850000	207.0000	707891.0	734913.0	1790342.	3659.000	14517.00
<b>Std. Deviasi</b>	5217592	100.9139	556.4714	1106.806	422555.8	1172.084	2546.974

*Sumber: Eviews 12, diolah 2025*

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk delapan variabel, yang diantaranya terdapat satu variabel terikat yaitu Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM). Terdapat juga tujuh variabel bebas yaitu: Pertumbuhan Ekonomi (PE) ,Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV), dan Jumlah Pengangguran (JP). Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

a. *Mean* (Rata-rata)

PKM : Rata-rata Jumlah Penduduk Kelas Menengah adalah 54878000 Jiwa

PE : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi adalah 464.0000%

TKF : Rata-rata Jumlah Tenaga Kerja Formal adalah 708759.3 Orang

LPT : Rata-rata Presentase Lulusan Perguruan Tinggi adalah 736555.8 %

UMP : Rata-rata Upah Minimum Provinsi adalah 2478178 Rupiah

INV : Rata-rata Investasi adalah 4906.600 Rupiah

JP : Rata-rata Jumlah Pengangguran adalah 19502.20 Jiwa

b. *Median* (Nilai Tengah)

PKM : *Median* Jumlah Penduduk Kelas Menengah adalah 537115000 Jiwa

PE : *Median* Pertumbuhan Ekonomi adalah 504.0000%

TKF : *Median* Jumlah Tenaga Kerja Formal adalah 708949.0 Orang

LPT : *Median* Presentase Lulusan Perguruan Tinggi adalah 736554.5 %

UMP : *Median* Upah Minimum Provinsi adalah 2564017 Rupiah

INV : *Median* Investasi adalah 4346.000 Rupiah

JP : *Median* Jumlah Pengangguran adalah 19909.00 Jiwa

c. *Maximum* (Maksimum)

PKM : *Maximum* Jumlah Penduduk Kelas Menengah adalah 65330000 Jiwa

PE : *Maximum* Pertumbuhan Ekonomi adalah 531.0000%

TKF : *Maximum* Jumlah Tenaga Kerja Formal adalah 709676.0 Orang

LPT : *Maximum* Presentase Lulusan Perguruan Tinggi adalah 738163.0 %

UMP : *Maximum* Upah Minimum Provinsi adalah 3113359 Rupiah

INV : *Maximum* Investasi adalah 6543.000 Rupiah

JP : *Maximum* Jumlah Pengangguran adalah 22414.00 Jiwa

c. Minimum

PKM : Minimum Jumlah Penduduk Kelas Menengah adalah 47850000 Jiwa

PE : Minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 207.0000%

TKF : Minimum Jumlah Tenaga Kerja Formal adalah 707891.0 Orang

LPT : Minimum Presentase Lulusan Perguruan Tinggi adalah 734913.0 %

UMP : Minimum Upah Minimum Provinsi adalah 1790342 Rupiah

INV : Minimum Investasi adalah 3659.000 Rupiah

JP : Minimum Jumlah Pengangguran adalah 14517.00 Jiwa

d. Standar Deviasi

PKM : Standar Deviasi Penduduk Kelas Menengah adalah 5217592 Jiwa

PE : Standar Deviasi Pertumbuhan Ekonomi 100.9139 menunjukkan variasi tingkat partisipasi pertumbuhan ekonomi.

TKF : Standar Deviasi Jumlah Tenaga Kerja Formal 556.4714 Orang menunjukkan variasi tingkat partisipasi Jumlah Tenaga Kerja Formal.

LPT : Standar Deviasi Lulusan Perguruan Tinggi 1106.806% menunjukkan variasi tingkat partisipasi Lulusan Perguruan Tinggi.

UMP : Standar Deviasi Minimum Provinsi 422555.8 Rupiah menunjukkan variasi tingkat partisipasi Upah Minimum Provinsi.

INV : Standar Deviasi Investasi 1172.084 Rupiah menunjukkan variasi tingkat partisipasi Investasi.

JP : Standar Deviasi Jumlah Pengangguran adalah 2546.974 Jiwa Rupiah menunjukkan variasi Jumlah Pengangguran.

Kesimpulan:

Data ini memberikan gambaran statistik umum dari variabel-variabel yang diteliti. Secara umum, variabel-variabel ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan variabilitas yang terukur. Hasil ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti regresi, untuk melihat hubungan antara variabel-variabel ini.

#### 4.4.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. 7 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: PKM  
Method: Least Squares  
Date: 04/28/25 Time: 10:27  
Sample: 2015 2024  
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.77E+09	1.35E+10	0.130636	0.9043
PE	-14102.40	28706.84	-0.491256	0.6569
TKF	-1409.958	4095.580	-0.344263	0.7534
LPT	-944.5967	15962.71	-0.059175	0.9565
UMP	13.00028	36.60122	0.355187	0.7460
INV	-4389.296	3814.358	-1.150730	0.3332
JP	-1016.241	710.5739	-1.430169	0.2480
R-squared	0.908338	Mean dependent var	54878000	
Adjusted R-squared	0.725014	S.D. dependent var	5217592.	
S.E. of regression	2736058.	Akaike info criterion	32.67796	
Sum squared resid	2.25E+13	Schwarz criterion	32.88977	
Log likelihood	-156.3898	Hannan-Quinn criter.	32.44561	
F-statistic	4.954826	Durbin-Watson stat	1.558697	
Prob(F-statistic)	0.108495			

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah bahwa terdapat enam variable bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Formal,Lulusan

Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Jumlah Pengangguran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variable terikat yaitu Penduduk Kelas Menengah (PKM). Dimana variable Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja Formal, Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, Investasi dan Jumlah Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dengan nilai lebih besar daripada derajat kesalahan ( $\alpha > 15\%$ ). Oleh karena itu, peneliti menghapus satu variabel bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan dilanjutkan uji regresi dengan menambahkan “Logaritma Natural”. Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 8 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel PE dan Menambahkan Logaritma Natural**

Dependent Variable: PKM				
Method: Least Squares				
Date: 04/27/25 Time: 16:55				
Sample: 2015 2024				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.28E+11	5.02E+10	2.547255	0.0635
LOG(TKF)	2.14E+09	7.31E+08	2.925922	0.0430
LOG(LPT)	7.42E+09	3.62E+09	2.051279	0.1095
LOG(UMP)	79476543	23123847	3.436995	0.0264
INV	3365.573	1619.339	2.078362	0.1062
JP	-823.6745	334.7109	-2.460854	0.0696
R-squared	0.968469	Mean dependent var	54878000	
Adjusted R-squared	0.929054	S.D. dependent var	5217592.	
S.E. of regression	1389739.	Akaike info criterion	31.41084	
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	31.59239	
Log likelihood	-151.0542	Hannan-Quinn criter.	31.21168	
F-statistic	24.57149	Durbin-Watson stat	2.152812	
Prob(F-statistic)	0.004213			

Dari hasil regresi kedua diatas, setelah menghapus satu variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan menambahkan “Logaritma Natural”, ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi ditemukan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang seharusnya jika Penduduk Kelas Menengah naik maka Lulusan Perguruan Tinggi, Upah Minimum Provinsi, dan Investasi. Hasil regresi juga menghasilkan nilai *R-squared* yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.968469, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

**Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi**

Variabel	<i>OLS (Ordinary Least Square)</i>	
	Model sebelum penghapusan variabel & Logaritma	Model setelah penghapusan variabel & Logaritma
PE	0.06569 (-14102.40)	-
TKF	0.7534 (-14102.40)	0.0430 (2.14E+09)
LPT	0.9565 (-944.5967)	0.1095 (7.42E+09)
UMP	0.7460 (13.00028)	0.0264 (79476543)
INV	0.3332 (-4389.296)	0.1062 (3365.573)
JP	0.2480 (-1016.241)	0.0696 (-823.6745)
Konstanta	(1.77E+09)	(1.28E+11)
<i>Number of Obs</i>	10	10
<i>Adj. R-Squared</i>	0.908338	0.929054
<i>R (Correlation)</i>	90.83	96.84
Uji F	4.954826 (0.108495)	24.57149 (0.0004213)
<i>Durbin Watson</i>	1.558697	2.152812

## 1. Penaksiran

### a. Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.968469, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV), dan Jumlah Pengangguran (JP) terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM) menggambarkan hubungan yang sangat erat.

### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (*R-Squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum

Provinsi (UMP), Investasi (INV), dan Jumlah Pengangguran (JP) terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM) Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai *R-Squared* sebesar 0.968468, artinya kontribusi sebesar 96,84%. Sedangkan sisanya sebesar 0,05% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

## 2. Test Diagnostic

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$PKMt = \beta_0 + \beta_1TKF + \beta_2LPT + \beta_3UMP + \beta_4INV + \beta_5JP + \epsilon_t$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$PKMt = 1.28E+11 + (2.14E+09) TKF_t + (7.42E+09) LPT_t + (79476543) UMP_t + (3365.573) INV_t + (-823.6745) JP_t + \epsilon_t$$

Koefisien  $\beta_0 = 1.28E+11$  Jiwa, artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV), dan Jumlah Pengangguran (JP) turun maka Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan naik sebesar 1.28E+11 Jiwa dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0635 ( $\alpha > 15\%$ ) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi tingkat Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan bertambah sebesar 1.28E+11 Jiwa jika menambahkan variabel bebas diatas.

Koefisien  $\beta_1 = 2.14E+09$ , artinya jika Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF) naik diperkirakan Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan naik sebesar 2.14E+09 Jiwa, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0430 ( $\alpha < 15\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Jumlah Tenaga Kerja Formal berpengaruh secara

signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah.

Koefisien  $\beta_2 = 7.42E+09$ , artinya jika Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT) naik diperkirakan Jumlah Penduduk Kelas Menengah naik sebesar  $7.42E+09$  Jiwa, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.1095 ( $\alpha = 15\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa Presentase Lulusan Perguruan Tinggi berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah

Koefisien  $\beta_3 = 79476543$ , artinya jika Upah Minimum Provinsi naik diperkirakan Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan naik sebesar 79476543 Jiwa, dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0264 ( $\alpha < 15\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Upah Minimum Provinsi berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah.

Koefisien  $\beta_4 = 3365.573$ , artinya jika Investasi (INV) naik diperkirakan Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan naik sebesar 3365.573 Jiwa. Jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.1062 ( $\alpha < 15\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah.

Koefisien  $\beta_5 = -823.6745$ , artinya jika Jumlah Pengangguran (JP) naik diperkirakan Jumlah Penduduk Kelas Menengah akan turun sebesar -823.6745 Jiwa. Dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0696 ( $\alpha < 15\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Jumlah Pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah.

### 3. Pengujian (*Test Diagnostic*)

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t statistik dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat.

**Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

R-squared	0.968469	Mean dependent var	54878000
Adjusted R-squared	0.929054	S.D. dependent var	5217592.
S.E. of regression	1389739.	Akaike info criterion	31.41084
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	31.59239
Log likelihood	-151.0542	Hannan-Quinn criter.	31.21168
F-statistic	24.57149	Durbin-Watson stat	2.152812
Prob(F-statistic)	0.004213		

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Rumus  $t_{hitung}$  sebagai berikut:

$$th = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

$\beta_i$  : Koefisien regresi variabel

$Se \beta_i$  : Standar eror dari masing-masing koefisien

Jika di masukkan nilai setiap koefisien ke dalam rumus tersebut maka menjadi sebagai berikut:

a. Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF)

$$th = \frac{2.14E + 09}{7.31E + 08} = 2.925922$$

b. Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT)

$$th = \frac{7.42E+09}{3.62E+09} = 2.051279$$

c. Upah Minium Provinsi (UMP)

$$th = \frac{79476543}{23123847} = 3.436995$$

d. Investasi (INV)

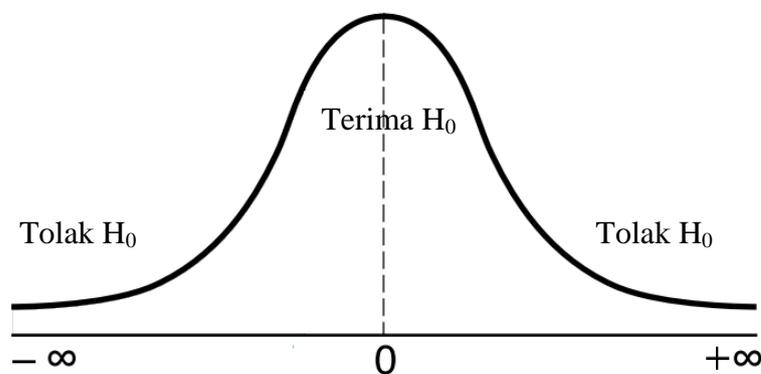
$$th = \frac{3365.573}{1619.339} = 2.078362$$

e. Jumlah Pengangguran (JP)

$$th = \frac{-823.6745}{334.7109} = -2.460854$$

Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari  $df = (n-k) = 10 - 6 = 4$  dengan  $(\alpha = 10\%/2=0.05)$  maka nilai tabel sebesar  $\pm 2.132$ .

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 9 Uji Parsial Distribusi Normal Kurval t**

### **Kesimpulan**

- a.  $t_{hitung}$  Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF) 2.925922, berada di diluar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-2.132 < 2.925922 < 2.132$  maka tolak  $H_0$  atau tolak  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan antara jumlah tenaga kerja formal terhadap jumlah penduduk kelas menengah.

- b.  $t_{hitung}$  Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT) 2.051279 , berada di diluar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-2.132 < 2.051279 < 2.132$  maka terima  $H_0$  atau tolak  $H_1$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara presentase lulusan perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk kelas menengah. Namun, dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan nilai probabilitas 0.1095 ( $\alpha = 15\%$ ).
- c.  $t_{hitung}$  Upah Minimum Provinsi (UMP) 3.436995, berada di diluar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-2.132 < 3.436995 > 2.132$  maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan antara upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk kelas menengah.
- d.  $t_{hitung}$  Investasi (INV) 2.078362, berada di diluar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-2.132 < 2.078362 > 2.132$  maka terima  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara investasi terhadap jumlah penduduk kelas menengah. Namun, dari hasil olahan menyatakan signifikan dengan nilai probabilitas 0.1062 ( $\alpha = 15\%$ ).
- e.  $t_{hitung}$  Jumlah Pengangguran (JP)  $-2.460854$ , berada di diluar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-2.132 < -2.460854 < 2.132$  maka terima  $H_0$  atau tolak  $H_1$  artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk kelas menengah.

### c. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

R-squared	0.968469	Mean dependent var	54878000
Adjusted R-squared	0.929054	S.D. dependent var	5217592.
S.E. of regression	1389739.	Akaike info criterion	31.41084
Sum squared resid	7.73E+12	Schwarz criterion	31.59239
Log likelihood	-151.0542	Hannan-Quinn criter.	31.21168
F-statistic	24.57149	Durbin-Watson stat	2.152812
Prob(F-statistic)	0.004213		

**Tabel 4. 11 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

*Sumber: Eviews 12, diolah 2025*

Dimana rumus mencari  $F_{hitung}$  adalah: 
$$F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

$F_{hitung}$  adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{0.968469}{6} - 1}{\frac{1 - 0.968469}{10 - 6}} = 24.57149$$

Dari hasil regresi didapati variable Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV) dan Jumlah Pengangguran (JP) dalam menjelaskan variabel terikat Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.004213

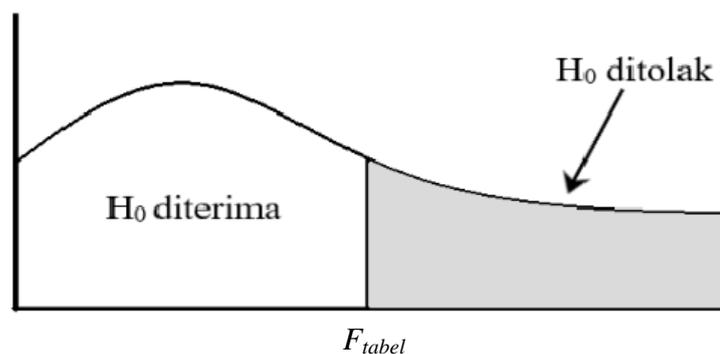
Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan  $F_{tabel} = (\alpha; df1 = k-1; df2 = n-k)$  maka  $F_{tabel} = (10\%; df1=6-1; df2=10-6) = (0.1; 5; 4)$  dengan demikian nilai  $F_{tabel}$  adalah

15.522.

**Kriteria uji:**

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ , atau dalam distribusi kurva

F dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 10 Uji Simultan (F) Distribusi Normal Kurva F**

Kesimpulan yaitu  $24.57149 < 15.522$  berarti terima  $H_0$  atau tolak  $H_1$ , sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang secara serentak signifikan pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun, jika dilihat dari olahan *Eviews*, nilai probabilitasnya 0.004213 atau berada pada alpha 1% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan yang secara serentak antara variabel Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKF), Presentase Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV) dan Jumlah Pengangguran (JP) terhadap variabel terikat Jumlah Penduduk Kelas Menengah (PKM).

## E. Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. 12 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variance Inflation Factors			
Date: 04/27/25 Time: 20:21			
Sample: 2015 2024			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.52E+21	1.31E+10	NA
LOG(TKF)	5.35E+17	5.03E+08	1.536261
LOG(LPT)	1.31E+19	1.24E+10	137.7110
LOG(UMP)	5.35E+14	599097.7	77.58193
INV	2622258.	343.6535	16.78684
JP	112031.4	224.0045	3.386603

Salah satu cara untuk melihat adanya atau tidak multikolinearitas pada suatu model regresi ialah dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan terbebas dari masalah multikolinearitas jika  $VIF < 10$ . Dari hasil uji diatas Tenaga Kerja Formal (TKF) dan Jumlah Pengangguran (JP) berada dibawah 10 yang berarti bahwa variabel tersebut tidak terjadi masalah multikolinearitas. Namun, terdapat tiga variabel yang terjadi masalah multikolinearitas yaitu variable Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Investasi (INV) dengan angka diatas 10. Maka dilakukan perbaikan multikolinearitas pada kedua variabel tersebut dengan melakukan transformasi variabel  $RGDP = INV/UMP/LPT$ . Selanjutnya, akan digunakan variabel hasil transformasi yakni RGDP untuk menggantikan kedua variabel yang terdeteksi multikolinearitas. Perbaikan uji multikolinearitas dapat dilihat pada

table 4.13 dibawah ini.

**Tabel 4. 13 Perbaikan Uji Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors  
Date: 04/27/25 Time: 20:15  
Sample: 2015 2024  
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.21E+18	2736730.	NA
TKF	2403271.	2720833.	1.509497
JP	139414.6	121.3369	1.834430
RGDP	5.65E+30	92.59344	1.267558

## 2) Uji Heterokedastisitas

**Tabel 4. 14 Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey  
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	3.827272	Prob. F(5,4)	0.1089
Obs*R-squared	8.271120	Prob. Chi-Square(5)	0.1419
Scaled explained SS	0.972803	Prob. Chi-Square(5)	0.9647

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai *p value* yang ditunjukkan dengan nilai Prob. Chi Square (5) pada *Obs\*R-Squared* yaitu sebesar 0.9980. Oleh karena itu *p value*  $0.1419 > 0.05$  maka hal ini menunjukkan tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

## 3) Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  
 Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.371507	Prob. F(2,2)	0.4217
Obs*R-squared	5.783273	Prob. Chi-Square(2)	0.0555

**Tabel 4. 15 Uji Autokorelasi**

Berdasarkan hasil pengujian diatas nilai *p value* yang ditunjukkan oleh nilai Prob. Chi Square (1) pada Obs\*R-squared yaitu sebesar 0.0555. Nilai tersebut menunjukkan tidak terjadinya masalah autokorelasi dikarenakan  $0.0555 < 0.05$ , yang dimana nilai tersebut lebih besar daripada derajat kesalahannya. Selain itu pengujian juga dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson sebesar 2.152812, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi

#### **4.5 Analisa Model Ekonometrika untuk Mengetahui Faktor-**

##### **Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

#### **4.5.1 Statistik Deskriptif Faktor-Faktor yang Mempengaruhi**

##### **Pertumbuhan Ekonomi**

Statistik deskriptif adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Penyajian ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut

	PE	TKK	INV	LPPDRB	TPT	JAK	INF
Mean	335400.7	723851.4	14454.37	3.772749	5.101930	4025444.	15876.18
Median	142339.2	726195.0	6901.000	4.480000	4.740000	2196250.	13131.00
Maximum	2050473.	740808.0	95202.10	22.94000	10.95000	25578174	42521.00
Minimum	0.000000	704645.0	152.5000	-15.74000	0.000000	0.000000	3674.000
Std. Dev.	477505.5	10307.81	19097.02	4.183059	1.838357	5775352.	10097.30
Skewness	2.234848	-0.403461	2.188830	0.293846	0.637419	2.603581	0.936842
Kurtosis	6.944588	2.010637	7.636232	9.501336	4.147172	8.682679	3.197276
Jarque-Bera	253.2079	11.61349	289.6922	303.6159	20.95615	423.2776	25.29097
Probability	0.000000	0.003007	0.000000	0.000000	0.000028	0.000000	0.000003
Sum	57353513	1.24E+08	2471698.	645.1400	872.4300	6.88E+08	2714827.
Sum Sq. Dev.	3.88E+13	1.81E+10	6.20E+10	2974.656	574.5249	5.67E+15	1.73E+10
Observations	171	171	171	171	171	171	171

**Tabel 4. 16 Statistik Deskriptif Model**

*Sumber: Eviews 12, diolah 2025*

Data penaksiran di atas menampilkan ringkasan statistik deskriptif untuk tujuh variabel, yang diantaranya terdapat satu variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE). Terdapat juga enam variabel bebas yaitu: Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), Investasi (INV), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Jumlah Angkatan Kerja (JAK), dan Infrastruktur (INF).

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing bagian dari data ini:

a. *Mean* (Rata-rata)

PE : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi adalah 335400.7%

TKK : Rata-rata Tingkat Kesempatan Kerja adalah 73851.4%

INV : Rata-rata Investasi adalah 14454.37 Milyar

LPPDRB : Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB adalah 3.772749%

TPT : Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 5.101930%

JAK : Rata-rata jumlah Angkatan kerja adalah 0.081412%

INF : Rata-rata Infrastruktur adalah 15876.18 km

b. *Median* (Nilai Tengah)

PE : Median Pertumbuhan Ekonomi adalah 142339.2%

TKK	: Median Tingkat Kesempatan Kerja adalah 726195.0%
INV	: Median Investasi adalah 6901.000 Milyar
LPPDRB	: Median Laju Pertumbuhan PDRB adalah 4.480000%
TPT	: Median Tingkat Pengganguran Terbuka adalah 4.740000%
JAK	: Median jumlah Angkatan kerja adalah 2196250%
INF	: Median Infrastruktur adalah 13131.00 km

c. *Maximum (Maksimum)*

PE	: Maksimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 2050473%
TKK	: Maksimum Tingkat Kesempatan Kerja adalah 740808.0%
INV	: Maksimum Investasi adalah 95202.10 Milyar
LPPDRB	: Maksimum Laju Pertumbuhan PDRB adalah 22.940000%
TPT	: Maksimum Tingkat Pengganguran Terbuka adalah 10.950000%
JAK	: Maksimum jumlah Angkatan kerja adalah 25578174%
INF	: Maksimum Infrastruktur adalah 42521.00 km

d. *Minimum*

PE	: Minimum Pertumbuhan Ekonomi adalah 0.000000%
TKK	: Minimum Tingkat Kesempatan Kerja adalah 704645.0%
INV	: Minimum Investasi adalah 152.50000 Milyar
LPPDRB	: Minimum Laju Pertumbuhan PDRB adalah -15.740000%
TPT	: Minimum Tingkat Pengganguran Terbuka adalah 0.000000%
JAK	: Minimum jumlah angkatan kerja adalah 0.000000%
INF	: Minimum Infrastruktur adalah 3674.000 km

d. *Standar Deviasi*

PE	: Standar Deviasi Pertumbuhan Ekonomi adalah 477505.5%
TKK	: Standar Deviasi Tingkat Kesempatan Kerja adalah 10307.81%

INV	: Standar Deviasi Investasi adalah 19097.02 Milyar
LPPDRB	: Standar Deviasi Laju Pertumbuhan PDRB adalah 4.183059 %
TPT	: Standar Deviasi Tingkat Pengangguran Terbuka adalah 1.838357%
JAK	: Standar Deviasi jumlah angkatan kerja adalah 57755352.%
INF	: Standar Deviasi Infrastruktur adalah 10097.30 km

#### Kesimpulan:

Data ini memberikan gambaran statistik umum dari variabel-variabel yang diteliti. Secara umum, variabel-variabel ini menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan variabilitas yang terukur. Hasil ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti regresi, untuk melihat hubungan antara variabel-variabel ini.

### 4.5.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4. 17 Hasil Olahan Regresi Linier Berganda**

Dependent Variable: PE				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/19/25 Time: 19:58				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 36				
Total panel (unbalanced) observations: 171				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	710255.2	238429.0	2.978896	0.0035
TKK	-0.542382	0.324218	-1.672895	0.0968
INV	3.154813	0.263761	11.96089	0.0000
LPPDRB	1063.474	508.1111	2.092995	0.0383
TPT	-6353.167	2613.094	-2.431281	0.0164
JAK	0.002177	0.000570	3.817812	0.0002
INF	-0.517363	1.642900	-0.314909	0.7533
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998836	Mean dependent var	335400.7	
Adjusted R-squared	0.998467	S.D. dependent var	477505.5	
S.E. of regression	18698.33	Akaike info criterion	22.71963	
Sum squared resid	4.51E+10	Schwarz criterion	23.49127	
Log likelihood	-1900.529	Hannan-Quinn criter.	23.03273	
F-statistic	2700.915	Durbin-Watson stat	1.495672	
Prob(F-statistic)	0.000000			

*Sumber: Eviews 12 dan diolah 2025*

Dari hasil regresi pertama diatas, ditemukan masalah bahwa terdapat satu variabel bebas yaitu variabel Infrastruktur (INF) tidak berpengaruh signifikan ( $\alpha > 0,15$ ) dan terdapat satu variabel bebas yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang tidak sesuai dengan hipotesis yang seharusnya jika Pertumbuhan Ekonomi naik maka Tingkat Kesempatan Kerja seharusnya meningkat. Oleh karena itu, peneliti menghapus dua variabel bebas Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Infrastruktur (INF). Maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 18 Hasil Regresi Setelah Menghapus Variabel TKK dan INF**

Dependent Variable: PE				
Method: Panel Least Squares				
Date: 04/19/25 Time: 20:33				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 38				
Total panel (balanced) observations: 190				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	277186.9	13411.92	20.66721	0.0000
INV	3.164165	0.246842	12.81856	0.0000
LPPDRB	988.8026	468.8368	2.109055	0.0366
TPT	-5979.809	2422.894	-2.468044	0.0147
JAK	0.002208	0.000539	4.097540	0.0001
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998862	Mean dependent var	302202.6	
Adjusted R-squared	0.998546	S.D. dependent var	463769.8	
S.E. of regression	17681.37	Akaike info criterion	22.59070	
Sum squared resid	4.63E+10	Schwarz criterion	23.30847	
Log likelihood	-2104.117	Hannan-Quinn criter.	22.88146	
F-statistic	3167.792	Durbin-Watson stat	1.433891	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari hasil regresi kedua diatas, setelah menghapus dua variabel bebas Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Infrastruktur (INF), ditemukan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang seharusnya jika Pertumbuhan Ekonomi naik maka Tingkat

Kesempatan Kerja seharusnya meningkat dan ditemukan bahwa variabel bebas yaitu Infrastruktur (INF) yang sebelumnya tidak signifikan menjadi berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE) pada tingkat signifikansi 15% ( $\alpha > 0.15$ ). Hasil regresi juga menghasilkan nilai *R-squared* yang sangat tinggi yaitu sebesar 0.998862, artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Oleh karena itu, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Variabel	OLS ( <i>Ordinary Least Square</i> )	
	Model sebelum Logaritma	Model setelah Penghapusan variabel
TKK	0.0968 (-0.542382)	-
INV	0.0000 (3.154813)	0.000 (3.164165)
LPPDRB	0.0383 (1063.474)	0.0366 (988.8026)
TPT	0.0164 (-6353.167)	0.0147 (-5979.809)
JAK	0.0002 (0.002177)	0.0001 (0.002208)
INF	0.7533 (-0.517363)	
Konstanta	710255.2	277186.9
<i>Number of Obs</i>	5	5
<i>Adj. R-Squared</i>	0.998467	0.998546
<i>R (Correlation)</i>	99.88	99.88
Uji F	2700.915 (0.000000)	3167.792 (0.000000)
<i>Durbin Watson</i>	1.495672	1.433891

**Tabel 4. 19** Ringkasan Hasil Pengolahan Data Model Estimasi

*Sumber: Eviews 12, diolah 2025*

### 1) Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (*R-Squared*) menunjukkan besarnya kontribusi atau proporsi persentase variabel bebas yaitu variabel Prevalensi Investasi (IVF), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT), dan Jumlah Angkatan Kerja (JAK) dalam menjelaskan variabel terikat Pertumbuhan

Ekonomi (PE). Berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai *R-Squared* sebesar 0.998862, artinya kontribusi sebesar 99.88%. Sedangkan sisanya sebesar 0,12% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari model estimasi ini atau berada pada *disturbance error term*.

## 2) Korelasi (R)

Dari hasil regresi diperoleh nilai R sebesar 0.998862, artinya bahwa derajat keeratan antara variabel Prevalensi Investasi (IVF), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Jumlah Angkatan Kerja (JAK) dalam menjelaskan variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi (PE) menggambarkan hubungan yang erat.

## B. Test Diagnostic

Dari hasil regresi diatas maka model ekonometrikanya yaitu:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 INV_{it} + \beta_2 LPPDRB_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 JAK_{it} + \epsilon_{it}$$

Interpretasi hasil model sebagai berikut:

$$PE_{it} = 277186.9 + (3.164165) INV_{it} + (988.8026) LPPDRB_{it} + (-5979.809) TPT_{it} + (0.002208) JAK_{it} + \epsilon_{it}$$

Koefisien  $\beta_0 = 277186.9$ , artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa jika variabel Prevalensi Investasi (IVF), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Jumlah Angkatan Kerja (JAK) naik maka Pertumbuhan Ekonomi akan naik sebesar 277186.9% dan jika dilihat dari hasil olahan diketahui nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 ( $\alpha < 1\%$ ) yang berarti signifikan. Artinya dapat disimpulkan bahwa benar jika prediksi Nilai Anggaran Kesehatan akan bertambah sebesar 277186.9% jika menambahkan variabel bebas diatas.

Koefisien  $\beta_1 = 3.164165$ , artinya jika Prevalensi Pneumonia pada Balita naik diperkirakan nilai anggaran kesehatan akan naik sebesar 3.164165% dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000 ( $\alpha < 1\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Investasi berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien  $\beta_2 = 988.8026$  artinya jika Jumlah Penduduk naik diperkirakan nilai anggaran kesehatan akan meningkat 988.8026% dan Jika dilihat dari hasil olahan diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya 0.0366 ( $\alpha < 1\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Laju Pertumbuhan PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap nilai Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien  $\beta_3 = -5979.809$ , artinya jika Angka Kematian Ibu turun diperkirakan nilai anggaran kesehatan akan menurun sebesar -5979.809% dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0147 ( $\alpha < 1\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Tingkat Pengganguran Terbuka berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Koefisien  $\beta_4 = 0.002208$ , artinya jika PDRB per Kapita naik diperkirakan nilai anggaran kesehatan akan naik sebesar 0.002208% dan jika dilihat dari hasil olahan data diatas ternyata signifikan dikarenakan nilai probabilitasnya sebesar 0.0001 ( $\alpha < 1\%$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa benar Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

#### **D. Uji Statistik**

##### **1. Uji Parsial (Uji-t)**

Uji-t statistik bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual atau masing-masing dalam menjelaskan variabel terikat.

**Tabel 4. 20 Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	277186.9	13411.92	20.66721	0.0000
INV	3.164165	0.246842	12.81856	0.0000
LPPDRB	988.8026	468.8368	2.109055	0.0366
TPT	-5979.809	2422.894	-2.468044	0.0147
JAK	0.002208	0.000539	4.097540	0.0001

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Rumus  $t_{hitung}$  sebagai berikut:

$$th = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Dimana:

$\beta_i$  : Koefisien regresi variabel

$Se \beta_i$  : Standar eror dari masing-masing koefisien

Jika di masukkan nilai setiap koefisien ke dalam rumus tersebut maka menjadi sebagai berikut:

a. Investasi (INV)

$$th = \frac{3.164165}{0.246842} = 12.81856$$

b. Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB)

$$th = \frac{988.8026}{468.8368} = 2.109055$$

c. Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT)

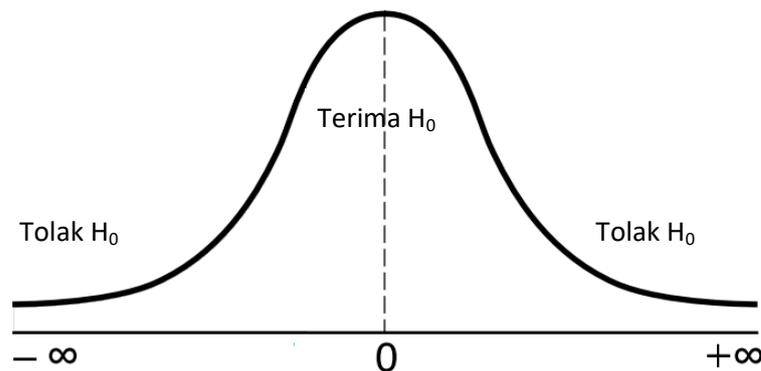
$$th = \frac{-5979.809}{2422.894} = -2.468044$$

d. Jumlah Angkatan Kerja (JAK)

$$th = \frac{0.002208}{0.000539} = 4.097540$$

Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai tabel dengan cara mencari  $df = (n-k) = 190 - 5 = 185$  dengan  $(\alpha = 10\%/2=0.05)$  maka nilai tabel sebesar  $\pm 1.65333$ .

Terima  $H_0$  jika  $-t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$  atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 4. 11 Hasil Uji Parsial Distribusi Kurva Normal t**

### **Kesimpulan**

- 1)  $t_{hitung}$  Investasi (INV) 12.81856, berada di luar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-1.65333 < 12.81856 > 1.65333$  maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan antara Investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2)  $t_{hitung}$  Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB) 2.109055, berada di luar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-1.65333 < 2.109055 > 1.65333$  maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 3)  $t_{hitung}$  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  $-2.468044$ , berada di luar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-1.65333 > -2.468044 < 1.65333$

maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan Tingkat Pengganguran Terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi.

- 4)  $t_{hitung}$  Jumlah Angkatan Kerja 4.097540 , berada di luar  $\pm t_{tabel}$  atau dalam kriteria uji  $-1.65333 < 4.097540 > 1.65333$  maka tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$  artinya ada hubungan yang signifikan Jumlah Angkatan Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2. Uji Simultan (Uji-f)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk pengujian signifikansi semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

R-squared	0.998862	Mean dependent var	302202.6
Adjusted R-squared	0.998546	S.D. dependent var	463769.8
S.E. of regression	17681.37	Akaike info criterion	22.59070
Sum squared resid	4.63E+10	Schwarz criterion	23.30847
Log likelihood	-2104.117	Hannan-Quinn criter.	22.88146
F-statistic	3167.792	Durbin-Watson stat	1.433891
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Tabel 4. 21 Hasil Uji Simultan (Uji F)**

*Sumber: Eviews 12, diolah 2025*

Dimana rumus mencari  $F_{hitung}$  adalah:  $F = \frac{R^2/K-1}{(1-R^2)/(n-k)}$

Dimana:

k = Jumlah parameter yang diestimasi

n = Jumlah data yang di observasi

$F_{hitung}$  adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{\frac{0.998862-1}{4}}{\frac{1-0.998862}{190-4}} = 3167.792$$

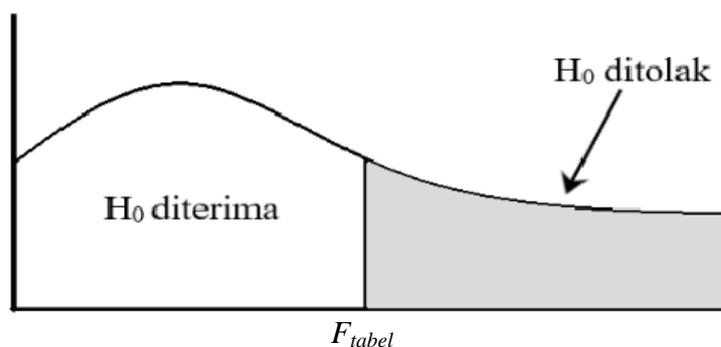
Dari hasil regresi didapat variable Prevalensi Investasi (IVF), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT), dan

Jumlah Angkatan Kerja (JAK) dalam menjelaskan variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000000.

Nilai  $F_{hitung}$  akan dibandingkan dengan  $F_{tabel} = (α; df1 = k-1; df2 = n-k)$  maka  $F_{tabel} = (10%; df1=5-1; df2=190-5) = (0.1; 4; 185)$  dengan demikian nilai  $F_{tabel}$  adalah 3.319.

#### Kriteria uji:

Terima  $H_0$  jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , hal lain tolak  $H_0$ , atau dalam distribusi kurva F dapat digambarkan sebagai berikut



**Gambar 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F) Distribusi Kurva F**

Kesimpulan yaitu  $3167.792 > 3.319$  berarti tolak  $H_0$  atau terima  $H_1$ , sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang secara serentak signifikan pada semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Begitupun, jika dilihat dari olahan *Eviews*, nilai probabilitasnya 0.000000 atau berada pada alpha 1% yang berarti signifikan. Sehingga ada hubungan yang secara serentak antara variabel

Prevalensi Prevalensi Investasi (IVF), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Jumlah Angkatan Kerja (JAK) dalam menjelaskan variabel terikat Pertumbuhan Ekonomi (PE).

## E. Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Multikolinearitas

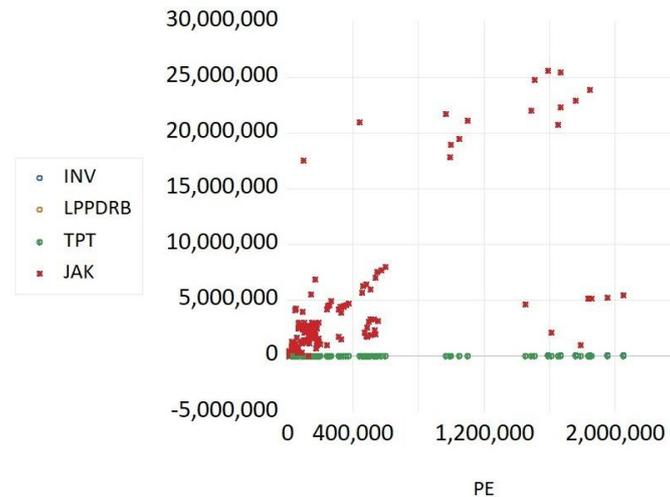
**Tabel 4. 22 Hasil Uji Multikolinearitas**

	PE	INV	LPPDRB	TPT	JAK
	PE	INV	LPPDRB	TPT	JAK
PE	1.000000	0.922953	0.011969	0.465697	0.710178
INV	0.922953	1.000000	0.036350	0.465139	0.649977
LPPDRB	0.011969	0.036350	1.000000	-0.035838	-0.001375
TPT	0.465697	0.465139	-0.035838	1.000000	0.356750
JAK	0.710178	0.649977	-0.001375	0.356750	1.000000

Koefisien korelasi INV, LPPDRB, TPT, JAK memiliki nilai yang kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikoliniertas.

### 2) Uji Heterokedastisidas

Uji heterokedastisidas bertujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisidas dan jika berbeda disebut tidak heterokedastisidas. Model regresi yang baik adalah terbebas dari heterokedastisidas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisidas, dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan rasidualnya. Dasar analisis heterokedastisidas sebagai berikut:



Sumber: Eviews 12, diolah 2025

**Gambar 4. 13 Gambar Scatterplot Model**

Gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara berkelompok, membentuk pola garis lurus walaupun tidak sejajar serta atas, samping, dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas pada model estimasi.

### 3) Uji Auto korelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji digunakan uji statistik *Durbin Watson* yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh.

R-squared	0.998862	Mean dependent var	302202.6
Adjusted R-squared	0.998546	S.D. dependent var	463769.8
S.E. of regression	17681.37	Akaike info criterion	22.59070
Sum squared resid	4.63E+10	Schwarz criterion	23.30847
Log likelihood	-2104.117	Hannan-Quinn criter.	22.88146
F-statistic	3167.792	Durbin-Watson stat	1.433891
Prob(F-statistic)	0.000000		

**Tabel 4. 23 Hasil Uji Auto Korelasi**

Pada model estimasi yang dilakukan dengan uji FEM diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.433891 artinya pada model diduga terkena dari masalah autokorelasi. Dikatakan sudah terkena dari masalah autokorelasi, dimana standar suatu model terdapat masalah autokorelasi apabila D-W yang diperoleh  $1 < 1.43 < 2$ . Peneliti melakukan perbaikan pada model auto korelasi, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 24 Hasil Uji Korelasi Setelah Melakukan Perbaikan**

Dependent Variable: D(PE)  
Method: Panel Least Squares  
Date: 04/20/25 Time: 02:34  
Sample (adjusted): 2020 2023  
Periods included: 4  
Cross-sections included: 38  
Total panel (balanced) observations: 152

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12173.82	13627.03	0.893358	0.3736
INV	1.217443	0.212789	5.721366	0.0000
LPPDRB	1640.013	423.4851	3.872658	0.0002
TPT	-5369.790	2343.069	-2.291777	0.0238
D(JAK)	0.001173	0.000234	5.021610	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.771428	Mean dependent var	9060.810
Adjusted R-squared	0.686233	S.D. dependent var	21480.88
S.E. of regression	12032.49	Akaike info criterion	21.85784
Sum squared resid	1.59E+10	Schwarz criterion	22.69339
Log likelihood	-1619.196	Hannan-Quinn criter.	22.19727
F-statistic	9.054852	Durbin-Watson stat	1.790764
Prob(F-statistic)	0.000000		

Setelah melakukan perbaikan model auto korelasi dengan membuat persamaan dengan metode deferensi, maka diperoleh nilai *Durbin Watson* sebesar 1.790764 artinya pada model sudah terbebas dari masalah autokorelasi. Dikatakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi, dengan melihat melalui table *Durbin Watson* maka diperoleh  $dL > 1.6824$  dan  $dU < 1.7896$  yang berarti hasil D-W yang diperoleh  $1.68 < 1.79 < 1.78$ .

#### 4). Uji Hausman

**Tabel 4. 25 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	325.332106	4	0.0000

Sumber: Eviews 12, diolah 2025

Dari hasil uji *Fixed Effect Model* (FEM) maka diperoleh nilai *time-series random* sebesar 0.0000, nilai *probability*  $< 0.05$  maka model yang dipilih adalah

*fixed effect*, disimpulkan bahwa *fixed effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *random effect*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan signifikan, dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tekanan ekonomi yang serius terhadap kelompok kelas menengah, yang sebelumnya menjadi pendorong utama konsumsi nasional. Sebaliknya, kelompok "menuju kelas menengah" mengalami peningkatan, menandakan besarnya populasi yang masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,11% (yoy), namun mengalami kontraksi 0,83% secara kuartalan. Pertumbuhan didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi, namun daya beli kelas menengah melemah, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan pertumbuhan. Dari sisi ketenagakerjaan, tercatat peningkatan jumlah penduduk usia kerja dan angkatan kerja, namun penciptaan lapangan kerja formal justru menurun drastis. Sektor informal semakin mendominasi, mencapai 59,17% pada tahun 2024. Hal ini berdampak langsung pada kestabilan ekonomi kelas menengah yang umumnya bergantung pada sektor formal. Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka positif, tekanan terhadap kelas menengah,

meningkatnya informalitas, dan perlambatan konsumsi menjadi tantangan struktural yang dapat menghambat pertumbuhan berkelanjutan jika tidak segera ditanggulangi dengan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran.

2. Hasil estimasi model ekonometrika terhadap beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi jumlah penduduk kelas di Indonesia, dimana variabel Jumlah Tenaga Kerja Formal (TKK), Lulusan Perguruan Tinggi (LPT), Upah Minimum Provinsi (UMP), Investasi (INV), dan Jumlah Pengangguran (JP) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Kelas Menengah.
3. Hasil estimasi model ekonometrika terhadap beberapa variabel yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi di Indonesia, dimana variabel Investasi (INV), Laju Pertumbuhan PDRB (LPPDRB), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Jumlah Angkatan Kerja (JAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyusun dan memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kelas menengah terbukti memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui konsumsi domestik dan kontribusi pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan yang berpihak kepada kelompok ini, seperti pemberian insentif pajak yang lebih adil, jaminan sosial berbasis pendapatan, serta program perlindungan ekonomi untuk

mencegah risiko "turun kelas" akibat tekanan ekonomi, seperti inflasi, PHK, atau krisis.

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pekerja di sektor formal mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, sementara sektor informal terus meningkat. Untuk itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penciptaan lapangan kerja yang stabil dan produktif, khususnya di sektor industri, jasa modern, dan digital ekonomi. Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja formal secara signifikan.
3. Pendidikan merupakan salah satu variabel signifikan yang memengaruhi pertumbuhan kelas menengah. Oleh karena itu, perluasan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas harus menjadi prioritas. Selain itu, program pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja harus ditingkatkan agar lulusan siap bersaing dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
4. Untuk merespons cepat dinamika kelas menengah dan kondisi tenaga kerja nasional, pemerintah perlu membangun sistem pemantauan yang komprehensif dan berbasis data mikro. Dengan sistem ini, kebijakan yang disusun akan lebih tepat sasaran, mampu mengidentifikasi kelompok rentan lebih dini, serta mendorong pengambilan keputusan yang responsif terhadap krisis ekonomi yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abul Muamar. (2024). *Menurunnya Jumlah Kelas Menengah dan Apa yang PerDilakukan*. Greennetwork.  
<https://greennetwork.id/ikhtisar/menurunnya-jumlah-kelas-menengah-dan-apa-yang-perlu-dilakukan/>
- Adelman, I., & Morris, C. T. (1967). *Socioeconomic Structure and Economic Growth*. *Stanford University Press*.
- Barro, R. J. (1996). Democracy and Growth. *Journal of Economic Growth*, *1*(1), 1–27.
- Birdsall, N., Graham, C., & Pettinato, S. (2000). Poverty and Inequality in a Globalizing World: How the Rich Get Richer. *The Brookings Institution*.
- Brueckner, M., et al. (2017). The Role of the Middle Class in Economic Development. *World Development*, *92*, 48–65.
- Chun, N., et al. (2011). Middle Class and Economic Development. *Asian Development Bank*.
- Doepke, M., & Zilibotti, F. (2007). The Development of Human Capital: The Role of Family and Society. *American Economic Review*, *97*(1), 1–15.
- Easterly, W. (2001). The Middle Class Consensus and Economic Growth. *World Bank Development Research Group*.
- Evans, G. (2004). Class and Identity: The Role of Social Class in Identity Formation. *Sociological Review*, *52*(2), 195–210.
- Gujarati, D. N. (2016). Basic Econometrics. In *McGraw-Hill Education*.

- Kementerian PPN / Bappenas. (2018). Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Inklusif Bappenas, September*. <http://inkl.usif.bappenas.go.id/>
- Kuncoro, M. (2003). Ekonomi Pembangunan: Teori, Kebijakan, dan Strategi. In *UPP STIM YKPN*.
- Kuznetsova, O., & Tupitsyn, S. (2014). The Role of the Middle Class in Social Stability. *Economic Systems*, 38(3), 355–374.
- Laoli, N. (2024). *Terus Turun, Ini Mayoritas Status Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia*. Nasional.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/terus-turun-ini-mayoritas-status-pekerjaan-kelas-menengah-di-indonesia>
- M Rosseno Aji Nugroho. (2024). *Begini Ngerinya Jika Kelas Menengah Dibiarkan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240909172300-4-570373/begini-ngerinya-jika-kelas-menengah-dibiarkan-jatuh-miskin>
- Mankiw, N. G. (2003). Principles of Economics. In *Cengage Learning*.
- Mankiw, N. G. (2006). Macroeconomics. *Worth Publishers*.
- Muammar Syarif, K. G. (2024). *Jumlah kelas menengah Indonesia turun: sebuah alarm tanda bahaya?* Theconversation. <https://theconversation.com/jumlah-kelas-menengah-indonesia-turun-sebuah-alarm-tanda-bahaya-238690>
- Nanda. (2023). *Kecerdasan Buatan Telah Tiba, Akan Bagaimana Masa Depan Tenaga Kerja Manusia?* Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/nanda285645/6434350f08a8b525b45d86e3/>

kecerdasan-buatan-telah-tiba-akan-bagaimana-masa-depan-tenaga-kerja-manusia?page=2&page\_images=2

Nizar. Muhammad Afdi. (2015). Middle Class and Its Implications for the Indonesian. *Munich Personal RePEc Archive*, 98471, 3. <https://mpa.ub.uni-muenchen.de/98471/>

OECD. (2019). Under Pressure: The Squeezed Middle Class. In *Under Pressure: The Squeezed Middle Class*.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). (2003). The OECD Employment Outlook. *OECD Publishing*.

Putri, A. N. A. (2024). *ALARM TANDA BAHAYA: KELAS MENENGAH TURUNKASTA, KESEJAHTERAAN SIRNA*. KIME FEB UNNES. <https://sites.unnes.ac.id/kimefe/2024/11/alarm-tanda-bahaya-kelas-menengah-turun-kasta-kesejahteraan-sirna/>

Raj M. Desai. (2018). *Fear and Loathing in the Global Middle Class*. Lawfare. <https://www.lawfaremedia.org/article/fear-and-loathing-global-middle-class>

RAKA B. LUBIS. (2024). *Penduduk Indonesia Tembus 281 Juta di 2024*. Goodstats. <https://goodstats.id/infographic/penduduk-indonesia-tembus-281-juta-di-2024-ggjxg>

RANY. (2024). *Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024 cetak rekor*. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/infografik/4093701/pertumbuhan-ekonomi-triwulan-i-2024-cetak-rekor>

Reuters. (2024). *Indonesia's dwindling middle class seen dimming economic outlook*. East Asia. <https://www.voanews.com/a/indonesia-s-dwindling->

[middle-class-seen-dimming-economic-outlook-/7779794.html](http://middle-class-seen-dimming-economic-outlook-/7779794.html)

Setyo Tri Wahyudi. (2020). KONSEP DAN PENERAPAN EKONOMETRIKA MENGGUNAKAN E-VIEWS. In *Rajawali Pers*.

Susilawaty, E. (2018). Ekonomi Pembangunan: Teori dan Aplikasi. In *Rajawali Pers*.

Tiwari, A., & et al. (2016). The Role of the Middle Class in Economic Development. *Journal of Economic Development*, 41(2), 1–20.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development (12th ed.). In *Pearson*.

Van Stel, A. (2005). Entrepreneurship and Economic Growth: The Role of the Middle Class. *Small Business Economics*, 24(2), 195–204.

Wicaksono, A., et al. (2020). Economic Impact of the Middle Class in Indonesia. *Journal of Economic Policy*, 12(1).

## LAMPIRAN

### A. Data Regresi Linear Berganda (Diolah)

#### ➤ Data Regresi *Time Series*

#### Jumlah Penduduk Kelas Menengah di Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	PKM
2015	52.000.000
2016	53.600.000
2017	57.330.000
2018	60.000.000
2019	57.330.000
2020	65.330.000
2021	53.830.000
2022	49.510.000
2023	52.000.000
2024	47.850.000

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

#### Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	PE
2015	4,88
2016	5,03
2017	5,07
2018	5,17
2019	5,02
2020	-2,07
2021	3,69
2022	5,31
2023	5,05
2024	5,11

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

**Tenaga  
Formal di  
Tahun**

Tahun	TKF
2015	42,25
2016	42,40
2017	42,97
2018	43,02
2019	44,12
2020	39,53
2021	40,55
2022	40,69
2023	40,89
2024	42,05

**Kerja  
Indonesia  
2015-2024**

[satudata.kemnaker.go.id](http://satudata.kemnaker.go.id)

**Lulusan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015-2024**

Tahun	LPT
2015	18,46
2016	19,40
2017	21,43
2018	23,29
2019	26,67
2020	28,21
2021	28,75
2022	30,49
2023	31,76
2024	34,09

[www.pddikti.kemdiktisaintek.go.id/](http://www.pddikti.kemdiktisaintek.go.id/)

**Upah Minimum Provinsi Indonesia Tahun 2015-2024**

Tahun	UMP
2015	1.790.342
2016	1.997.819

2017	2.142.855
2018	2.268.874
2019	2.455.662
2020	2.672.371
2021	2.687.723
2022	2.729.463
2023	2.923.309
2024	3.113.359

[satudata.kemnaker.go.id](http://satudata.kemnaker.go.id)

#### Investasi Indonesia PMA+PMDN di Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	INV
2015	5.454
2016	6.128
2017	6.928
2018	7.213
2019	8.096
2020	8.861
2021	9.913
2022	11.283
2023	12.941
2024	15.000

[www.bkpm.go.id/id/home](http://www.bkpm.go.id/id/home)

#### Jumlah Pengangguran di Indonesia Tahun 2015-2024

Tahun	JP
2015	7.240.000
2016	7,030.000
2017	7,040.000
2018	7,040.000
2019	7,050.000
2020	9,770.000
2021	9,100.000
2022	8,400.000
2023	7,990.000
2024	7,470.000

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

#### ➤ Data Regresi Panel

#### Pertumbuhan Ekonomi per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi			Tahun		
----------	--	--	-------	--	--

	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	132070	131581	135274	140972	146932
SUMATERA UTARA	539514	533746	547652	573529	602236
SUMATERA BARAT	172206	169427	175000	182628	191071
RIAU	495607	489996	506472	529533	551828
JAMBI	149111	148354	153851	161732	169278
SUMATERA SELATAN	315465	315129	326405	343504	360967
BENGKULU	46345	46338	47854	49916	52052
LAMPUNG	244378	240320	246966	257534	269241
KEP. BANGKA BELITUNG	53942	52706	55370	57804	60337
KEP. RIAU	181878	174959	180952	190111	199913
DKI JAKARTA	1836241	1792291	1856001	1953489	2050473
JAWA BARAT	1490960	1453381	1507746	1589985	1669421
JAWA TENGAH	991517	965227	997321	1050278	1102474
DI YOGYAKARTA	104485	101699	107373	112901	118626
JAWA TIMUR	1649896	1611393	1668754	1757875	1844809
BANTEN	456620	441149	460953	484129	507426
BALI	162693	147499	143872	150831	159448
NUSA TENGGARA BARAT	93872	93289	95438	102074	103906
NUSA TENGGARA TIMUR	69389	68810	70541	72711	75235
KALIMANTAN BARAT	137243	134743	141212	148369	154981
KALIMANTAN TENGAH	100349	98934	102481	109095	113612
KALIMANTAN SELATAN	133284	130864	135425	142339	149226
KALIMANTAN TIMUR	486523	472393	484440	506159	537630
KALIMANTAN UTARA	61418	60746	63168	66528	69817
SULAWESI UTARA	89009	88126	91791	96768	102070
SULAWESI TENGAH	127935	134153	149816	172625	193181
SULAWESI SELATAN	330506	328155	343395	360913	377208
SULAWESI TENGGARA	94054	93446	97275	102656	108153
GORONTALO	28430	28425	29108	30282	31644
SULAWESI BARAT	32844	32074	32898	33643	35403
MALUKU	31049	30766	31881	33575	35323
MALUKU UTARA	26598	28031	32739	40248	48495
PAPUA BARAT	62075	61604	61289	62531	64975
PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	0
PAPUA	134566	137787	158675	172907	181927
PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0

PAPUA TENGAH	0	0	0	0	0
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### Tingkat Kesempatan Kerja per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	95.03	94.84	94.87	94.95	95.02
SUMATERA UTARA	94.80	94.75	94.77	94.79	94.82
SUMATERA BARAT	94.93	94.89	94.91	94.93	94.96
RIAU	95.18	95.14	95.17	95.19	95.23
JAMBI	94.42	94.40	94.42	94.44	94.48
SUMATERA SELATAN	94.96	94.90	94.92	94.94	94.47
BENGKULU	94.79	94.50	94.52	94.55	94.60
LAMPUNG	94.35	94.30	94.32	94.34	94.38
KEP. BANGKA BELITUNG	94.99	94.96	94.98	94.78	95.05
KEP. RIAU	95.35	95.32	95.35	95.37	95.40
DKI JAKARTA	97.29	97.30	97.32	97.34	97.36
JAWA BARAT	94.96	94.92	94.94	94.97	95.00
JAWA TENGAH	94.79	94.75	94.77	94.80	94.85
DI YOGYAKARTA	96.49	96.52	96.53	96.55	96.58
JAWA TIMUR	94.83	94.79	94.81	94.83	94.87
BANTEN	95.45	95.30	95.11	95.35	95.40
BALI	96.67	96.70	96.73	96.75	96.80
NUSA TENGGARA BARAT	94.08	94.02	95.01	94.08	94.12
NUSA TENGGARA TIMUR	94.33	94.30	94.32	94.35	94.38
KALIMANTAN BARAT	95.08	95.04	95.06	95.09	95.12
KALIMANTAN TENGAH	95.01	94.98	95.00	95.02	95.05
KALIMANTAN SELATAN	94.99	94.96	94.98	95.00	95.05
KALIMANTAN TIMUR	92.00	94.79	93.20	93.20	92.24
KALIMANTAN UTARA	95.12	95.09	95.10	95.12	95.15
SULAWESI UTARA	94.12	94.08	94.10	94.12	94.12
SULAWESI TENGAH	93.83	93.78	93.80	93.82	93.86
SULAWESI SELATAN	94.29	94.24	94.26	92.80	94.92
SULAWESI TENGGARA	94.14	94.11	94.13	94.15	94.18

<b>GORONTALO</b>	<b>93.71</b>	<b>93.65</b>	<b>93.68</b>	<b>93.70</b>	<b>93.75</b>
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>93.96</b>	<b>93.91</b>	<b>93.94</b>	<b>93.97</b>	<b>95.24</b>
<b>MALUKU</b>	<b>93.68</b>	<b>93.62</b>	<b>93.60</b>	<b>93.68</b>	<b>94.13</b>
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>92.00</b>	<b>92.02</b>	<b>92.22</b>	<b>93.65</b>	<b>92.45</b>
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>94.02</b>	<b>93.97</b>	<b>93.99</b>	<b>94.01</b>	<b>0</b>
<b>PAPUA BARAT DAYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PAPUA</b>	<b>93.56</b>	<b>93.52</b>	<b>93.54</b>	<b>93.56</b>	<b>94.56</b>
<b>PAPUA SELATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.28</b>
<b>PAPUA TENGAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.23</b>
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### Investasi PMA per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>ACEH</b>	<b>3607</b>	<b>8241</b>	<b>7905</b>	<b>4424</b>	<b>8883</b>
<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>19749</b>	<b>18190</b>	<b>18485</b>	<b>22789</b>	<b>21574</b>
<b>SUMATERA BARAT</b>	<b>3027</b>	<b>3106</b>	<b>4184</b>	<b>2560</b>	<b>4488</b>
<b>RIAU</b>	<b>26292</b>	<b>34118</b>	<b>24998</b>	<b>43062</b>	<b>48243</b>
<b>JAMBI</b>	<b>4437</b>	<b>3512</b>	<b>6204</b>	<b>8883</b>	<b>8939</b>
<b>SUMATERA SELATAN</b>	<b>16921</b>	<b>15825</b>	<b>16267</b>	<b>23526</b>	<b>25602</b>
<b>BENGGKULU</b>	<b>5458</b>	<b>5399</b>	<b>4924</b>	<b>6957</b>	<b>7219</b>
<b>LAMPUNG</b>	<b>2429</b>	<b>7121</b>	<b>10513</b>	<b>5809</b>	<b>7626</b>
<b>KEP. BANGKA BELITUNG</b>	<b>2915</b>	<b>1864</b>	<b>3677</b>	<b>6309</b>	<b>7961</b>
<b>KEP. RIAU</b>	<b>5656</b>	<b>14249</b>	<b>9769</b>	<b>4817</b>	<b>8857</b>
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>62095</b>	<b>42955</b>	<b>54708</b>	<b>89224</b>	<b>95202</b>
<b>JAWA BARAT</b>	<b>49284</b>	<b>51401</b>	<b>59949</b>	<b>80808</b>	<b>88013</b>
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>18655</b>	<b>30606</b>	<b>31311</b>	<b>24992</b>	<b>32987</b>
<b>DI YOGYAKARTA</b>	<b>6299</b>	<b>2683</b>	<b>2761</b>	<b>2275</b>	<b>5016</b>
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>45453</b>	<b>55661</b>	<b>52552</b>	<b>65356</b>	<b>74937</b>
<b>BANTEN</b>	<b>20708</b>	<b>31146</b>	<b>25990</b>	<b>31284</b>	<b>37972</b>
<b>BALI</b>	<b>7393</b>	<b>5433</b>	<b>6355</b>	<b>6002</b>	<b>6951</b>
<b>NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>3519</b>	<b>6582</b>	<b>9091</b>	<b>11032</b>	<b>30766</b>
<b>NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>3753</b>	<b>3029</b>	<b>3743</b>	<b>3459</b>	<b>3407</b>
<b>KALIMANTAN BARAT</b>	<b>7699</b>	<b>9257</b>	<b>10773</b>	<b>9383</b>	<b>14892</b>
<b>KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>8592</b>	<b>3710</b>	<b>6360</b>	<b>6557</b>	<b>8780</b>

KALIMANTAN SELATAN	10061	4286	11004	12310	14909
KALIMANTAN TIMUR	21952	25934	30297	39596	52172
KALIMANTAN UTARA	4401	2235	3793	7526	8199
SULAWESI UTARA	8260	3006	3480	5042	7698
SULAWESI TENGAH	4439	5261	3012	3759	4773
SULAWESI SELATAN	5673	9142	12075	7528	11468
SULAWESI TENGGARA	3827	2866	4334	7596	7735
GORONTALO	844	684	1004	1114	3960
SULAWESI BARAT	1187	253	395	1313	2011
MALUKU	283	475	2940	611	1905
MALUKU UTARA	683	662	2665	3415	6901
PAPUA BARAT	380	1925	636	2139	1262
PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	1709
PAPUA	568	2722	911	1312	1174
PAPUA SELATAN	0	0	0	0	153
PAPUA TENGAH	0	0	0	0	459
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	122

[www.bkpm.go.id/id/home](http://www.bkpm.go.id/id/home)

### Laju Pertumbuhan PDRB per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	4,14	-0,37	2,81	4,21	4,23
SUMATERA UTARA	5,22	-1,07	2,61	4,73	5,01
SUMATERA BARAT	5,01	-1,61	3,29	4,36	4,62
RIAU	2,81	-1,13	3,36	4,55	4,21
JAMBI	4,35	-0,51	3,7	5,12	4,67
SUMATERA SELATAN	5,69	-0,11	3,58	5,24	5,08
BENGKULU	4,94	-0,02	3,27	4,31	4,28
LAMPUNG	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
KEP. BANGKA BELITUNG	3,32	-2,29	5,05	4,4	4,38
KEP. RIAU	4,83	-3,8	3,43	5,06	5,16
DKI JAKARTA	5,82	-2,39	3,55	5,25	4,96
JAWA BARAT	5,02	-2,52	3,74	5,45	5
JAWA TENGAH	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,97
DI YOGYAKARTA	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07
JAWA TIMUR	5,53	-2,33	3,56	5,34	4,95
BANTEN	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81

BALI	5,6	-9,34	-2,46	4,84	5,71
NUSA TENGGARA BARAT	3,9	-0,62	2,3	6,95	1,8
NUSA TENGGARA TIMUR	5,25	-0,84	2,52	3,08	3,47
KALIMANTAN BARAT	5,09	-1,82	4,8	5,07	4,46
KALIMANTAN TENGAH	6,12	-1,41	3,59	6,45	4,14
KALIMANTAN SELATAN	4,09	-1,82	3,48	5,11	4,84
KALIMANTAN TIMUR	4,7	-2,9	2,55	4,48	6,22
KALIMANTAN UTARA	6,89	-1,09	3,99	5,32	4,94
SULAWESI UTARA	5,65	-0,99	4,16	5,42	5,48
SULAWESI TENGAH	8,83	4,86	11,68	15,22	11,91
SULAWESI SELATAN	6,91	-0,71	4,64	5,1	4,51
SULAWESI TENGGARA	6,5	-0,65	4,1	5,53	5,35
GORONTALO	6,4	-0,02	2,4	4,03	4,5
SULAWESI BARAT	5,56	-2,34	2,57	2,26	5,23
MALUKU	5,41	-0,91	3,63	5,31	5,21
MALUKU UTARA	6,25	5,39	16,79	22,94	20,49
PAPUA BARAT	2,66	-0,76	-0,51	2,03	5,18
PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	1,82
PAPUA	-15,74	2,39	15,16	8,97	4,22
PAPUA SELATAN	0	0	0	0	4,23
PAPUA TENGAH	0	0	0	0	5,95
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	4,78

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### Tingkat Pengangguran Terbuka per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	6,17	6,59	6,30	6,17	6,03
SUMATERA UTARA	5,39	6,91	6,33	6,16	5,89
SUMATERA BARAT	5,38	6,88	6,52	6,28	5,94
RIAU	5,76	6,32	4,42	4,37	4,23
JAMBI	4,06	5,13	5,09	4,59	4,53
SUMATERA SELATAN	4,53	5,51	4,98	4,63	4,11
BENGKULU	3,26	4,07	3,65	3,59	3,42
LAMPUNG	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23

KEP. BANGKA BELITUNG	3,58	5,25	5,03	4,77	4,56
KEP. RIAU	7,50	10,34	9,91	8,23	6,80
DKI JAKARTA	6,54	10,95	8,50	7,18	6,53
JAWA BARAT	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
JAWA TENGAH	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
DI YOGYAKARTA	3,18	4,57	4,56	4,06	3,69
JAWA TIMUR	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
BANTEN	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52
BALI	1,57	5,63	5,37	4,80	2,69
NUSA TENGGARA BARAT	3,28	4,22	3,01	2,89	2,80
NUSA TENGGARA TIMUR	3,14	4,28	3,77	3,54	3,14
KALIMANTAN BARAT	4,35	5,81	5,82	5,11	5,05
KALIMANTAN TENGAH	4,04	4,58	4,53	4,26	4,1
KALIMANTAN SELATAN	4,18	4,74	4,95	4,74	4,31
KALIMANTAN TIMUR	5,94	6,87	6,83	5,71	5,31
KALIMANTAN UTARA	4,49	4,97	4,58	4,33	4,01
SULAWESI UTARA	6,01	7,37	7,06	6,61	6,10
SULAWESI TENGAH	3,11	3,77	3,75	3,00	2,95
SULAWESI SELATAN	4,62	6,31	5,72	4,51	4,33
SULAWESI TENGGARA	3,52	4,58	3,92	3,36	3,15
GORONTALO	3,76	4,28	3,01	2,58	3,06
SULAWESI BARAT	2,98	3,32	3,13	2,34	2,27
MALUKU	6,69	7,57	6,93	6,88	6,31
MALUKU UTARA	4,81	5,15	4,71	3,98	4,31
PAPUA BARAT	6,43	6,80	5,84	5,37	5,38
PAPUA BARAT DAYA	0	0	0	0	0
PAPUA	3,51	4,28	3,33	2,83	2,67
PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0
PAPUA TENGAH	0	0	0	0	0
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

### Jumlah Angkatan Kerja per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023

ACEH	2322729	2359905	2520157	2552562	2604452
SUMATERA UTARA	7036486	6842252	7511006	7669870	8021622
SUMATERA BARAT	2544801	2581524	2761392	2868270	3024430
RIAU	3112774	3022988	3294616	3313818	3134788
JAMBI	1720665	1739003	1840594	1884278	1887840
SUMATERA SELATAN	4166823	4091383	4398907	4497960	4588170
BENGKULU	1013245	1031881	1060520	1076115	1107460
LAMPUNG	4233555	4280109	4494952	4595931	4904900
KEP. BANGKA BELITUNG	712230	699881	738617	767603	785627
KEP. RIAU	972575	1016600	1207014	1259712	1093686
DKI JAKARTA	5167923	4659251	5177314	5252396	5427233
JAWA BARAT	21994014	21674854	24743628	25578174	25391885
JAWA TENGAH	17805261	17536935	18963993	19474934	21069135
DI YOGYAKARTA	2138014	2126316	2334955	2336076	2221694
JAWA TIMUR	20762554	20962967	22319145	22869012	23868764
BANTEN	5676224	5552172	6260654	6463631	5965088
BALI	2509316	2423419	2580523	2738539	2690237
NUSA TENGGARA BARAT	2408095	2575956	2739890	2799178	2976225
NUSA TENGGARA TIMUR	2457848	2725955	2918548	3022421	2990716
KALIMANTAN BARAT	2467027	2458296	2635760	2695203	2922819
KALIMANTAN TENGAH	1368998	1318133	1410311	1404304	1407637
KALIMANTAN SELATAN	2169869	2083319	2219395	2196250	2173257
KALIMANTAN TIMUR	1773371	1692796	1846547	1852802	1950860
KALIMANTAN UTARA	335601	330441	354376	370012	387823
SULAWESI UTARA	1128677	1134802	1212337	1242088	1332149
SULAWESI TENGAH	1493796	1516347	1584101	1635465	1594245
SULAWESI SELATAN	3934557	4006620	4412782	4559375	4694483
SULAWESI TENGGARA	1258102	1289232	1381203	1382395	1395534
GORONTALO	607736	568563	596968	630534	651425
SULAWESI BARAT	660257	672986	708752	749447	760280
MALUKU	712118	775701	860344	868581	910758
MALUKU UTARA	517249	552502	596831	609241	663299
PAPUA BARAT	436739	459350	513666	515370	592802
PAPUA BARAT DAYA	0	1691745	0	0	0
PAPUA	1746963	0	1952777	1991097	2516129

PAPUA SELATAN	0	0	0	0	0
PAPUA TENGAH	0	0	0	0	0
PAPUA PEGUNUNGAN	0	0	0	0	0

satudata.kemnaker.go.id

### Infrastuktur (Panjang Jalan) per Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
ACEH	23897	23632	23650	23660	23660
SUMATERA UTARA	40388	40956	40739	40765	40979
SUMATERA BARAT	22351	22323	22649	20999	22602
RIAU	24320	24115	24293	24206	24206
JAMBI	13126	13131	13141	13202	13353
SUMATERA SELATAN	19175	19606	19606	19587	19838
BENGKULU	9239	9191	9191	9228	9228
LAMPUNG	20759	20715	20759	20765	20767
KEP. BANGKA BELITUNG	5418	5418	5783	5891	5891
KEP. RIAU	5686	5686	5686	5688	5688
DKI JAKARTA	6485	6485	6485	6485	6485
JAWA BARAT	27617	28045	28178	28393	29756
JAWA TENGAH	30667	30667	30544	30819	31678
DI YOGYAKARTA	4361	4338	4338	4449	4449
JAWA TIMUR	41587	42450	42521	42422	42466
BANTEN	5717	5712	5712	5715	6128
BALI	8758	8805	8787	8656	8864
NUSA TENGGARA BARAT	8504	8504	8504	8509	8509
NUSA TENGGARA TIMUR	23571	23656	23656	24050	24050
KALIMANTAN BARAT	18315	18315	18315	18284	18505
KALIMANTAN TENGAH	18686	18800	18809	18906	18923
KALIMANTAN SELATAN	13440	13440	13440	13477	13648
KALIMANTAN TIMUR	12704	12587	13270	13407	13375
KALIMANTAN UTARA	4596	4914	4914	4973	4973
SULAWESI UTARA	10006	10058	10091	10211	10309
SULAWESI TENGAH	16908	16908	16908	16952	16952
SULAWESI SELATAN	30470	30598	30397	30206	30357
SULAWESI	12291	12987	12867	12802	13066

<b>TENGGARA</b>					
<b>GORONTALO</b>	<b>5513</b>	<b>5506</b>	<b>5513</b>	<b>5516</b>	<b>5516</b>
<b>SULAWESI BARAT</b>	<b>5841</b>	<b>6154</b>	<b>6175</b>	<b>6180</b>	<b>5648</b>
<b>MALUKU</b>	<b>10247</b>	<b>10676</b>	<b>10266</b>	<b>10373</b>	<b>9364</b>
<b>MALUKU UTARA</b>	<b>7354</b>	<b>7354</b>	<b>7354</b>	<b>7360</b>	<b>7360</b>
<b>PAPUA BARAT</b>	<b>12436</b>	<b>12522</b>	<b>13015</b>	<b>13028</b>	<b>7533</b>
<b>PAPUA BARAT DAYA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5495</b>
<b>PAPUA</b>	<b>21727</b>	<b>20901</b>	<b>21068</b>	<b>21562</b>	<b>8976</b>
<b>PAPUA SELATAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4919</b>
<b>PAPUA TENGAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3674</b>
<b>PAPUA PEGUNUNGAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3544</b>

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

**Nama : Muhammad Rinaldy Lubis**

**NPM : 2105180031**

**Tempat dan Tanggal Lahir : Kisaran, 20 Juli 3003**

**Jenis Kelamin : Laki-Laki**

**Agama : Islam**

**Kewarganegaraan : Indonesia**

### **2. Data Pendidikan Formal**

**Tahun 2009-2015 : SD Negeri 017973**

**Tahun 2015- 2018 : SMP Negeri 7 Kisaran**

**Tahun 2018-2021 : SMA Negeri 1 Kisaran**

**Tahun 2021-2025: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**